

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN
PRASARANA PASCA PELAKSANAAN PROGRAM P2D
DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

WAN EVRIZAL
L4D 002 137



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-INDIP

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA
PASCA PELAKSANAAN PROGRAM P2D DI
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

WAN EVRIZAL
L4D 002 137

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 25 Juni 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Juni 2004

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Ir. Mardwi Rahdriawan, MT



Ir. Ragil Haryanto, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

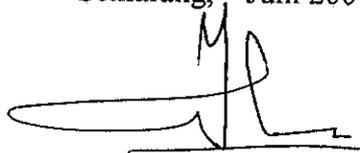



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Juni 2004



WAN EVRIZAL
NIM : L4D 002 137

“....dan apabila dikatakan : Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat....”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Encek dan Ibuku tercinta : H. Wan Rumadi dan Hj.Rochmeliar,
Istriku tercinta Agusnawati, Anakku : Wan Muhammad Iqbal,
Kakakku; Long Evi,serta adik-adikku : Iwan, Elintina & Iyan
Serta Ipar-Iparku; Bang Yan, Bang Af dan Kak Dayang dan Mertuaku : Emak Maimanah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya dengan izin-Nya sajalah, tugas penyusunan tugas tesis berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana Pasca Pelaksanaan Program P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”** dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam studi pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam pengerjaan dan penyusunan tesis ini, tidak akan pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini kami menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA, selaku Ketua Pusdiktek-BPSDM Departemen Kimpraswil, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan ini.
2. Ir. Sidharta Saelan, MM selaku Kepala BKPDMPW Semarang, atas segala arahan dan kesempatan yang telah diberikannya.
3. Bapak Gubernur Riau, yang telah memberikan izin tugas belajar kepada penulis yang masih aktif bekerja di Dinas Kimpraswil Propinsi Riau.
4. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, atas segala arahannya.
5. Ir. Ragil Haryanto, MSP, selaku Mentor dan Ir. Mardwi Rahdriawan, MT, selaku Co-Mentor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
6. Ir. Irawan Wisnu W, MS, selaku pembahas dan Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Penguji dalam sidang ujian yang telah memberi banyak masukan bagi perbaikan penyusunan tesis ini.
7. Encekku : H. Wan Rumadi dan Ibuku : Hj Rochmeliar, yang telah banyak membantu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
8. Istriku tercinta Agusnawati, anakku Wan Muhammad Iqbal, yang setia memberikan dukungan semangat.
9. Mertuaku : Maimanah, yang telah banyak memberikan dukungan semangat.
10. Teman-teman MPPWK Angkatan II UNDIP yang dengan rasa kebersamaan telah memberikan semangat dalam menjalani studi.
11. Keluarga Besar Asrama Keluarga, baik ibu-ibu dan anak-anaknya yang telah memberi suasana keluarga sehingga sedikit banyak dapat mengurangi kerinduan suasana rumah.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian pra tesis ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga hasil penulisan tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2004

Penyusun,

WAN EVRIZAL

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat	6
1.4 Ruang Lingkup Studi	7
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	7
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	8
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Pendekatan Studi	11
1.6.2 Teknik Analisis	12
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA P2D	19
2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	19
2.1.1 Pengertian Partisipasi	19
2.1.2 Model Logika yang Mendasari Strategi Partisipatori	20
2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat	22
2.1.4 Tingkatan Partisipasi Masyarakat	27
2.1.5 Keuntungan/Pentingnya Partisipasi Masyarakat	29
2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	31
2.1.7 Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat	34
2.2 Pembangunan Masyarakat	35
2.2.1 Tujuan Pembangunan Masyarakat	35
2.2.2 Metode Kerja Pembangunan Masyarakat Desa	38
2.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Permasalahannya	38
2.3.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	38
2.3.2 Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat	41
2.4 Tinjauan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)	42

2.4.1	Pendekatan, Prinsip dan Pengelolaan	42
2.4.2	Pengelolaan Prasarana Pasca Pelaksanaan P2D	43
2.5	Rangkuman Kajian Teori	46
BAB III	GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANTAN	51
3.1	Gambaran Umum	51
3.1.1	Kondisi Fisik Wilayah	51
3.1.2	Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya	52
3.1.3	Potensi dan Masalah	54
3.2	Gambaran Umum Kawasan P2D di Kecamatan Bantan	55
3.2.1	Desa Jangkang	56
3.2.2	Desa Bantan Tua	57
3.2.3	Desa Selat Baru	58
3.2.4	Desa Bantan Tengah	60
3.2.5	Desa Bantan Air	61
3.2.6	Desa Muntai	62
3.2.7	Desa Teluk Pambang	63
3.2.8	Desa Kembang Luar	64
3.2.9	Desa Teluk Lancar	65
3.3	Pelaksanaan Program P2D di Kecamatan Bantan	67
3.4	Identifikasi Responden	75
BAB IV	ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA P2D	83
4.1	Analisis Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bantan	83
4.1.1	Bentuk Partisipasi Masyarakat	83
4.1.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat	94
4.2	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat	103
4.2.1	Faktor Internal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat	103
4.2.2	Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat	106
4.3	Analisis Komprehensif	111
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	123
5.1	Kesimpulan	123
5.2	Rekomendasi	125
DAFTAR PUSTAKA		128
LAMPIRAN		131

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL II.1	Logika Proses Partisipasi Masyarakat	20
TABEL II.2	Rangkuman Teori.....	47
TABEL III.1	Jumlah Responden menurut Kelompok Umur	75
TABEL III.2	Jumlah Responden menurut Jenis Kelamin	76
TABEL III.3	Jumlah Responden menurut Tingkat Pendidikan.....	77
TABEL III.4	Jumlah Responden menurut Jenis Pekerjaan	79
TABEL III.5	Jumlah Responden menurut Tingkat Pendapatan	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1	Kerangka Pikir 10
GAMBAR 1.2	Peta Orientasi 17
GAMBAR 1.3	Peta Administrasi Kecamatan 18
GAMBAR 3.1	Kondisi Semenisasi Jalan di Desa Jangkang 57
GAMBAR 3.2	Kondisi Normalisasi Sungai di Desa Bantan Tua 58
GAMBAR 3.3	Kondisi Badan Jalan di Desa Selat Baru..... 60
GAMBAR 3.4	Kondisi Semenisasi Jalan di Desa Bantan Air 62
GAMBAR 3.5	Kondisi Badan Jalan di Desa Teluk Pambang..... 64
GAMBAR 3.6	Kondisi Badan Jalan di Desa Kembang Luar..... 65
GAMBAR 3.7	Kondisi Badan Jalan di Desa Teluk Lancar..... 66
GAMBAR 3.8	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana P2D di Desa Bantan Tua ... 71
GAMBAR 3.9	Peta Lokasi P2D di Kecamatan Bantan..... 73
GAMBAR 3.10	Peta Tata Guna Lahan..... 74
GAMBAR 3.11	Peta Identifikasi Responden 82
GAMBAR 4.1	Bentuk Partisipasi dilihat dari Partisipasi Dalam Pertemuan... 84
GAMBAR 4.2	Bentuk Partisipasi dilihat dari Intensitas Kegiatan 86
GAMBAR 4.3	Bentuk Partisipasi dilihat dari Bentuk Sumbangan 89
GAMBAR 4.4	Bentuk Partisipasi dilihat dari Keterlibatan dalam Pelaksanaan P2D 91
GAMBAR 4.5	Bentuk Partisipasi dilihat dari Derajat Kesukarelaan 92
GAMBAR 4.6	Peta Bentuk Partisipasi Masyarakat..... 93
GAMBAR 4.7	Tingkat Partisipasi dilihat dari Kehadiran Pertemuan 95
GAMBAR 4.8	Tingkat Partisipasi dilihat dari Keaktifan dalam Diskusi 97
GAMBAR 4.9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dilihat dari Keaktifan Dalam Pemeliharaan Prasarana P2D 99
GAMBAR 4.10	Tingkat Partisipasi dilihat dari Sumber Dana 101
GAMBAR 4.11	Peta Tingkat Partisipasi Masyarakat 102
GAMBAR 4.12	Hubungan antara Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana P2D 104

GAMBAR 4.13	Hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan P2D	106
GAMBAR 4.14	Hubungan antara Kepala Desa dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	108
GAMBAR 4.15	Hubungan antara Konsultan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	109
GAMBAR 4.16	Hubungan antara Tokoh Masyarakat dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat	110

ABSTRAK

Pemerintah dalam rangka mempercepat program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan memperkuat proses pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial ekonomi melalui penguatan kelembagaan daerah dan penyediaan prasarana pembangunan sosial ekonomi, yang dikenal dengan nama Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Di Kecamatan Bantan mulai dilaksanakan pembangunan fisik prasarana sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, dimana tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah selesai dikerjakan oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

Tujuan dari pada penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi serta usaha-usaha masyarakat dalam pemeliharaan prasarana Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) di Kecamatan Bantan. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan partisipatif dan pendekatan deskriptif analitik, dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil studi, diketahui bahwa responden adalah berusia Dewasa, bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, tingkat pendidikan yang rendah, serta tingkat pendapatan rendah. Bentuk partisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan adalah memberikan saran dan kritik dalam pertemuan, dan aktif dalam pemeliharaan prasarana P2D dengan memberikan bantuan berupa tenaga, serta intensitas kegiatan diatas 6 bulan. Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, adalah tidak terpaksa, karena mereka menganggap kegiatan pemeliharaan prasarana P2D adalah untuk kepentingan bersama. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah sering hadir dan aktif dalam pertemuan, aktif dalam kegiatan fisik serta sumber dana yang dipergunakan dalam pemeliharaan prasarana P2D, berupa sisa dana program P2D dan sumbangan masyarakat. Dari hasil perhitungan Chi Square diketahui bahwa ada perbedaan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D. Masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan tetap, petani dan wiraswasta mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi, sedangkan buruh, nelayan mempunyai tingkat partisipasi yang agak tinggi. Masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah dan sedang, tingkat partisipasi masyarakat adalah rendah, sedangkan tingkat pendapatan tinggi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah tinggi. Juga hasil perhitungan Chi Square diketahui bahwa Konsultan dan Tokoh masyarakat mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Usulan bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah : Bagi Pemerintah Pusat, karena tidak adanya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), kalau ada tapi tidak aktif, sebaiknya ditetapkan RW atau RT setempat sebagai penanggungjawab pemeliharaan prasarana P2D, dan prasarana yang akan dibangun harus memperhatikan kebutuhan bagi semua golongan masyarakat setempat. Bagi masyarakat, sebaiknya kenali jenis prasarana dan tentukan jadwal pemeliharaan prasarana sesuai jenis prasarana P2D. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, diharapkan bagi Pemda Kabupaten Bengkalis dapat menyediakan dana pembangunan desa di Kecamatan Bantan.

ABSTRACT

In order to accelerate poverty reduction program, The Government is executing development activities to strengthen community empowerment process, and for developing social-economic development through regional institution reinforcement and infrastructure providing which is known as P2D Project. The execution of physical infrastructure development in Banten District began in 2001-2003, which the planning stage and the execution has been done by community through Local Community Organization (Organisasi Masyarakat Setempat = OMS).

The goal of this study is to identify the form and the participatory level and the community efforts of Banten District in maintain infrastructures of P2D Project. The approaches used in this study are participatory approach and analytical descriptive approach, using quantitative and qualitative methods.

Based on the result of this study, it is known that the respondent is adult, works as farmers and fishermen, low level education, and low level income. The participatory forms in infrastructure maintenance of P2D Project are giving suggestions and critics in meetings, actively involve in infrastructure maintenance by providing manpower, and the intensity of activity is more than 6 months. Community involvement in infrastructure maintenance of P2D Project is unpressed because the community feels that the program is for their own importance. The community participatory level shown in the frequently attendance, actively involve in meetings, actively involve in physical efforts. It is also shown in the sources of fund which is come from P2D Project and community. The Chi-Square computation shows that there is difference between occupation and income level to community participatory level. Communities with irregular job, farmers, and entrepreneurs have a high participatory level. White collar labours, fishermen have a rather high participatory level. Communities with low and medium income levels have a low participatory level; meanwhile communities with high income have a high participatory level. The consultant and community figure has correlation with the community participatory level, as a result.

Recommendations for increasing community participatory level in this study are first, The Central Government is expected to set RT or RW to take responsibility in infrastructure maintenance of P2D Project because KPP is not active; second, the community is expected to recognize and to set the schedule of infrastructure maintenance according to the type of the infrastructure; third, due to the low level of community's income, The Regency Government of Bengkalis is expected to provide rural development funds in Banten District.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana dan prasarana dasar (perhubungan, pengairan, air bersih dan listrik) merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dewasa ini masyarakat semakin menuntut dipenuhinya kebutuhan tersebut secara baik dan merata. Pembangunan yang kurang merata ini disebabkan disparitas kondisi ekonomi dan geografis. Kebutuhan sarana perhubungan (jalan dan jembatan) yang memadai merupakan tuntutan masyarakat yang paling utama, karena pembangunan jalan dan jembatan akan memberikan *multiplier effect* (efek ganda) bagi kelancaran pengembangan sektor-sektor pembangunan yang lain, seperti perdagangan, pertanian, industri, jasa dan pariwisata.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Pusat melalui Depdagri dan Otonomi Daerah Dirjen Pemberdayaan Daerah berusaha meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), sebagai kelanjutan dari program P2DT yang sudah dimulai sejak tahun 1995/1996 sampai tahun 2000.

Dalam jangka panjang, P2D bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan.

Biasanya dalam proyek-proyek pembangunan yang ditujukan terhadap masyarakat miskin dan tersisih lebih diperhatikan. Untuk itu dibutuhkan dukungan untuk dapat meningkatkan mata pencaharian mereka. Selain itu juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai potensi, namun demikian pemberdayaan masyarakat yang sudah

dilaksanakan selama ini tidak memungkinkan masyarakat miskin dapat mengembangkan kapasitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi wilayah merupakan kunci pokok, dimana pengembangan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan pengembangan ekonomi wilayah (Bappenas, 2001).

Upaya pembangunan wilayah dalam program P2D merupakan suatu proses tumbuh kembangkan suatu wilayah sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas. Proses tersebut merupakan interaksi yang semakin intensif antara sumber daya alam, sumber daya manusia dengan teknologinya, yang ditunjang oleh tersedianya prasarana dan sarana fisik. Proses tumbuh kembangnya suatu wilayah tersebut terjadi dengan memanfaatkan sumber alam yang tersedia, yang hasilnya akan mengakibatkan meningkatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, maka akan memberikan sumbangan terhadap berkembangnya wilayah yang lebih luas.

Namun bertitik tolak dari pembangunan P2D yang berbasis pemberdayaan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dengan penekanan bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, kebutuhan, jenis, jumlah dan lokasi prasarana. Pada tahap pelaksanaan masyarakat harus diikutsertakan baik dengan pola Kerja Sama Operasional (KSO) maupun pelaksanaan langsung. Diharapkan dengan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan akan timbul rasa memiliki, sehingga muncul keinginan untuk memelihara prasarana tersebut.

Kecamatan Bantan yang merupakan salah satu dari 4 Kecamatan di propinsi Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan bantuan program P2D ini, karena daerah ini mempunyai prasarana transportasi darat untuk menghubungkan antar desa terutama desa Teluk Lancar, kondisi jalannya masih berupa jalan tanah, prasarana pendidikan mayoritas

sudah sampai SLTP, kecuali di Teluk Lancar, air bersih dengan tadah hujan dan prasarana kesehatan tidak semua ada, seperti puskesmas pembantu.

Letak desa-desa di Kecamatan Bantan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka kecuali desa Bantan Tua, sehingga pengaruh pasang surut air laut mengakibatkan sebagian wilayah di Kecamatan Bantan terjadi genangan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat itulah program P2D diadakan di Kecamatan Bantan, di mulai pada Tahun 2000 perencanaan dan tahun 2001 sampai tahun 2003 pembangunan fisik.

Namun hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata banyak yang kurang terpelihara karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor terkait, selain itu juga tidak ada dana swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Selain itu kelestarian prasarana yang dibangun kurang terjamin karena tidak adanya pemeliharaan akibat kurang tegasnya pendelegasian mengenai penanggungjawab dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.

Dalam buku pedoman pelaksanaan P2D, pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan program P2D, dimana masyarakat bersama fasilitator dan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan, sebelum pekerjaan berakhir, mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi terhadap jenis prasarana dan menentukan terhadap besarnya kelompok penerima manfaat dari masing-masing prasarana, besarnya dana, sumber dana dan lain-lain, serta mengusulkan pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP). Setelah KPP ini terbentuk, diharapkan masyarakat dapat mengetahui susunan organisasi,

dan mengerti hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam organisasi pemanfaatan dan pemeliharaan, dan selanjutnya mereka yang menentukan keberlanjutan pemanfaatan prasarana tersebut.

Dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Bantan tidak semuanya terbentuk Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP), walaupun ada, itupun hanya sebatas persyaratan OMS sebagai pelaksana kegiatan untuk mengambil uang termin terakhir, sedangkan untuk kegiatannya baik berupa pertemuan atau kegiatan rutin dalam pemeliharaan prasarana tidak ada. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kecamatan Bantan pada umumnya, memperlakukan prasarana P2D ini sama dengan prasarana lainnya yang ada di lingkungan mereka, begitu juga dalam hal pemeliharaannya.

Karena kurang aktifnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan khususnya oleh KPP, akibatnya sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh masyarakat sendiri melalui Organisasi Masyarakat Setempat ((OMS) tidak terawat dengan semestinya, walaupun masyarakat Kecamatan Bantan pada umumnya sudah rutin melakukan kegiatan gotong royong, terutama setiap kali mau ada kegiatan hari besar nasional, hari besar Islam, pesta perkawinan atau ada kematian.

Masyarakat biasanya bergotong royong atas koordinasi Kepala Dusun, Rw atau RT setempat. Jadi setiap prasarana apapun yang ada di dusun mereka menjadi tanggungjawab kepala Dusun, RW atau RT setempat untuk memeliharanya demi kelangsungan prasarana tersebut.

Berdasarkan pada fenomena tersebut diatas, kiranya menarik untuk dilakukan studi yang diarahkan kepada partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

1.2 Permasalahan

Dalam rangka pengadaan prasarana perdesaan yang dilakukan dengan program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Pemerintah telah mengikutsertakan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut dapat diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di samping itu, diharapkan nantinya masyarakat akan timbul rasa memiliki sehingga muncul keinginan untuk memelihara prasarana yang dibangun.

Apa yang diharapkan belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana perdesaan pada masing-masing desa di Kecamatan Bantan berbeda. Menurut Bintarto (1983: 14), tiap-tiap desa mempunyai *geographical setting* dan *human efforts* serta letak yang berbeda-beda. Sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Sehingga perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan pengembangan prasarana perdesaan (P2D) di Kecamatan Bantan

Dalam rangka mendukung upaya tersebut maka perlu diketahui dahulu bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang ada serta faktor-faktor internal dan eksternal masyarakat yang mempengaruhinya. Kemudian dicari hubungan antara bentuk dan tingkat partisipasi dengan faktor-faktor tersebut. Dari faktor-faktor inilah dijadikan dasar bagi peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian adalah : Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) di Kecamatan Bantan yang telah dilakukan dengan pola Pelaksanaan Langsung.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi serta usaha-usaha masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) yang dikerjakan langsung oleh masyarakat di Kecamatan Bantan.

Berdasarkan tujuan seperti tersebut diatas maka yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Karakteristik Masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan.
2. Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D berupa : usulan, saran, kritik, tenaga, uang/dana dan bahan/material. Dan frekuensi kehadiran, keaktifan berdiskusi dan kegiatan fisik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
3. Menganalisis Keterkaitan/Korelasi faktor internal yang terdiri dari : usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, serta faktor eksternal peran dari Kepala Desa, Konsultan dan Tokoh Masyarakat yang ada dimasyarakat.
4. Merumuskan usulan dan merekomendasikan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan P2D di Kecamatan Bantan.

Manfaat dari penelitian ini adalah karena pola pembangunan P2D ini di Kecamatan Bantan adalah hal yang baru, sehingga diharapkan dengan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat melaksanakan pola pembangunan serupa, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi Pemda Kabupaten Bengkalis bila nantinya melaksanakan pola pembangunan seperti P2D yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan juga sebagai perbaikan dalam pelaksanaan program P2D akan datang di Kecamatan Bantan.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ditekankan pada pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) yang dikerjakan langsung oleh masyarakat di Kecamatan Bantan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana yang dimaksudkan disini merupakan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsinya dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat.
3. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) adalah program pembangunan prasarana perdesaan yang telah dikerjakan di Kecamatan Bantan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) melalui Pelaksanaan Langsung. Karena penelitian lebih memfokuskan pada partisipasi masyarakat pasca pelaksanaan P2D yang telah selesai dikerjakan oleh OMS, maka kajian pelaksanaan pengembangan prasarana perdesaan (P2D) ini dibahas sebatas pendukung dalam analisa.
4. Pengertian prasarana disini adalah prasarana yang telah dibangun atau dilaksanakan oleh program P2D yaitu berupa normalisasi sungai, badan jalan dan semenisasi jalan.
5. Pembahasan ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) berupa bentuk dan tingkat partisipasi dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan P2D.
5. Mengenai indikator bentuk dan tingkat partisipasi yang diberikan secara langsung berupa : usulan, saran, kritik, tenaga, uang/dana dan bahan/material. Dan frekuensi

kehadiran, keaktifan berdiskusi, keaktifan dalam kegiatan fisik, dan Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

6. Mengenai variabel-variabel penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi digali dari studi literatur dan dikelompokkan dalam faktor internal masyarakat terdiri dari : usia, jenis kelamin, status, pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, serta faktor eksternal masyarakat yang terdiri dari peran Kepala Desa, konsultan sebagai pendamping dan Tokoh Masyarakat. Dalam hal ini faktor-faktor lain di luar faktor tersebut tidak dibahas dan diasumsikan stabil.

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Kecamatan Bantan berada pada dataran rendah dengan kondisi permukaan relatif datar dan ketinggian ± 2 M diatas permukaan laut dengan suhu maximum 26 – 30 °C. Kecamatan Bantan luasnya $\pm 424,40$ Km² dan secara administratif pemerintahannya terdiri dari 9 (sembilan) desa.

Dari hasil Registrasi Penduduk yang dikumpulkan Mantri Statistik Kecamatan pada akhir tahun 1998 di Kecamatan Bantan terdapat keluarga sebanyak 7.135 dengan jumlah penduduk 32.798 jiwa yang terdiri dari 16.833 jiwa laki-laki (51,3 %) dan 15.965 jiwa perempuan (48,7 %) Dengan kepadatan penduduk mencapai 77 Jiwa/Km², penduduk Kecamatan Bantan yang terpadat pada akhir tahun 1998 adalah Desa Bantan Air, yang terjarang Desa Teluk Pambang masing-masing 111 Jiwa/Km² dan 43 Jiwa/Km².

Kecamatan Bantan mempunyai sembilan desa, yang kesemuanya mulai tahun 2001 sampai tahun 2003 mendapatkan bantuan program P2D, dengan jenis prasarana yang berbeda sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat setempat.

Dengan perbedaan jenis prasarana, faktor internal masyarakat serta faktor eksternal yang ada dalam masyarakat, mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam

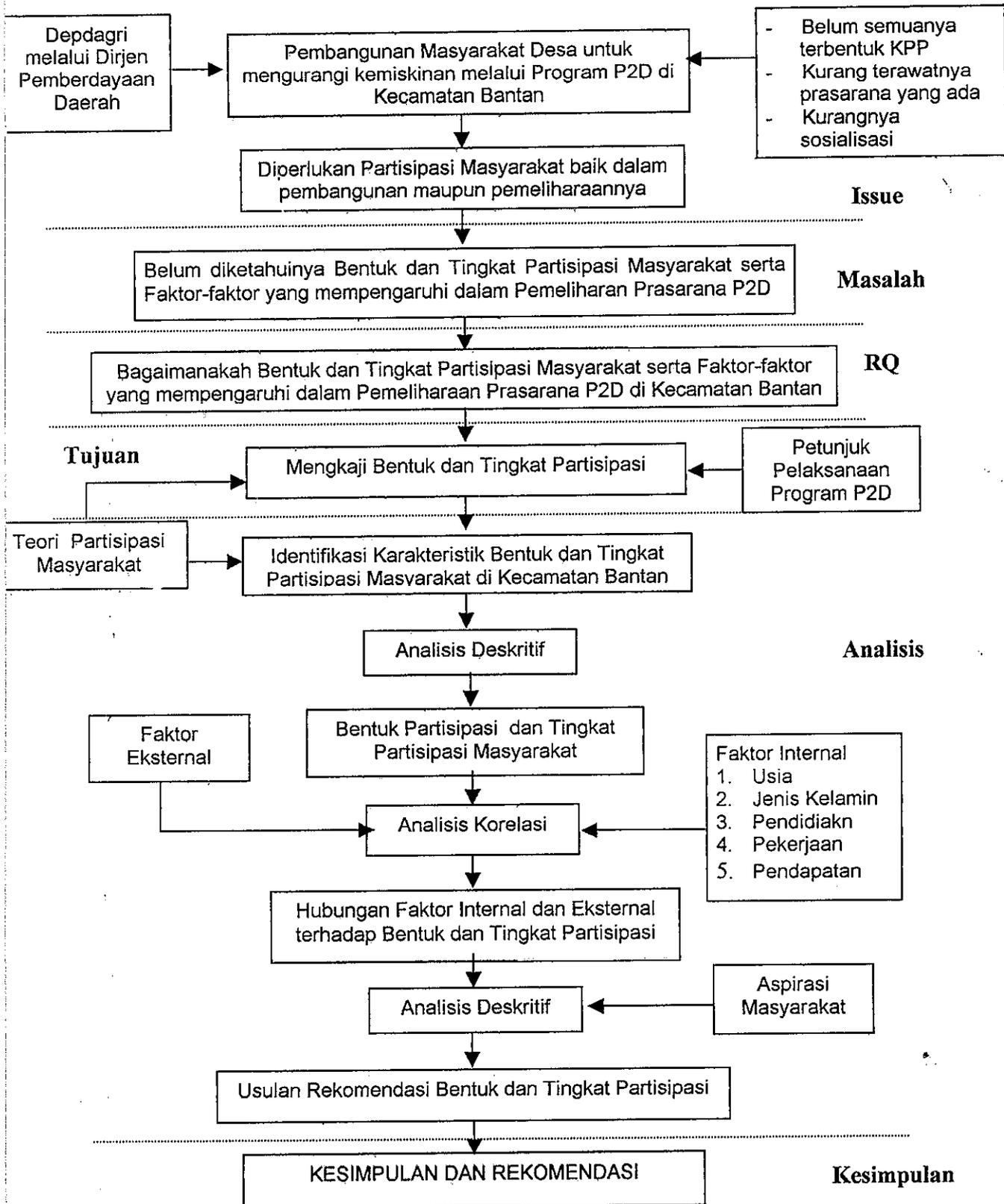
pemeliharaan prasarana yang sudah dibangun, tidak sama pada masing-masing masyarakat setempat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah dalam rangka mempercepat program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan memperkuat proses pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan sosial ekonomi melalui penguatan kelembagaan daerah dan penyediaan prasarana pembangunan sosial ekonomi, yang dikenal dengan nama Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).

Di Kecamatan Bantan mulai dilaksanakannya pelaksanaan pembangunan fisik prasarana mulai tahun 2001 sampai dengan 2003, yang mana pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah selesai dikerjakan oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Karena perbedaan letak geografis, tidak tersedianya dana pemeliharaan oleh Pemerintah, serta terbatasnya kemampuan masyarakat, mengakibatkan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan tiap desa berbeda satu sama lainnya.

Dengan latar belakang tadi, bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan P2D di Kecamatan Bantan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, nanti diharapkan dapat diketahui Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.



**GAMBAR I.1
KERANGKA PIKIR
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA
P2D DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

1.6 Metoda Penelitian

1.6.1 Pendekatan Studi

Dalam studi kajian partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) ini terdapat dua pendekatan studi yang digunakan, yaitu pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat (*community based development approach*) dan pendekatan deskriptif analitik, yang dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan partisipatif digunakan karena yang menjadi pokok materi dalam studi ini adalah partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program P2D. Pendekatan partisipatif dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai pemeliharaan prasarana P2D dan keterlibatan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis berbagai data dan informasi yang masuk bagi kepentingan penyusunan studi ini. Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif diperlukan untuk mengumpulkan data dengan metode wawancara guna mendapatkan data kualitatif atau temuan-temuan lapangan yang berguna bagi penyusunan studi ini, dimana data tersebut relatif sulit jika hanya dicari dengan metode survei. Pendekatan kualitatif juga digunakan dalam tahap analisis, terutama dalam merumuskan tingkat partisipasi masyarakat dan dalam merumuskan rekomendasi pelibatan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, metode kuantitatif diperlukan untuk menganalisis tingkat korelasi antar variabel yang berpengaruh pada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D. Data yang dibutuhkan guna melakukan analisis-
analisis

tersebut didapat dengan teknik kuisioner yang akan digunakan mendapatkan data kuantitatif.

6.1.2 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah Teknik analisis deskriptif kuantitatif didukung dengan kualitatif serta metoda tabulasi silang. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Metoda untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat.*

Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan prasarana perdesaan (P2D) dipakai metoda analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil pengambilan data dari para warga maka dapat diketahui prosentase bentuk partisipasi yang diinginkan dalam pembangunan prasarana perdesaan (P2D) baik bentuk sumbangan dalam berperan serta maupun bentuk kegiatan.

b. *Metoda untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat.*

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana perdesaan dapat dilihat dari proses kegiatannya. Tingkat partisipasi masyarakat ini diukur dengan metoda kuantitatif melalui penjumlahan skor dari indikator frekuensi kehadiran dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan keterlibatan dalam pengambilam keputusan Dimana masing-masing indikator terdiri dari skala sangat tinggi (5), tinggi (4), agak tinggi (3), rendah (2) dan sangat rendah (1).

Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh didasarkan skor kategori tingkat partisipasi individu dikalikan dengan jumlah sampel. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat 5 kriteria dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 5. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (5×1) adalah 5, maksimum skor yang

diperoleh untuk setiap individu (5×5) adalah 25. Maka bila jumlah sampel 100, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat peran serta masyarakat (100×5) adalah 500 dan skor maksimum (100×25) adalah 2500. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, $(2500 - 500)/5 = 400$. Sehingga dapat diketahui tingkat peran serta masyarakat adalah

- Sangat Tinggi bila memiliki skor 2101 – 2500
- Tinggi bila memiliki skor 1701 – 2100
- Agak Tinggi bila memiliki skor 1301 - 1700
- Rendah bila memiliki skor 901 – 1300
- Sangat rendah bila memiliki skor 500 – 900

c. *Metoda untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.*

Dalam mengamati hasil survei primer yang di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silang. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih, dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya.

Dalam studi ini, metoda tabulasi silang digunakan untuk menganalisis hasil survey primer yang dilakukan terhadap responden di Kecamatan Bantan. Metoda ini digunakan untuk melihat hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta dengan faktor kemauan dan kemampuan masyarakat dan faktor dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping.

Data-data dari tiap variabel tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan. Kemudian variabel-variabel yang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan

kolom. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontigensi (*contingency coefficient*). Dalam hal ini koefisien kontigensi merupakan koefisien yang digunakan untuk melihat *ada* atau *tidak* serta *kuat* atau *lemahnya* hubungan diantara dua variabel.

Besarnya Koefisien Kontigensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

(sigit,1999,105)

$$KK = \frac{\chi^2}{\sqrt{\chi^2 + N}}$$

dimana : KK = Koefisien Kontigensi

χ^2 = Kai Kuadrat (*Chi square*)

N = Besar sampel

Dimana besarnya KK berada pada rentang skala antara 0 sampai 1, atau :

$$0 \leq KK \leq 1$$

Bila KK = 0 berarti tidak ada hubungan

Bila KK = 1 berarti ada hubungan sempurna

Dalam hal ini semakin mendekati angka 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat dan semakin mendekati angka 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Rumus untuk mencari χ^2 dengan memakai formula (sigit,1999,105)

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

Dimana f_o = Hasil Observasi

f_e = Hasil yang diharapkan

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis ini yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang , tujuan dan sasaran, ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana P2D

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung pelaksanaan studi dan dapat menjawab secara teoritis permasalahan yang diangkat.

Bab III Gambaran Umum Pemeliharaan Prasarana P2D di Kecamatan Bantan

Bab ini menggambarkan kondisi secara umum wilayah studi makro dan mikro dari aspek fisik dan geografis, sosial kependudukan, maupun ekonomi.

Bab IV Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana P2D

Bab ini berisi mengenai analisis-analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan studi. Terdapat empat analisis dalam studi ini, mulai dari identifikasi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D sampai perumusan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P3D.

Bab V Kesimpulan dan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya akan disimpulkan pada bab ini. Kesimpulan akan digambarkan pencapaian tujuan studi dan sekaligus

memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Saran terhadap berbagai pihak juga akan menjadi keluaran dalam bab V. Saran tersebut akan dihasilkan dari hasil analisis terakhir mengenai perumusan rekomendasi mengenai program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PETA ORIENTASI

TESIS

LEGENDA

- Batas Negara
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibu Kota Propinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Desa/Kelurahan
- Sungai
- Lapangan Terbang/Bandar Udara
- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal

INSERTI



GAMBAR : 1.2

HALAMAN : 17

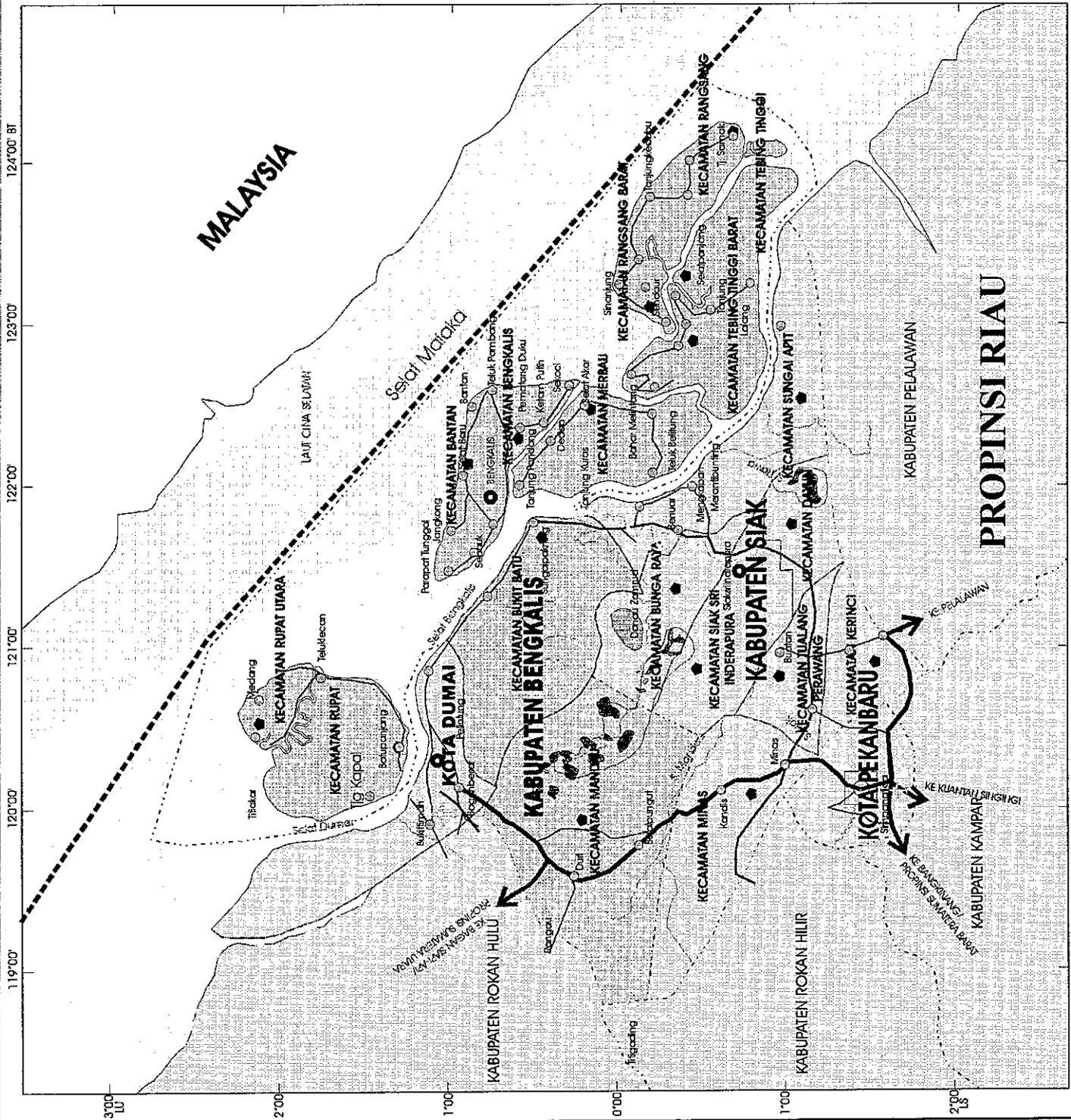
SKALA



UTARA



SUMBER :
RTRW PROPINSI RIAU 2000



MALAYSIA

PROPINSI RIAU

119°00' 120°00' 121°00' 122°00' 123°00' 124°00' BT

3'00" LU 2'00" 1'00" 0'00" 1'00" 2'00" LS

BAB II

TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA P2D

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Dalam hubungannya dengan pembangunan, defenisi partisipasi menurut PBB dalam Slamet (1994: 3), adalah sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) didalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela; dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Oleh karena itu, pelibatan seseorang dalam berpartisipasi harus dilakukan pada proses-proses perencanaan, pelaksanaan, dan operasinya.

Sementara partisipasi masyarakat menurut Godschalk (dalam Yulianti, 2000: 21) merupakan pengambilan keputusan secara bersama antara masyarakat dan perencana, sedangkan menurut Salusu (1998: 13), partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan.

Pada tahap awal pembangunan, peranan Pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha Pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan besarpun, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan (Kartasmita, 1997: 56).

Pada kenyataannya, kontribusi masyarakat disamping swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah sendiri, dipandang sebagai suatu sumbangan pokok dalam pembangunan. Seringkali dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil suatu proyek yang telah dihasilkan dari partisipasi masyarakat, jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, dibandingkan dengan proyek tanpa melibatkan masyarakat tersebut. Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya dilihat sebagai obyek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih dari itu, sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subyek yang dalam hal ini mitra pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusunan program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi dan pemeliharannya.

Pembangunan di daerah disadari merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, sedangkan Pemerintah Pusat dan Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat harus merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan.

2.1.2 Model Logika yang Mendasari Strategi Partisipatori

Partisipasi dalam pembangunan, menurut Lund (dalam Mikkelsen, 2003: 66), akan menghadapi dua pandangan yang berasal dari dua logika, logika yang didasarkan pada efisiensi dan logika yang di dasarkan pada proses pemberdayaan. Kedua metode tersebut dapat dijelaskan seperti uraian dibawah ini.

TABEL II.1
LOGIKA PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT

Strategi	Efisiensi	Pemberdayaan
Rumusan Dasar	Pembangunan melalui Kemitraan <i>Top Down</i> dengan masyarakat (Jangkauan ke bawah yang inklusif).	Pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat (Jangkauan ke atas yang integratif).

Strategi	Efisiensi	Pemberdayaan
Asumsi Normatif	Masyarakat miskin harus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti yang ditentukan oleh negara.	Masyarakat miskin harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri butuhkan
Asumsi Deduktif	Masyarakat partisipasi sebelumnya dalam proses pembangunan. Karena itu mereka harus dibuat mampu untuk lebih berpartisipasi lagi.	Berarti bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
Asumsi Teoritis Sebab Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik diantara kelompok-kelompok sosial dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin 2. Partisipasi Masyarakat berdampak positif terhadap pembangunan 3. Partisipasi masyarakat merupakan alat positif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat (manusia dan alam) dengan tujuan melaksanakan program pembangunan tertentu. <p>4.a Kurangnya partisipasi merupakan suatu ekspresi dari ketidakmampuan untuk berpartisipasi : kurangnya dana, pendidikan dan sumber-sumber lain, serta tingkat organisasinya rendah.</p> <p>4.b Atau bisa juga berarti bahwa rancangan program kurang disesuaikan pada kebutuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang menyimpang atau teknologi yang tidak tepat. (Hambatan operasional untuk berpartisipasi). Jadi hal itu menunjukkan perlunya perbaikan pada pendidikan, teknik, administrasi dan keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat adalah mungkin. 2 Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat. 3 Pembangunan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri memiliki untuk memaksa pemerintahnya. 4.a Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti penolakan (secara internal dikalangan anggota masyarakat itu dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana proyek) 4.b Atau hal itu menunjukkan adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi (hambatan struktural untuk berpartisipasi). Jadi ini merupakan konflik sosial yang merupakan konflik sosial yang harus diatasi melalui musyawarah mufakat, kompromi atas kebijakan yang bertentangan itu tidak menghilangkan struktur yang tidak memungkinkan partisipasi melalui reformasi politik.

2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasi pembangunan tersebut (Slamet, 1994: 23). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi. Karena dalam proses perencanaan masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang dimaksud membuat keputusan disini adalah menunjuk secara tidak langsung seperangkat aktivitas tingkat laku yang luas, bukannya semata-mata hanya membuat pilihan diantara berbagai alternatif.

Dalam hal partisipatif, perencanaan pembangunan mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target; merumuskan program-program, menilai program apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber biayanya. Bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan ini, dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga yang ada seperti LKMD, RW maupun RT.

LKMD merupakan lembaga masyarakat di kelurahan/desa yang merupakan suatu wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakasa serta swadaya gotong royong masyarakat/desa, dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya menurut Slamet (1994: 109), bahwa partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauhmana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan, didalam kegiatan-kegiatan fisik. Dengan demikian, pengukurannya adalah

sejauhmana masyarakat telah memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berwujud uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang. Pada umumnya yang menyumbang uang adalah golongan penduduk yang tergolong kaya. Sumbangan barang biasanya tidak terbatas pada kelas sosial tertentu tetapi tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Sedangkan mereka yang menyumbangkan tenaga biasanya berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat dapat menyumbang ketiganya dan hal ini akan berbeda-beda pada tiap daerah tergantung pada karakteristik masyarakatnya.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap operasi adalah seberapa besar masyarakat memetik manfaat dari program pembangunan yang telah dilaksanakan, seperti pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Duseldorp dalam Slamet (1994: 10), mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi yaitu :

1. Penggolongan berdasarkan pada derajat kesukarelaan.

Bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, terdiri dari dua bentuk, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh orang atau lembaga lain. Sedangkan partisipasi terbujuk, bila seseorang mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain.

Adapun partisipasi terpaksa terjadi karena terpaksa oleh hukum dan terpaksa karena keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan hukum dalam suatu kegiatan.

2. Penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan.

Penggolongan ini dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila orang menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi seperti misalnya, mengambil peran dalam pertemuan, diskusi, menyumbangkan tenaga dan sebagainya. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hal partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan seperti halnya di senat, DPR, dewan-dewan koperasi dan sebagainya. Namun demikian wakil-wakil tersebut, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak yang diwakili, harapannya adalah agar para wakil itu, dapat mengambil bagian di dalam proses pembuatan keputusan pada tingkatan yang lebih tinggi.

3. Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan.

Ada enam langkah, yaitu perumusan tujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan dan penilaian. Disebut partisipasi lengkap apabila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh tahap tersebut. Sedangkan disebut partisipasi sebagian, bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh tahapan tersebut.

4. Penggolongan berdasarkan pada tingkatan organisasi.

Penggolongan ini dibedakan antara partisipasi terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi. Partisipasi terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Sedang

partisipasi tidak terorganisasi, terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo kadang-kadang saja yang umumnya karena keadaan memaksa. Partisipasi tidak terorganisasi ini akan tumbuh menjadi terorganisasi bila kegiatan yang dilakukan itu berulang-ulang, sehingga demi kelancaran pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian.

5. *Penggolongan berdasarkan pada Intensitas dan Frekuensi Kegiatan.*

Partisipasi intensif terjadi bila di dalamnya terdapat aktivitas partisipatif yang tinggi. Sedang partisipasi ekstensif bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan memerlukan interval waktu panjang.

6. *Penggolongan berdasarkan pada lingkup kegiatan*

Digolongkan menjadi partisipasi tak terbatas, yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas. Kedua adalah partisipasi terbatas, yang terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

7. *Penggolongan berdasarkan pada efektivitas.*

Secara tingkat efektivitas, partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi efektif dan partisipasi tidak efektif. Partisipasi efektif yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Partisipasi tidak efektif, terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang dicanangkan terwujud.

8. *Penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat*

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dibedakan sebagai berikut :

a. Anggota masyarakat setempat

- Penduduk setempat

- Pemimpin setempat
- b. Pegawai Pemerintah
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan Penduduk
- c. Orang-orang luar
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan Penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

9. *Penggolongan berdasarkan gaya partisipasi*

Dibedakan menjadi tiga model praktek organisasi masyarakat, yaitu :

a. Pembangunan lokalitas

Memiliki maksud melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarahkan pada kegiatan menolong diri sendiri.

b. Perencanaan Sosial.

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan sosial, memiliki tujuan utama untuk mencocokkan terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif.

c. Aksi Sosial.

Tujuan utama tipe ini adalah memindahkan hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber.

Adapun Bentuk partisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah Keterlibatan dalam pelaksanaan P2D, partisipasi dalam pertemuan, frekuensi kegiatan, bentuk sumbangan yang diberikan, dan derajat kesukarelaan.

2.1.4 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam beberapa tingkatan, dari yang bersifat non-partisipasi, sampai pada kekuasaan warga. Menurut Arstein (dalam Panudju, 1999: 72), tingkatan-tingkatan tersebut, adalah :

1. *Manipulation* atau Manipulasi

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.

2. *Therapy* atau Terapi

Pada tingkatan ini, masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam group terapi. Masyarakat terliabt dalam banyak kegiatan, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan informasi atau usulan-usulan.

3. *Informing* atau pemberian informasi

Merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya diberikan secara utuh satu arah, dari penguasa ke rakyat, tanpa adanya kemungkinan umpan balik, sehingga kecil kesempatan rakyat untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.

4. *Consultation* atau konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka. Apabila konsultasi disertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan kepedulian terhadap ide-ide masyarakat.

Tahap ini biasanya dilakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengan pendapat publik.

5. *Placation* atau perujukan

Pada tingkatan ini, masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam berbagai hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usulan-usulan dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan anggota-anggota instansi pemerintah lainnya.

6. *Partnership* atau kemitraan

Pada tingkatan ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggungjawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

7. *Delegated Power* atau Pelimpahan kekuasaan

Pada tingkatan ini, masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.

8. *Citizen Control* atau masyarakat yang mengontrol

Pada tingkatan ini, masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai

kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga dapat menghubungi sumber-sumber dana tanpa perantara pihak ketiga.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994: 82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat partisipasi sosial yaitu :

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
- b. Kehadiran dalam pertemuan
- c. Membayar iuran/sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Menurut Goldhamer untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel yaitu :

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala partisipasi individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk mengukur partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan
- b. Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi
- c. Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik
- d. Sumber dana.

2.1.5 Keuntungan/Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Conyers (1994: 154), ada tiga alasan utama mengapa Partisipasi mempunyai sifat yang sangat penting. *Pertama*, Partisipasi masyarakat sebagai alat guna

memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunanya jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, lalu *Ketiga*, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep '*man centred development*', yaitu suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri. Karena dalam proses pembangunan akan jauh lebih baik, bila sejak awal sudah mengikuti sertakan masyarakat pemakai hasil pembangunan itu (Yudohusodo dalam Yulianti, 2000: 21). Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan proyek, Partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil suatu proyek yang telah dihasilkan dari Partisipasi masyarakat, jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, dibandingkan dengan proyek tanpa melibatkan masyarakat tersebut. Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya dilihat sebagai obyek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih dari itu, sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subyek yang dalam hal ini mitra pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusunan program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi dan pemeliharannya.

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Partisipasi masyarakat, antara lain faktor dari dalam, yaitu kemampuan masyarakat, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun dari luar masyarakat yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.

Mengenai kemampuan masyarakat, hal ini akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat kota. Menurut Max Weber dalam Zanden (dalam Yulianti, 2000: 33), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat dan mengidentifikasi adanya tiga komponen dalam dimensi stratifikasi masyarakat, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Kelas ekonomi, akan membedakan kelompok masyarakat satu dengan yang lain, bila ditinjau dari tingkat pendapatan dan kekayaan. Status bergantung pada keberadaan bagaimana seseorang dilihat atau dinilai, sedang kekuasaan menurut Thio (1989: 23) adalah kemampuan seseorang untuk meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan olehnya. Biasanya yang lebih banyak kekayaannya, maka akan lebih besar kekuasaan yang dimilikinya.

Stratifikasi masyarakat tersebut, akan menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ada hubungan yang erat antara kelas-kelas sosial dengan perilaku tolong menolong yang menjadi jiwa Partisipasi.

a. Faktor-faktor Internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok masyarakat itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1997: 97).

Namun demikian, menurut Slamet (1994: 97), kita dapat memilih variabel-variabel individu yang kita duga mempunyai hubungan erat dengan setiap tahapan partisipasi. Sehingga analisis ini lebih mempunyai makna dan bermanfaat.

1. *Jenis Kelamin.*

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno dkk (dalam Yulianti, 2000: 34), mengatakan bahwa didalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

2. *Usia*

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat Partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno dkk dalam Yulianti, 2000: 34). Dalam hal ini, golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

3. *Tingkat Pengetahuan*

Demikian halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986: 54) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah, tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai

pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.

4. *Tingkat Pendapatan*

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Barros (dalam Yulianti, 2000: 34) menyatakan bahwa, banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan dan tidak mengkontribusikan uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

5. *Mata Pencaharian*

Mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat dipengaruhi Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Budihardjo (1991: 15) menyatakan bahwa banyak warga yang telah disibukkan oleh kegiatan sehari-hari, kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar.

Adapun faktor-faktor internal yang ada pada masyarakat di mana lokasi prasarana P2D dikerjakan adalah Umur, Jenis Kelamin, Suku, Pendidikan, Jenis Pekerjaan dan Pendapatan.

B. Faktor-Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam Jurnal Tata Loka, 2003: 79), Faktor-faktor Eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*Stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai

pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Petaruh kunci mempunyai pengaruh yang signifikan.

Menurut Ibrahim (2003: 137), Faktor Eksternal merupakan kekuatan-kekuatan diluar masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.

Menurut buku petunjuk pelaksanaan P2D yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi P2D Pusat, pada tingkat Desa, petaruh yang terlibat dalam kegiatan P2D mulai pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan pemeliharaan adalah

1. Kepala Desa
2. Konsultan
3. Tokoh Masyarakat

Dalam pelaksanaan program P2D pada tingkat Desa, ketiga stakeholder masing-masing mempunyai peran untuk menyelenggarakan sosialisasi P2D kepada masyarakat, pemasyarakatan review RENSTRA Kecamatan dan PIK (Program Investasi Kecamatan) yaitu daftar usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Kelompok Diskusi Sektoral (KDS) yang telah dipadukan dengan program Kecamatan atau Kabupaten, kemudian dihitung skala prioritasnya.

Menurut Conyer (1994: 169), Sifat penting pemerintah lokal sebagai alat pendorong partisipasi dalam pembangunan. Semakin kecil daerah dan penduduk yang mendiaminya, maka akan semakin mungkin bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana-sarana yang efektif kearah partisipasi (Conyer, 1994: 173).

2.1.7 Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat, ada 3 kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001: 18) yaitu :

1. Waktu, masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.

2. Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri, partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.
3. Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya.

Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba beberapa metoda dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat pengakuan, dukungan dan menambah kepercayaan diri masyarakat.

2.2. Pembangunan Masyarakat

2.2.1. Tujuan Pembangunan Masyarakat

Konsep *Community Development* telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: " Sebagai suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, sosial dan budaya kelompok masyarakat, untuk mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa, dan memberi kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi secara penuh bagi kemajuan bangsa." (Luz. A. Einsiedel dalam Tampubolon,2001: 6).

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "*proses*" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan

berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

US International Cooperation Administration (dalam Tampubolon, 2001: 6) mendeskripsikan *Community Development* itu sebagai :

" Suatu proses aksi sosial dimana masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk kegiatan perencanaan, merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan-permasalahan mereka yang bersifat individu dan bersama, membuat rencana-rencana kelompok dan individu dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sumberdaya masyarakat, dan ketika dibutuhkan dilengkapi dengan sumberdaya berupa bantuan teknis dan material dari pemerintah maupun badan-badan non-pemerintah diluar kelompok masyarakat tersebut "

Definisi di atas lebih menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses "aksi sosial" dimana masyarakat mengorganiser diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masyarakat.

Melengkapi kedua definisi di atas, Arthur Dunham seorang pakar *Community Development* merumuskan definisi *Community Development* itu sebagai berikut: " Usaha-usaha yang terorganisasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan kemampuan untuk bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat mencoba untuk bekerja terutama melalui pengerahan dan pengorganisasian secara swadaya

dan usaha-usaha kerjasama terhadap individu-individu dalam masyarakat, tetapi biasanya dengan bantuan teknis dari pemerintah atau organisasi sukarela.” (Arthur Dunham dalam Tampubolon, 2001: 6).

Rumusan di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Arthur Dunham membedakan “*Community Development*” dengan “*Community Organization*”. *Community Development* adalah mengenai kehidupan perekonomian, jalan, bangunan dan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Di sisi lain, organisasi kesejahteraan masyarakat adalah mengenai pengaturan terhadap kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial dan sumberdaya perkotaan, negara dan bangsa hingga perdesaan. Jadi *community development* lebih berkonotasi dengan pembangunan masyarakat desa sedangkan *community organization* idenstik dengan pembangunan masyarakat kota.

Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 unsur-unsur *Community development* sebagai berikut.

1. Sebuah program rencana yang berfokus terhadap kebutuhan-kebutuhan total masyarakat perdesaan.
2. Bantuan teknis.
3. Pengintegrasian bermacam-macam spesialisasi untuk membantu masyarakat.
4. Suatu penekanan utama pada kemandirian dan partisipasi masyarakat.

2.2.2. Metode Kerja Pembangunan Masyarakat Desa

CD dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja "*doing for the community*", tetapi mengadopsi metode kerja "*doing with the community*". Metode kerja *doing for*, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - *real needs, felt needs* dan *expected need*. Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia - *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani* - yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Permasalahannya

2.3.1. Tujuan Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri". Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

United Nations (dalam Tamputolon, 2001: 7), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

(1) *Getting to know the local community* (Mengenal masyarakat setempat)

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

(2) *Gathering knowledge about the local community* (Mengumpulkan pengetahuan tentang masyarakat setempat)

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

(3) *Identifying the local leaders* (Mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat setempat).

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

(4) *Stimulating the community to realize that it has problems* (Mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa mereka memiliki permasalahan).

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

- (5) *Helping people to discuss their problem* (Membantu masyarakat untuk mendiskusikan masalah mereka).

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

- (6) *Helping people to identify their most pressing problems* (Membantu masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang paling mendesak).

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

- (7) *Fostering self-confidence* (Membantu mengembangkan rasa percaya diri)

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

- (8) *Deciding on a program action* (Menentukan program yang akan dilakukan)

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

- (9) *Recognition of strengths and resources* (Mengenali kekuatan-kekuatan dan sumberdaya yang dimiliki).

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

(10) *Helping people to continue to work on solving their problems* (Membantu masyarakat untuk bekerja secara berkesinambungan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan mereka).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

(11) *Increasing people's ability for self-help* (Menambah kemampuan masyarakat untuk mandiri).

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

2.3.2. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang, bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat desa tidak akan merangsang partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan.

Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya - *self help* - masyarakat untuk membangun diri sendiri.

Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

2.4 Tinjauan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)

2.4.1 Pendekatan, Prinsip dan Pengelolaan

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana desa P2D, partisipasi masyarakat desa setempat sangat diutamakan yaitu dalam pengambilan keputusan yang menyangkut proses penentuan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pembangunan fisik, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi. Untuk menjamin kepentingan masyarakat maka aspirasi masyarakat harus tercermin dalam produk dari musyawarah dan mufakat.

P2D merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM) melalui :

1. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada penduduk miskin.
2. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan serta pemeliharannya.
3. Partisipasi, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan serta pemeliharannya.
4. Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan serta pemeliharannya.
5. Keterpaduan pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan lain.

Sedangkan Prinsip pengelolaan Pembangunan Prasarana Perdesaan (P2D) yaitu :

1. Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat (*acceptable*).
2. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (*transparent*).
3. Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*).
4. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal (*sustainable*).

Sementara itu pola pengelolaan program P2D pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, namun apabila dalam tahap pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri maka dapat dibantu oleh pihak ketiga melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

2.4.2 Pengelolaan Prasarana Pasca Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).

Hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor terlibat, selain itu juga tidak ada dana swadaya masyarakat untuk memelihara dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Selain itu kelestarian prasarana yang dibangun kurang terjamin karena tidak adanya pemeliharaan akibat kurang tegasnya

pendelegasian mengenai penanggungjawab dalam pemanfaat dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.

Bertitik tolak dari pemabngunan berbasis pemberdayaan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dengan penekanan bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, kebutuhan, jenis, jmlah dan lokasi prasarana. Pada tahap pelaksanaan masyarakat harus diikutsertakan baik dengan KSO maupun pelaksanaan langsung. Diharapkan dengan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan akan timbul rasa memiliki sehingga muncul keinginan untuk memelihara prasarana.

Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana meliputi kegiatan rutin maupun berkala, agar prasarana yang telah dibangun dapat tetap berfungsi. Bertitik tolak dari prinsip DOUM maka kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana merupakan tanggung jawab masyarakat, setelah diberikan pembinaan teknis. Dalam arti mereka yang menentukan keberlanjutan pemanfaatan prasarana tersebut.

Partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan ini meliputi kegiatan-kegiatan :

1. Identifikasi Jenis Prasarana
2. Identifikasi dan penilaian kelompok/organisasi
3. Cara pengelolaan kegiatan
4. Pengorganisasian

1. Identifikasi Jenis Prasarana

Berdasarkan daftar prasarana yang dikerjakan pada tahap pelaksanaan maka perlu dilakukan identifikasi terhadap jenis prasarana yang dibangun. Kegiatan ini dilakukan di kecamatan.

Proses yang dilakukan dalam identifikasi adalah FK dan Pokja Kecamatan menjelaskan mengenai tujuan dari dilakukannya identifikasi terhadap jenis prasarana; Melakukan identifikasi terhadap besarnya kelompok penerima manfaat dari masing-masing prasarana, besarnya dana, sumber dana dan lain-lain; Masyarakat mengusulkan organisasi pemanfaatan dan pemeliharaan berdasarkan tipe prasarana.

2. Penilaian Kelompok/Organisasi

Langkah yang kedua dalam pembentukan kelompok/organisasi adalah melakukan penilaian terhadap calon organisasi yang ada di masyarakat, penilaian disini untuk melihat sejauh mana kapasitas kelompok/organisasi yang akan menjadi kelompok pemanfaat dan pemelihara.

Proses yang dilakukan dalam penilaian ini adalah FK dan Pokja Kecamatan memfasilitasi pertemuan di kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil KDS, aparat kecamatan dan organisasi pemanfaat dan pemelihara; Masyarakat melakukan penilaian terhadap kapasitas masing-masing organisasi dengan dipandu oleh FK dan Pokja Kecamatan. Dengan demikian masing-masing organisasi pemanfaat dan pemelihara dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya.

3. Cara Pengelolaan Kegiatan

Setelah kegiatan penilaian terhadap kapasitas kelompok/organisasi maka dilakukan diskusi untuk menentukan cara pengelolaan kelompok/organisasi pemanfaat dan pemelihara yang akan sangat mempengaruhi bentuk kelompok/organisasi tersebut. Dengan demikian masyarakat sebagai pengelola, dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bentuk pengelolaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana.

Adapun proses yang dilakukan adalah FK dan Pokja memfasilitasi diskusi untuk menentukan cara pengelolaan kegiatan pemanfaat dan pemelihara. Diskusi sebaiknya

dilakukan terpisah berdasarkan tipe prasarana. FK dan Pokja Kecamatan dapat menampung cara-cara pengelolaan yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai bahan masukan; FK dan Pokja melakukan pelatihan terhadap organisasi pemanfaat dan pemelihara yang meliputi aspek pengorganisasian, penyusunan rencana kerja dan aspek pendanaan.

4. Pengorganisasian

Setelah terbentuk kelompok/organisasi pemanfaatan dan pemeliharaan maka perlu disusun tata tertib kelompok/organisasi yang akan mengatur tugas dan tanggungjawab anggota kelompok/organisasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang telah terbentuk dalam kelompok/organisasi pemanfaat dan pemelihara prasarana, menentukan setiap kegiatan penyusunan tata tertib kelompok/organisasi.

Adapun prosesnya adalah FK dan Pokja Kecamatan menjelaskan kembali peran tanggungjawab dari masing-masing. Dengan demikian masing-masing organisasi/kelompok dapat menyusun sendiri tata tertib organisasinya.

2.5 Rangkuman Kajian Teori

Pelibatan seseorang dalam berpartisipasi harus dilakukan pada proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan operasinya. Untuk itu pengelolaan atau pemeliharaan barang milik bersama atau fasilitas umum seharusnya dikelola secara baik. Dengan demikian individu yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari barang atau fasilitas umum tersebut harus ikut terlibat dalam pengelolaannya, partisipasi tidak mungkin terlaksana jika para individu dalam suatu kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam mengatasi berbagai masalah pengelolaan atau pemeliharaan prasarana tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengembangannya.

Kajian terhadap teori keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, meliputi :

TABEL.II.2
RANGKUMAN TEORI

No.	Pendapat	Pernyataan
Pengertian Partisipasi		
1.	PBB (dalam Slamet. 1994)	Sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) didalam proses pembentukan keputusan (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela; dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek.
2.	Godschalk (1996)	Merupakan pengambilan keputusan secara bersama antara masyarakat dan perencana
3.	Mikkelsen (2003,66)	Secara Asumsi Teoritis sebab-akibat, pada mulanya partisipasi masyarakat merupakan alat positif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat dengan tujuan melaksanakan pembangunan tertentu, tapi untuk selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri memiliki untuk memaksa pemerintahnya.
Bentuk Partisipasi		
4.	Slamet (1994)	Partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauhmana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan, didalam kegiatan-kegiatan fisik. pengukurannya adalah sejauhmana masyarakat telah memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berwujud uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang.
5.	Duseldorp dalam Slamet (1994:10)	tipe partisipasi yaitu : 1. Penggolongan berdasarkan pada derajat kesukarelaan. 2. Pengeolongan berdasarkan pada cara keterlibatan.

No.	Pendapat	Pernyataan
		3. Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan. 4. Penggolongan berdasarkan pada tingkatan organisasi. 5. Penggolongan berdasarkan pada Intensitas dan Frekuensi Kegiatan. 6. Penggolongan berdasarkan pada lingkup kegiatan. 7. Penggolongan berdasarkan pada efektivitas. 8. Penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat 9. Penggolongan berdasarkan gaya partisipasi
Tingkat Partisipasi Masyarakat		
6.	Arstein (dalam Panudju, 1999,72)	Tingkatan Partisipasi Masyarakat : 1. Manipulasi 2. Terapi 3. Pemberian informasi 4. Konsultasi 5. Perujukan 6. Kemitraan 7. Pelimpahan kekuasaan 8. Masyarakat yang mengontrol
7.	Chapin (dalam Slamet, 1994)	skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat partisipasi sosial yaitu : f. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial g. Kehadiran dalam pertemuan h. Membayar iuran/sumbangan i. Keanggotaan di dalam kepengurusan j. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.
8.	Goldhamer (dalam Slamet, 1994)	untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel yaitu : a. Jumlah asosiasi yang dimasuki b. Frekuensi kehadiran c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan d. Lamanya menjadi anggota.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat		
9.	Slamet (1994: 97)	kita dapat memilih variabel-variabel individu yang kita duga mempunyai hubungan erat dengan setiap tahapan partisipasi. Sehingga analisis ini lebih mempunyai makna dan bermanfaat a. Jenis Kelamin. b. Usia c. Tingkat Pengetahuan d. Tingkat Pendapatan e. Mata Pencaharian

No.	Pendapat	Pernyataan
10.	Sunarti (dalam Jurnal Tata Loka, 2003: 79),	Faktor-faktor Eksternal ini dapat dikatakan petaruh (<i>Stakeholder</i>), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.
11.	Tim Koordinasi P2D Pusat	pada tingkat Desa, petaruh yang terlibat dalam kegiatan P2D mulai pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan pemeliharaan adalah 4. Kepala Desa 5. Konsultan 6. Tokoh Masyarakat
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
12.	US International Cooperation Administration (dalam Tampubolon, 2001)	Konsep Pembangunan Masyarakat merupakan suatu proses aksi sosial dimana masyarakat mengorganiser diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan.
13.	Arthur Dunham (dalam Tampubolon, 2001)	Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi dengan bantuan teknis pemerintah maupun organisasi sukarela.
14.	Arthur Dunham (dalam Tampubolon, 2001)	4 unsur-unsur <i>Community development</i> sebagai berikut. 1. Sebuah program rencana yang berfokus terhadap kebutuhan-kebutuhan total masyarakat perdesaan. 2. Bantuan teknis. 3. Pengintegrasian bermacam-macam spesialisasi untuk membantu masyarakat. 4. Suatu penekanan utama pada kemandirian dan partisipasi masyarakat.
15.	United Nations (dalam Tampubolon, 2001)	mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Mengenal masyarakat setempat 2. Mengumpulkan pengetahuan tentang masyarakat setempat. 3. Mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat setempat. 4. Mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa mereka memiliki permasalahan. 5. Membantu masyarakat untuk mendiskusikan masalah mereka. 6. Membantu masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang paling mendesak. 7. Membantu mengembangkan rasa percaya diri. 8. Menentukan program yang akan dilakukan.

No.	Pendapat	Pernyataan
		9. Mengenali kekuatan-kekuatan dan sumberdaya yang dimiliki. 10. Membantu masyarakat untuk bekerja secara berkesinambungan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan mereka. 11. Menambah kemampuan masyarakat untuk mandiri

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMELIHARAAN PRASARANA P2D DI KECAMATAN BANTAN

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Bantan

3.1.1 Kondisi Fisik Wilayah

Kecamatan Bantan secara administrasi termasuk wilayah di Kabupaten Bengkalis yang terletak di Pulau Bengkalis, memiliki luas wilayah 424,40 Km² dan terdiri dari 9 Desa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis

Topografi wilayah Kecamatan Bantan adalah relatif datar dan ketinggian \pm 2 M diatas permukaan laut dengan suhu maximum 26 – 30 °C. Kondisi topografi ini ditambah kondisi tanah gambut dan rawa-rawa di beberapa tempat merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan pembangunan prasarana.

Penggunaan tanah di Kecamatan Bantan sebagian besar digunakan untuk pertanian dan perkebunan yaitu berupa lahan : persawahan 3.150 Ha, yang telah dimanfaatkan baru 59,7 % dan Perkebunan : 23.077 Ha yaitu Kelapa 14.397 Ha, Karet 8.210 Ha, Kopi 370 Ha, Coklat 17 Ha, Nenas 49 Ha dan Pisang 34 Ha.

Dengan kondisi alam yang sedemikian, Kecamatan Bantan yang sekitar 70 % Sarana transportasinya menggunakan jalan darat untuk menghubungkan antar desa di wilayah Kecamatan Bantan masih sangat sulit, dikarenakan pembangunan prasarana jalan

belum sampai ke desa-desa bagian timur wilayah Kecamatan Bantan seperti dari desa Kembang Luar ke desa Teluk Lancar jalannya masih berupa jalan tanah sepanjang 5 Km, begitu juga jalan lingkungan di desa Teluk Lancar hampir semuanya masih berupa jalan tanah.

Karena kondisi tanah gambut dan rawa-rawa, jalan-jalan yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Bantan, berupa jalan beton yang disirami aspal dan jembatan kayu. Kondisi jalan beton yang ada tidak sebagus seperti jalan tol di pulau Jawa, jalan beton di Kecamatan Bantan bergelombang serta banyak retak-retak karena kualitas jalan betonnya lebih pantas disebut jalan semenisasi.

Prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bantan, hampir semuanya memiliki SLTP kecuali di Desa Teluk Lancar yang hanya baru memiliki prasarana pendidikan hanya sampai setingkat SD saja. Sedangkan prasarana pendidikan setingkat SLTA dari sembilan desa, hanya desa Jangkang, desa Muntai, desa Kembang Luar dan desa Teluk Lancar yang tidak memiliki gedung SLTA.

3.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Jumlah penduduk Kecamatan Bantan sebesar 35.656 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 6.698 jiwa dan terdiri dari 19.132 jiwa laki-laki (53,66 %) dan 16.524 jiwa perempuan (46,34 %). Dengan kepadatan penduduk mencapai 84 Jiwa/Km². Penduduk Kecamatan Bantan yang terpadat berdasarkan data tahun 2003 adalah Desa Teluk Pambang 148 Jiwa/Km² dan yang terjarang Desa Kembang Luar 34 Jiwa/Km².

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bantan sebagian besar adalah Petani, Nelayan, Buruh, baik buruh bangunan maupun buruh perkebunan, dan lain-lain. Nelayan banyak terdapat pada daerah-daerah pesisir Selat Malaka. Sedangkan petani menyebar hampir pada semua wilayah.

Penduduk Kecamatan Bantan terdiri dari bermacam-macam suku antara lain : Suku Jawa, Suku Melayu, Etnis Cina, Suku Minang, Suku Batak, Suku Bugis dan Suku Banjar. Disamping itu di Kecamatan Bantan juga terdapat Suku Asli yaitu Suku Sakai/Hutan sebanyak 1.060 jiwa atau 212 Kepala Keluarga.

Suku Jawa di Kecamatan Bantan menempati populasi yang paling besar atau sekitar 80 % dari jumlah penduduk Kecamatan Bantan, sedangkan suku melayu sekitar 15 %, selebihnya sekitar 5 % berasal dari suku lainnya. Suku Jawa yang ada di Kecamatan Bantan umumnya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Jimur, mereka pada mulanya adalah Tenaga Kerja Indonesia yang hendak atau dipulangkan dari bekerja di Malaysia sebagai buruh perkebunan, pertanian dan bangunan.

Pola kehidupan masyarakat Kecamatan Bantan tampak sudah mengalami pembauran antara masyarakat Suku Melayu dengan para pendatang. Seperti pada acara perkawinan, masyarakat Kecamatan Bantan yang umumnya suku Jawa biasanya dalam acara perkawinan mereka menggunakan adat istiadat Melayu tetapi dengan memakai busana penganten adat Jawa. Disamping itupula di Kecamatan Bantan dan umumnya di Kabupaten Bengkalis, setiap hari Jum'at diwajibkan memakai baju melayu bagi anak sekolah dan PNS.

Berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Bantan, sebagian besar masyarakatnya tamatan SD sekitar 43,41 %, tamat SLTP 22,30 %, tamat SLTA 13,91 % dan Akademi atau Perguruan Tinggi sekitar 1,97 %. Sedangkan yang tidak tamat SD sekitar 18,41 %.

Sebelum Otonomi Daerah, sebagian besar masyarakat Bantan hanya sanggup menyekolahkan anaknya sampai tingkat SD, kadang kala ada yang tidak tamat SD, hal ini disebabkan karena kecilnya tingkat pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang

hanya berprofesi sebagai nelayan saja. Tapi sekarang dengan tidak ada lagi biaya sekolah (SPP) dari tingkat SD sampai tingkat SLTA di Kabupaten Bengkalis yang sudah berjalan sekitar empat tahun, orang tua tidak lagi memikirkan biaya sekolah anak mereka, sekarang orang tua sibuk terus mendorong anak mereka untuk terus sekolah.

Masyarakat Kecamatan Bantan pada umumnya beragama Islam atau 29.647 jiwa, Kristen 450 jiwa, Kong Hucu 208 jiwa dan Budha 3.577 jiwa. Sehingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat Bantan sangat berpengaruh pada kegiatan keagamaan dan kemasyarakatannya. Untuk itulah pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bantan pada hari Jum'at merupakan hari libur bagi masyarakatnya untuk bekerja seperti melaut bagi nelayan, dan berkebun bagi petani. Sehingga apabila ada kegiatan gotong royong di dusun mereka akan dilaksanakan pada hari Jum'at pagi atau sorenya. Disamping Jum'at merupakan hari libur untuk bekerja, juga hari lainnya apabila di dusun mereka ada kegiatan pesta perkawinan atau ada kematian. Pada hari itu semua masyarakat di dusun tersebut akan bergotong royong membantu warganya yang ada hajatan perkawinan atau ada yang meninggal. Dan apabila ada yang meninggal, keluarganya ada yang melaut untuk mencari ikan, maka warga dusun akan menjemputnya dan memberitahu yang bersangkutan. Disamping tiga hari tersebut diatas, masyarakat juga akan bergotong royong apabila ada kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam.

3.1.3 Potensi dan Masalah

Kecamatan Bantan merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki akses langsung menuju pusat Kota Bengkalis dari arah Utara melalui desa Bantan Tua dan dari Barat melalui desa Teluk Pambang. Disamping itu Kecamatan Bantan merupakan pintu akses keluar pemasaran produk perkebunan dan kerajinan ke Kabupaten Indragiri Hilir dan Malaysia melalui jalur pelayaran di Desa Selat Baru dan Desa Teluk Pambang.

Dengan rencana Pemda Kabupaten Bengkalis akan membangun pelabuhan penumpang bertaraf Internasional beserta fasilitas olah raga golf di desa Bantan Tengah, menjadikan Kecamatan Bantan sangat penting.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Bantan adalah permasalahan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Permasalahan ini selain disebabkan karena terbatasnya kemampuan Pemerintah juga disebabkan karena kondisi topografi wilayah yang berawa dan gambut. Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana baru di satu sisi memang sangat dibutuhkan tetapi di sisi lain telah berdampak pada berkurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Mengenai sumberdaya manusia juga menjadi permasalahan utama di Kecamatan Bantan karena secara umum kondisi masyarakatnya merupakan yang miskin diantara Kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Kebanyakan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan nelayan serta memiliki pendidikan serta penghasilan yang rendah merupakan kendala pembangunan khususnya pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

3.2 Gambaran Umum Kawasan Pengembangan Prasarana Perdesaan di Kecamatan Bantan

Kecamatan Bantan yang terdiri dari sembilan desa, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 telah selesai pelaksanaan program P2D didaerah tersebut. Pada tiap desa, tidak semua dusun mendapatkan bantuan program P2D ini, karena hampir semua desa di Kecamatan Bantan hanya terdapat pada satu lokasi saja.

3.2.1 Desa Jangkang

Desa Jangkang adalah salah satu desa di Kecamatan Bantan yang menerima bantuan program P2D, yang terletak paling utara di Kecamatan Bantan, memiliki luas 31 Km² dengan jumlah penduduk 3.080 jiwa, 450 KK, dengan jumlah laki-laki 1.480 dan perempuan 1.600 jiwa. Sebagian besar penduduk desa Jangkang bermata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan. Dan tingkat pendidikan masyarakatnya adalah Tamat SD.

Lokasi P2D di desa Jangkang adalah terletak di Dusun I antara jalan Tambak Rejo dan Parit Tiung, prasarana yang dibangun berupa semenisasi jalan. Dilokasi ini terdapat dua paket pekerjaan dengan dua pola pekerjaan yaitu pola Kerja Sama Operasional (KSO) antara Kontraktor dan Masyarakat dan Pola Pelaksanaan Langsung yang dikerjakan langsung oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat yaitu Karang Taruna.

Masyarakat di sekitar lokasi umumnya bermata pencaharian sebagai petani kebun karet dan kelapa, disamping ada juga yang berdagang dengan membuka kedai yang berjualan kebutuhan sehari-hari dan berwirausaha menjual minyak solar untuk kebutuhan para nelayan. Untuk itu lahan disekitar lokasi terdapat kebun karet dan kelapa milik masyarakat setempat.

Kondisi jalan sebelum dilaksanakan program P2D adalah berupa jalan tanah, dan jalan ini adalah satu-satunya jalan yang dipergunakan masyarakat untuk mengangkut hasil kelapa atau karetnya dan juga merupakan jalan menuju ke sekolah bagi anak-anak sekitar lokasi, karena kondisi tanahnya adalah bergambut sehingga apabila hari hujan, kondisi jalan menjadi becek.



GAMBAR 3.1
KONDISI SEMENISASI JALAN DI
DESA JANGKANG TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

3.2.2 Desa Bantan Tua

Desa Bantan Tua adalah satu satunya desa di Kecamatan Bantan yang letaknya tidak dipesisir Selat Malaka dan merupakan pintu gerbang bagi Kecamatan Bantan karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Bengkalis. Desa Bantan Tua mempunyai luas 34 Km² dengan jumlah penduduk 3.006 jiwa, laki-laki 1.509 jiwa dan perempuan 1.497 jiwa serta 575 KK. Masyarakat desa Bantan Tua adalah Petani dan Nelayan serta Buruh Tani dan Buruh Bangunan yang bekerja di Kota Bengkalis.

Desa Bantan Tua mendapatkan bantuan program P2D pada Tahun 2003 yaitu berupa normalisasi anak sungai (Tali Air) di dusun Imam Bulkin yang pelaksanaannya dilakukan oleh Remaja Masjid dan LKMD, karena dilokasi ini terdapat 2 paket pekerjaan pada 1 lokasi, serta disekitar lokasi P2D adalah lahan pertanian dan perkebunan Karet masyarakat.

Sebelum adanya pekerjaan normalisasi anak sungai ini, sekitar lokasi ini selalu terjadi banjir bila hujan, akibatnya lahan perkebunan karet masyarakat tergenang dalam

beberapa hari, sehingga masyarakat tidak bisa bekerja dalam beberapa hari. Sekarang dengan adanya pekerjaan normalisasi anak sungai ini, masyarakat tidak lagi takut terjadi banjir bila hujan, walaupun terjadi banjir, sekitar 30 menit kemudian genangan air sudah tidak ada lagi.

Kondisi prasarana yang sudah di kerjakan, sampai saat survei kondisinya masih bagus, cuma sekitar bekas tanah galian anak sungai tadi dan kiri kanan anak sungai sudah banyak ditumbuhi rumput sehingga jalan yang dibangun dari tanah hasil galian anak sungai tadi sudah tidak kelihatan lagi bentuk jalannya. Jalan ini juga dipergunakan oleh masyarakat untuk pergi ke kebun mereka.



GAMBAR 3.2
KONDISI NORMALISASI SUNGAI DI DESA
BANTAN TUA TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

3.2.3 Desa Selat Baru

Desa Selat Baru disamping sebagai desa, juga sebagai Ibukota Kecamatan Bantan, dengan luas 63 Km² dan jumlah penduduk 6.711 jiwa, laki-laki 3.562 jiwa, perempuan 3.149 jiwa. Dan tingkat pendidikan masyarakatnya mayoritas tamat SD dan SLTP, atau

boleh dikatakan tingkat pendidikannya sedang. Dilihat dari mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan buruh tani, serta buruh bangunan.

Lokasi prasarana P2D di Desa Selat Baru adalah di Dusun Pantai Indah, yang lokasi dusunnya berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Dusun Pantai Indah adalah daerah pariwisata pantai di Kecamatan Bantan, pada hari minggu ramai dikunjungi wisatawan domestik dari Kota Bengkalis. Sehingga masyarakat disekitar lokasi ini disamping sebagai petani dan nelayan, juga ada yang berdagang makanan dan minuman.

Prasarana P2D di Desa Selat Baru ini dilaksanakan pada Tahun 2003, berupa badan jalan yaitu pembentukan badan jalan dengan menggali parit pada kiri kanan jalan dengan lebar badan jalan 4 meter dan 2 meter, karena di dusun Pantai Indah ini pekerjaan badan jalannya ada 2 tempat, tapi masih satu dusun. Badan jalan yang dibangun dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat setempat melalui jalan tersebut menuju ke kebun mereka.

Sebelum dilaksanakannya program P2D di dusun Pantai Indah ini, prasarana jalan yang ada masih berupa jalan setapak atau jalan yang belum kelihatan bentuk jalannya karena tidak ada parit pada kiri kanan jalan. Sehingga tidak diketahui seberapa lebarnya badan jalan yang ada.

Kondisi prasarana yang sudah dikerjakan oleh P2D, sampai saat ini kurang terawat karena pada badan jalan sudah banyak ditumbuhi rumput, sehingga badan jalan sampai tidak kelihatan, tapi pada bagian lain kondisi badan jalan yang dikerjakan melalui program P2D, kondisinya masih bagus.



GAMBAR 3.3
KONDISI BADAN JALAN DI DESA
SELAT BARU TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

3.2.4 Desa Bantan Tengah

Desa Bantan Tengah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bantan selain Desa Bantan Air, yang lahan persawahannya masih dikerjakan oleh masyarakat, sehingga desa ini menjadi desa penghasil beras terbesar selain desa Bantan Air.

Desa Bantan Tengah mempunyai luas wilayah 51 Km², jumlah penduduk 4.889 jiwa, laki-laki 2.502 jiwa dan perempuan 2.387 jiwa, dengan tingkat kepadatan 96 Km². Mayoritas penduduk Desa Bantan Tengah bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani dan tingkat pendidikannya rendah yaitu tamat SD.

Pada Tahun 2003, Desa Bantan Tengah mendapat bantuan program P2D berupa pekerjaan normalisasi sungai (tali air) di Dusun Rahayu yang dikerjakan oleh LKMD bersama masyarakat setempat dengan pola pelaksanaan langsung.

Sama seperti di Desa Bantan Tua, sebelum adanya pekerjaan normalisasi sungai ini, di desa Bantan Tengah ini sering terjadi genangan air bila hujan, ditambah lagi kondisi lahan disekitar lokasi adalah daerah rawa-rawa.

Kondisi prasarana yang telah dikerjakan melalui program P2D ini, sampai saat ini kondisinya masih bagus dan berfungsi sangat baik, karena tidak lagi terjadi genangan air bila hujan.

3.2.5 Desa Bantan Air

Desa Bantan Air mempunyai Luas wilayah 43,4 Km², dengan jumlah penduduk 4.922 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.588 jiwa dan perempuan 2.334 jiwa, dengan kepadatan 113 Km², ini merupakan kepadatan terbesar kedua setelah Desa Teluk Pambang. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya adalah tamat SD.

Desa Bantan Air menerima bantuan program P2D berupa semenisasi jalan pada Tahun 2003, di dusun Sidomulyo. Pada lokasi ini terdapat 3 paket pekerjaan semenisasi jalan yang dikerjakan oleh 3 pelaksana, yaitu pertama, paket yang dikerjakan oleh Kontraktor dengan sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis, kedua, paket yang dikerjakan oleh masyarakat melalui Karang Taruna dengan sumber dana program P2D, dan ketiga, paket yang dikerjakan oleh kontraktor bersama masyarakat dengan pola Kerja Sama Operasional (KSO) dan sumber dana juga dari program P2D.

Sama halnya dengan Desa Bantan Tengah, dusun Sidomulyo Desa Bantan Air ini adalah dusun penghasil beras di Kecamatan Bantan, sehingga mayoritas penduduknya sebagai petani sawah dan juga perkebunan. Disamping itu karena dusun ini letaknya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, maka sebagian besar juga penduduk di Dusun Sidomulyo ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Bengkalis.

Dari ketiga paket yang dikerjakan oleh masing-masing pelaksana, terlihat bahwa prasarana yang dikerjakan oleh masyarakat melalui LKMD ini kualitasnya lebih bagus, sehingga belum ada kelihatan kerusakan yang berarti. Beda halnya dengan prasarana yang

dibangun oleh Dinas PU Kabupaten maupun KSO, kondisi prasarana yang dibangun sudah kelihatan semennya pecah-pecah.

Sebelum adanya semenisasi jalan ini, baik yang dikerjakan oleh masyarakat maupun yang dikerjakan oleh kontraktor, jalannya masih berupa jalan tanah, bila hujan menjadi becek, ditambah lagi karena kondisi tanahnya tanah rawa.



GAMBAR 3.4
KONDISI SEMENISASI JALAN DI DESA
BANTAN AIR TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

3.2.6 Desa Muntai

Desa Muntai yang mempunyai luas 34 Km², mempunyai jumlah penduduk 2.413 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.600 jiwa, perempuan 813 jiwa, dan 460 KK, dengan kepadatan 78 Km². Tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah karena sebagian besar tidak tamat SD, dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Desa Muntai, pada tahun 2001 menerima bantuan program P2D yang pelaksanaannya dikerjakan langsung oleh masyarakat melalui LKMD yaitu berupa

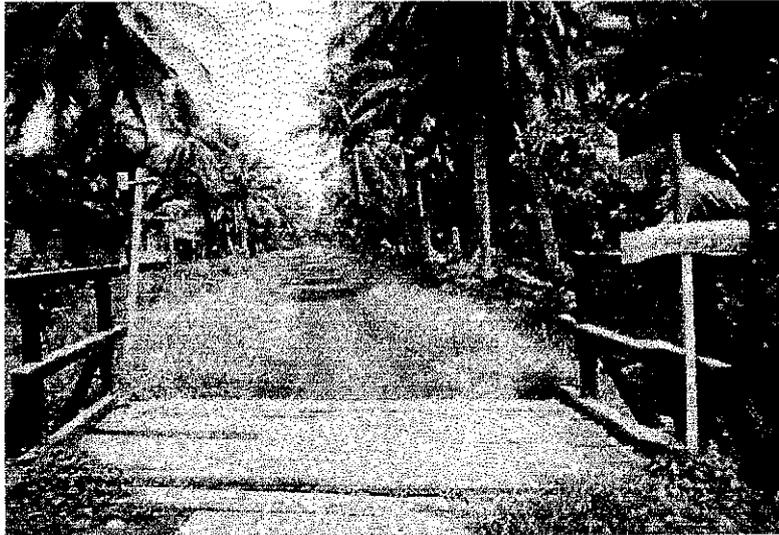
pembuatan badan jalan. Adapun letak lokasi P2D di Desa Muntai adalah di RW 04 Dusun Simpang Tugu. Badan jalan yang dikerjakan di desa Muntai ini adalah peningkatan jalan yang sudah ada, dengan membuatkan parit pada kiri kanan jalan, sehingga terlihat bentuk jalannya.

Mengenai kondisi prasarana sampai saat ini, kondisinya masih bagus dan digunakan oleh masyarakat, karena jalan ini satu-satunya jalan yang ada di lingkungan mereka untuk menuju keluar dari tempat mereka.

3.2.7 Desa Teluk Pambang

Desa Teluk Pambang merupakan desa yang terluas di Kecamatan Bantan yaitu 114 Km², dan juga mempunyai tingkat kepadatan yang paling tinggi 148 jiwa/Km². Jumlah penduduk adalah 5.039 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.496 jiwa dan perempuan 2.543 jiwa dan 1.237 KK. Tingkat pendidikan masyarakat rendah yaitu sebagian besar tamat SD, dan bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan nelayan.

Desa Teluk Pambang menerima bantuan program P2D pada tahun 2001 berupa pembuatan badan jalan, sama halnya dengan desa lain, yang jenis prasarannya berupa pembuatan badan jalan, yang lokasinya berada pada RW IV Dusun Parit Rambai. Badan jalan yang dibangun merupakan jalan setapak yang dibentuk badan jalannya. Kondisi jalan ini cukup bagus karena belum ada kerusakan yang berarti, dan juga tidak ada semak atau rumput yang menutupi badan jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan tersebut.



GAMBAR 3.5
KONDISI BADAN JALAN DI DESA
TELUK PAMBANG TAHUN 2001

Sumber : Data Primer, 2004

3.2.8 Desa Kembang Luar

Desa Kembang Luar, merupakan desa yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah di Kecamatan Bantan yaitu 34 jiwa/Km², dengan luas wilayah 30 Km², dan jumlah penduduk 3.910 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.560 jiwa dan perempuan 1.350 jiwa. Tingkat pendidikan penduduknya masih rendah, dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani.

Pada tahun 2003, Desa Kembang Luar mendapatkan bantuan program P2D berupa pembuatan badan jalan di Dusun Sungai Limau. Badan jalan ini merupakan jalan baru yang dibuka melewati perkebunan karet masyarakat, sehingga jalan ini umumnya dipergunakan oleh masyarakat yang ingin pergi ke kebun mereka, baik itu untuk bekerja atau mencari kayu bakau untuk bahan cerucuk pondasi bangunan atau tiang penyangga, di daerah rawa-rawa dekat sungai limau.

Kondisi jalan ini baru di bangun sepanjang 300 meter dengan lebar 4 meter. Karena jalan ini dipergunakan oleh masyarakat tertentu saja yang lokasi kebunnya di sekitar lokasi jalan tersebut, akibatnya jalan ini kurang terawat, hal ini terlihat dengan banyaknya semak belukar yang tumbuh pada jalan tersebut, sampai-sampai badan jalan tidak terlihat lagi. Pembuatan badan jalan ini dirasakan oleh masyarakat cukup bermanfaat, terutama oleh masyarakat yang disekitar lokasi jalan tersebut.



GAMBAR 3.6
KONDISI BADAN JALAN DI DESA
KEMBUNG LUAR TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

3.2.9 Desa Teluk Lancar

Desa Teluk Lancar adalah Desa yang letaknya paling ujung sebelah Selatan dari Kecamatan Bantan dan sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis, mempunyai luas 24 Km², dan jumlah penduduk 1.686 jiwa yang terdiri dari laki-laki 835 jiwa, perempuan 851 jiwa, serta tingkat kepadatan 70 jiwa/Km². Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar adalah rendah, dan bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Karena letaknya yang jauh, serta kondisi jalannya masih berupa jalan tanah yang bergelombang, akibatnya prasarana yang ada di desa ini cukup minim bila dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Bantan.

Untuk itu ketika pada tahun 2003, desa ini mendapatkan bantuan program P2D berupa pembuatan badan jalan, di RW 03 Dusun Parit Tengah, masyarakat sangat antusias terhadap pembangunan, seperti menemukan air di padang pasir.

Sama halnya dengan desa lain, prasarana pembuatan badan jalan ini, diperuntukkan bagi masyarakat setempat untuk sebagai jalan tembus menuju ke perkebunan mereka, yang mana jalan sebelumnya adalah berupa jalan tanah yang belum ada parit pada kiri kanan jalan.

Kondisi prasarana yang ada saat ini cukup bagus, walaupun masih ada kerusakan akibat longsongnya tanah ke parit karena hujan, dan masih terdapat semak-semak sedikit pada kiri kanan badan jalan.



GAMBAR 3.7
KONDISI BADAN JALAN DI DESA
TELUK LANCAR TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

3.3 Pelaksanaan Program P2D di Kecamatan Bantan

3.3.1 Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, di wilayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang terdiri 9 (sembilan) desa, dalam program P2D ini terbagi atas beberapa wilayah Hamparan. Hamparan adalah wilayah (daerah) yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan yang pada umumnya sejenis. Dan hamparan ini terbagi lagi menjadi beberapa Kelompok Diskusi Sektor (KDS). Kelompok maksudnya kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan usaha atau pekerjaan, misalnya kelompok nelayan, kelompok pertanian, dan sebagainya. Diskusi adalah suatu proses pembahasan mengenai suatu masalah atau kebutuhan. Jadi KDS adalah wadah wakil-wakil kelompok masyarakat di wilayah hamparan, wakil-wakil kelompok inilah yang membahas dan menentukan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Setiap KDS di bimbing oleh seorang Fasilitator Desa (FD), FD tersebut dipilih dan diangkat dari warga desa setempat di wilayah hamparan. Dan di setiap KDS terdiri dari 10-20 anggota. Dan pada setiap KDS ada susunan pengurusnya mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Dari hasil KDS pada masing-masing desa, masyarakat yang diwakilkan oleh pengurus KDS membawa hasil KDS ke kecamatan untuk dibahas yang menjadi Daftar Panjang Kecamatan atau *Long List* merupakan suatu daftar usulan kegiatan desa yang telah dianalisa menggunakan metode pendekatan/kesamaan lokasi, manfaat dan Kelompok Pengguna se-kecamatan sehingga akan mendapat nilai skoring yang berbeda-beda pada setiap usulan kegiatan. Dan akan dipadukan dengan beberapa kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan dan Kabupaten. Yang kemudian akan dianalisa lagi untuk mendapat daftar usulan pendek (*Short List*).

Dari daftar usulan pendek ini lagi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan jenis prasarana yang akan dibangun, dan dibuatkan gambar dan Rencana Anggaran Biayanya (RAB). Apabila RAB-nya lebih besar 50 juta maka akan dilaksanakan melalui pola Kerja Sama Operasional antara Kontraktor dan masyarakat, dan apabila RAB-nya dibawah 50 juta akan dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

3.3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap lanjutan dari kegiatan perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat adalah tahap pelaksanaan program berupa peningkatan kemampuan kelembagaan dan pelaksanaan fisik, disamping itu juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam program P2D pola pelaksanaannya dilakukan melalui dua cara, yaitu Pelaksanaan Langsung (SP3) dan Kerja Sama Operasional (KSO). Dalam dua pola pelaksanaan tersebut masyarakat ikut terlibat dalam pembangunannya. Pada pola pelaksanaan KSO masyarakat ikut terlibat dalam penyediaan sebagian tenaga kerja, bahan/material lokal dan peralatan, kegiatan dari pekerjaan. Sedangkan dengan pola Pelaksanaan Langsung, masyarakat sendiri sebagai pelaksana pekerjaan.

Seperti sudah dipaparkan pada ruang lingkup, bahwa penelitian ini hanya melihat prasarana yang dikerjakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan langsung. Maka dalam pelaksanaannya masyarakat sendiri yang menentukan cara pengerjaannya, pengalokasian dana, pembagian upah, dan pengawasan pelaksanaannya.

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Fasilitator Kecamatan, Tenaga Teknik Lapangan dan Pokja Kecamatan sebagai Tim penilaian terhadap OMS/LKMD yang melaksanakan kegiatan, untuk mengetahui kesiapan

dari masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan konstruksi. Kemudian diterbitkan surat rekomendasi Camat tentang pelaksanaan Pekerjaan program P2D.

Sebelum pekerjaan di mulai, OMS diberi uang muka 30 % dari nilai kontraknya sebagai modal awal, apabila pekerjaan fisik sudah mencapai 30 % menurut penilaian Tenaga teknik Lapangan (TtL), maka OMS berhak untuk mencairkan dana sebesar 30 %, begitu juga apabila pekerjaan fisik sudah mencapai 60 %, OMS berhak menarik dana 30 % lagi dan apabila pekerjaan fisik sudah 100 % dan sudah terbentuk Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP), OMS bisa mengambil sisa kontraknya sebesar 10 % lagi.

Dalam pengerjaan pekerjaan normalisasi anak sungai di desa Bantan Tua dan Bantan Tengah, masyarakat menggunakan alat berat pengeruk berupa eskapator yang disewa. Penggunaan alat berat ini sudah berdasarkan musyawarah antara masyarakat setempat dengan Pelaksana pekerjaan yaitu Remaja Masjid dan LKMD yang anggotanya juga dari masyarakat sendiri, karena apabila pengerukkan anak sungai ini menggunakan tenaga manusia sangat sulit dan lama, serta hasilnya pun tidak sebagus apabila menggunakan alat pengeruk tersebut. Juga kebetulan di desa Bantan Tua disamping ada proyek P2D yang mengerjakan normalisasi anak sungai, di desa ini lagi ada kegiatan normalisasi sungai juga dengan dana APBD dilokasi yang berbeda. Sehingga alat beratnya bisa disewakan untuk mengerjakan normalisasi sungai di tempat lokasi P2D. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara pelaksanaan program yang dikerjakan oleh P2D dengan yang dikerjakan oleh Kabupaten. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan pada lokasi dan tempat yang sama, sehingga hal ini tentu akan merugikan masyarakat dan mubazir.

Egitu pula halnya dengan pelaksanaan pekerjaan semenisasi jalan seperti diketahui di Desa Bantan Air, yang pengerjaan semenisasinya sejalan dengan program

Kabupaten, pada ruas jalan yang sama dengan pelaksanaannya berbeda tapi masih tetap nyambung pekerjaan fisiknya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik ini, di Desa Bantan Tua, disamping mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan oleh P2D, masyarakat masih bisa mengerjakan pekerjaan fisik yang sama di lokasi yang berbeda, yaitu menggali parit baru dan tanah hasil galiannya dibuatkan jalan tembus dari dusun Rajimun ke Dusun Imam Bulkin. Dari sisa dana P2D, masyarakat Bantan Tua juga mempergunakannya untuk kegiatan 17 Agustus dan untuk mengirim peserta MTQ Tingkat Kecamatan Bantan, yang hasilnya Desa Bantan Tua menjadi Juara Umum.

3.3.3 Tahap Pemeliharaan

Sebelum masa pelaksanaan Pekerjaan Fisik berakhir, masyarakat yang di fasilitasi oleh Pokja Kecamatan dan bersama Kepala Desa, membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), berdasarkan aspirasi masyarakat, atau dapat dibentuk dari kelompok pelaksana pembangunan prasarana itu sendiri yang akan mudah dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana yang dibangun tersebut.

Berdasarkan hasil laporan Konsultan pelaksana program P2D di Kecamatan Bantan, bahwa hampir semua desa di Kecamatan Bantan sudah terbentuk KPPnya, tapi kenyataannya di lapangan dari hasil survei responden dan wawancara langsung dengan ketua LKMD atau Remaja Masjid sebagai OMS yang melaksanakan pembangunan prasarana P2D, diketahui bahwa hampir semua desa belum terbentuk KPP sebagaimana yang diharapkan. Kalaupun ada dibentuk KPP itupun untuk memenuhi persyaratan dalam pengambilan termin 10 %, sedangkan desa yang belum terbentuk KPPnya hanya ada namanya saja, tetapi di masyarakat belum pernah dibicarakan pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di desa mereka. Hal ini disebabkan karena kurangnya

peranan Kepala Desa yang difasilitasi Fasilitator Kecamatan untuk membentuk KPP di masyarakat, hal ini juga karena kurang pengetahuannya Kepala Desa tentang petunjuk Pelaksanaan program P2D.

Walau bagaimanapun juga, prasarana yang sudah dibangun di desa mereka, warga melalui ketua RW atau RT ikut bertanggungjawab terhadap semua prasarana yang ada di tempat mereka. Untuk itu setiap kegiatan gotong royong atau kerja bakti dalam rangka perawatan dan pemeliharaan prasarana yang ada selalu atas koordinasi ketua RW/RT setempat dimana prasarana P2D itu berada.

Sebagai contoh, di desa Bantan Tua, Ketua RT di dusun Rajimun bersama warganya membangun jembatan kayu pada jalan yang dibangun melalui dana sisa program P2D (gambar 3.8)



GAMBAR 3.8
KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA
P2D DI DESA BANTAN TUA TAHUN 2003

Sumber : Data Primer, 2004

Sumber dana yang digunakan untuk pemeliharaan prasarana yang ada, masyarakat terlebih dahulu mengadakan rapat untuk menentukan apa yang akan dikerjakan, apa saja yang akan dibeli, berapa besar dana yang dibutuhkan, setelah semua itu ditentukan baru di cari sumber dananya. Biasanya dana yang dipergunakan adalah dana dari swadaya

masyarakat serta dari sisa pelaksanaan program P2D yang sudah disisihkan untuk perawatan. Tapi tidak semua desa menyisihkan sebagian sisa dana pelaksanaan program P2D itu untuk pemeliharaan, mereka lebih suka dana itu digunakan untuk kegiatan lainnya atau dibagi habis kepada masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat tidak percaya sisa dana yang ada disimpan oleh pengurus OMS atau Kepala Desa, takut tidak jelas penggunaannya, untuk itu mereka minta sisa dana pelaksanaan program P2D lebih baik dibagi habis kepada masyarakat.

Di Dusun Sidomulyo Desa Bantan Air, ada suatu kebiasaan masyarakat dusun disana yaitu apabila musim panen padi setahun sekali maka petaninya wajib menyumbangkan 12 Kg atau 1 Kaleng padinya ke Masjid sebagai bentuk sumbangan warganya bagi pembangunan Masjid.

Dilihat dari pengalaman Desa Bantan Air diatas, menunjukkan bahwa masyarakat lebih ikhlas atau percaya kepada takmir masjid untuk mengurus dana yang disumbangkan oleh masyarakat kepada masjid, yang penggunaan dana tersebut setiap minggunya selalu dilaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid, dan dapat diketahui oleh semua masyarakat setempat di Kecamatan Bantan, yang pada umumnya beragama Islam.

Cara yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Bantan dalam membersihkan rumput atau semak belukar, yaitu dengan menyemperot rumput atau semak-semak tersebut dengan obat racun, yang disemprotkan menggunakan penyemperot hama. Setelah 3 hari kemudian, rumput atau semak tersebut menguning dan mati, barulah dibakar oleh masyarakat. Tetapi untuk memotong rumput yang tinggi seperti rumput di lapangan sepak bola, masyarakat memotongnya dengan mesin potong, dengan meminjamkannya di Kantor Kecamatan Bantan di bagian Kebersihan dan Taman, yang memiliki 3 mesin potong rumput.



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG - 2004

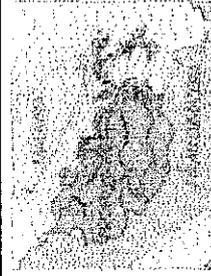
TESIS
PANTASIA MASTOMAN DAN PERENCANAAN PASARAN PAKA
PELAKSANAAN KAWASAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS

PETA
Lokasi P2D

LEGENDA :

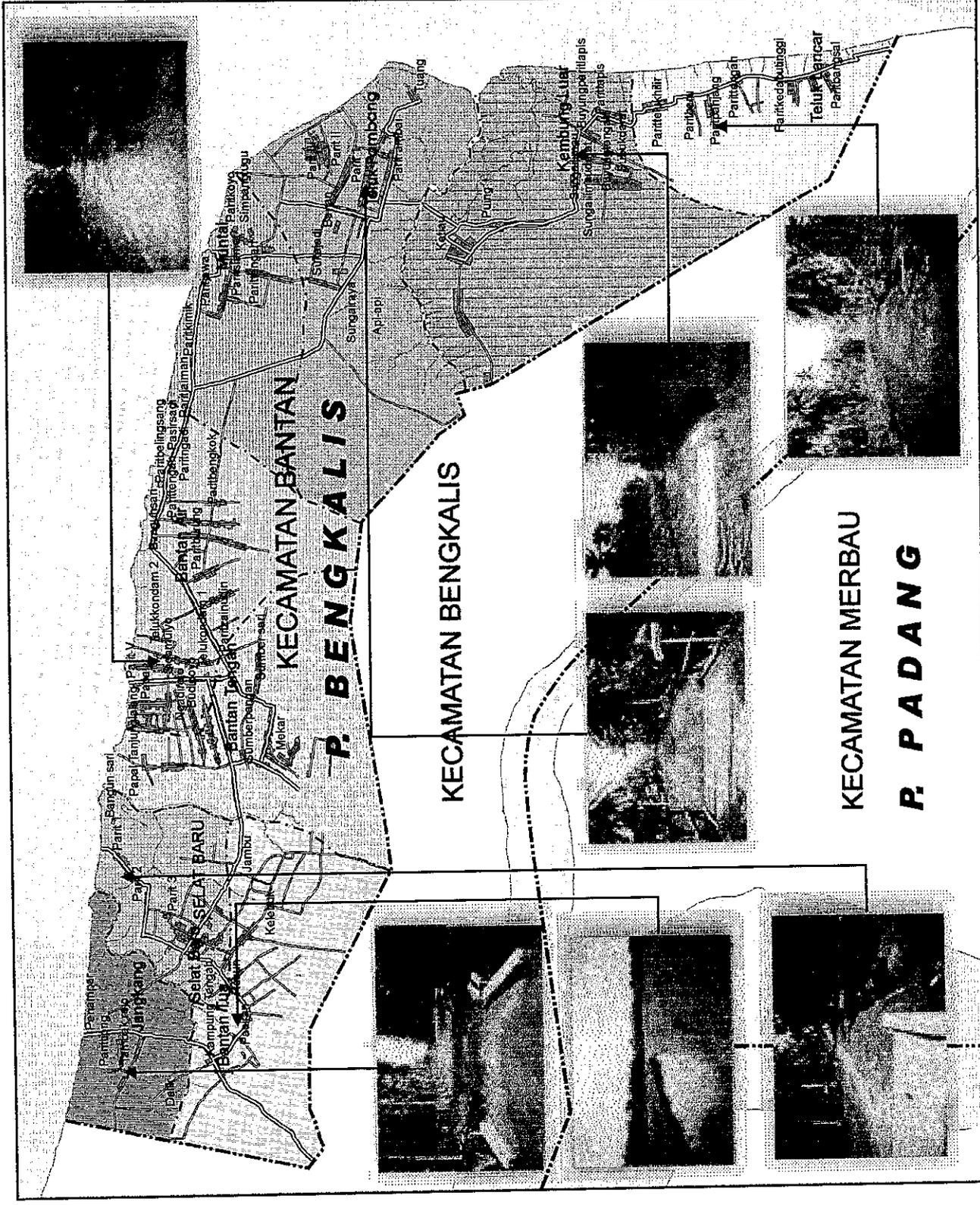
- Batas Kecamatan
- +— Batas Kelurahan/Desa
- +— Garis Pantal
- +— Jalan Lokal
- +— Jalan Lein
- +— Sungai
- +— Kantor Kecamatan
- +— Kantor Lurah

INSET



UTARA	SKALA
	1 : 350.000
NOMOR	
Halaman	GAMBAR
73	3.9

SUMBER : BENGKALIS
DAN BANGORJANAL





MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG - 2004

TEISIS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PROGRAM RENCANA
PELAKSANAAN DAN BUDAYA BANGUNAN
KABUPATEN BENGKALIS

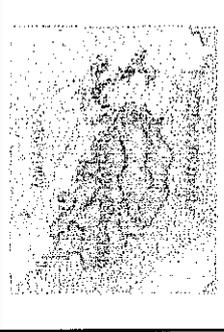
PELAKSANAAN DAN BUDAYA BANGUNAN
KABUPATEN BENGKALIS

Tela Guna Lahan

LEGENDA :

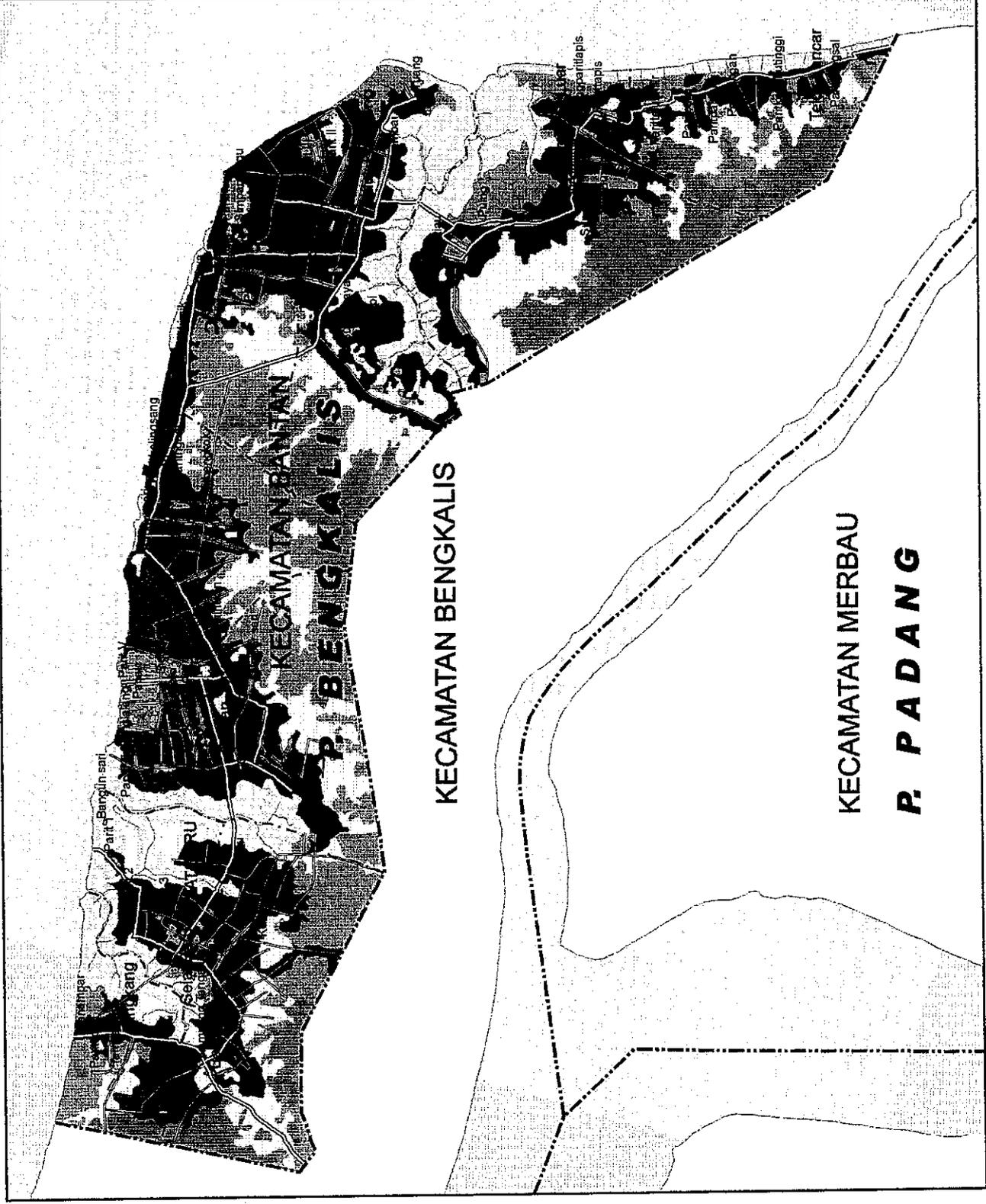
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Gatis Pentel
- Jalan Lokal
- Jalan Lain
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Kantor Lurah
- Daerah Terbangun
- Rawa
- Perkebunan
- Hutan
- Semak Belukar
- Tegalan/Ladang
- Sawah

INSET



UTARA	SKALA
	1 : 350.000
NOMOR	
Halaman	GAMBAR
74	3.10

SUMBER :
TATA PEMERINTAHAN BENGKALIS
DAN BERSERTAKAN



3.4 Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa karakteristik responden yang berhubungan dengan konsep partisipasi yaitu kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, suku, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Deskripsi responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel III.1

TABEL III.1
JUMLAH RESPONDEN MENURUT KELOMPOK UMUR

Desa	Kelompok Umur					Total
	20 s/d 29 Tahun	30 s/d 39 Tahun	40 s/d 49 Tahun	50 s/d 59 Tahun	60 Tahun Keatas	
Jangkang	7	4	3			14
Bantan Tua	10	5	2			17
Selat Baru	2	10	5	3		20
Bantan Tengah	3	14	3			20
Bantan Air	5	2	6	4	1	18
Muntai	5	7	5	3		20
Teluk Pambang	4	2	7	4		17
Kembung Luar	8	2	1	3		14
Teluk Lancar	11	5	3			19
Total Jumlah	55	51	35	17	1	159
%	34.6 %	32.1 %	22.0 %	10.7 %	0.6 %	100,0 %

Sumber : Data Primer, 2004

Dari Tabel III.1 dapat dilihat dari segi umur, bahwa sebagian besar responden atau 67 % berumur dibawah 40 Tahun, serta 33 % berumur diatas 40 Tahun, sehingga dianggap cukup dewasa dan mampu menyatakan pendapat serta mengambil keputusan.

Besarnya responden dibawah umur 40 Tahun ini, karena sebagian besar responden ini adalah dari Karang Taruna, Remaja Masjid dan LKMD, yang merupakan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang telah mengerjakan pelaksanaan proyek P2D di Desa mereka. Dan mereka juga dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan mulai dari para petani, nelayan, guru dan wiraswasta (lihat Tabel III.2).

TABEL III. 2
JUMLAH RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN

Desa	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Jangkang	13	1	14
Bantan Tua	11	6	17
Selat Baru	18	2	20
Bantan Tengah	14	6	20
Bantan Air	18		18
Muntai	20		20
Teluk Pambang	17		17
Kembung Luar	10	4	14
Teluk Lancar	19		19
Total Jumlah	140	19	159
%	88.1 %	11.9 %	100%

Sumber : Data Primer, 2004

Dari Tabel III.2 Terlihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebesar 88,1 % bila dibandingkan dengan perempuan hanya sebesar 11,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas laki-laki yang lebih sering melakukan kegiatan gotong-royong atau kerja bakti untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan lainnya yang sifatnya membutuhkan tenaga. Sedangkan para perempuan hanya menyiapkan makanan dan minuman, serta pekerjaan yang tidak berat-berat.

Disamping itu, karena pemeliharaan prasarana ini bukan pekerjaan yang didanai oleh Pemerintah, dan berbeda waktu pekerjaan pembangunan prasarana P2D yang ada anggaran dananya, sehingga banyak juga ibu-ibu ikut berpartisipasi untuk mendapatkan uang upah kerja.

Kemudian berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden (pada Tabel III3) dapat diketahui, bahwa secara keseluruhan mayoritas tertinggi mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan SD sebesar 49,1 %, kemudian SLTA sebesar 27 % dan SLTP sebesar 14,5

%, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir setengah responden berpendidikan menengah ke bawah. Hal ini juga menunjukkan tingkat pengetahuan, khususnya tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai usaha-usaha partisipasi dalam pembangunan.

TABEL III.3
JUMLAH RESPONDEN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Desa	Tingkat Pendidikan					Total
	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat AKD/PT	
Jangkang		6	2	6		14
Bantan Tua		1	3	11	2	17
Selat Baru		14	2	4		20
Bantan Tengah	4	3	2	9	2	20
Bantan Air		18				18
Muntai	5	12	3			20
Teluk Pambang		10	3	3	1	17
Kembung Luar		2	2	9	1	14
Teluk Lancar		12	6	1		19
Total Jumlah	9	78	23	43	6	159
%	5,7%	49,1%	14,5%	27,0%	3,8%	100%

Sumber : Data Primer, 2004

Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan minimnya prasarana pendidikan yang ada pada masing-masing desa. Tidak semua desa di Kecamatan Bantan mempunyai prasarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas seperti Desa Jangkang, Desa Muntai, Desa Kembung Luar dan Desa Teluk Lancar. Desa Teluk Lancar disamping tidak memiliki prasarana pendidikan setingkat SLTA, tapi juga tidak memiliki prasarana pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Dengan demikian masyarakat yang mau melanjutkan pendidikannya harus belajar ke luar desa. Untuk masyarakat desa Jangkang, yang letaknya tidak terlalu jauh ke desa tetangganya yaitu desa Bantan Tua, biasanya melanjutkan pendidikan ke desa tersebut dengan menggunakan sepeda. Kecuali masyarakat yang mempunyai kendaraan sepeda motor, mereka biasanya melanjutkan sekolahnya ke Ibukota Kabupaten Bengkalis yang berjarak 15 Km atau ke Ibukota Kecamatan di Selat Baru.

Begitu juga masyarakat Desa Muntai yang ingin melanjutkan pendidikannya harus pergi ke desa Teluk Pambang dengan menggunakan sepeda kecuali mereka yang mempunyai sepeda motor bisa bersekolah ke desa lain yang lebih bagus, tapi bagi masyarakat desa Teluk Lancar untuk melanjutkan pendidikannya, mereka harus ke desa Kembang Luar yang jaraknya sekitar 5 Km dengan menggunakan sepeda atau sepeda motor, bahkan ada yang berjalan kaki. Serta ditambah lagi dengan kondisi jalan di desa Teluk Lancar yang masih berupa jalan tanah untuk menuju ke desa Kembang Luar.

Tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar rendah tersebut berimplikasi pada jenis pekerjaan. Adapun jenis pekerjaan responden berdasarkan data penelitian terlihat pada tabel III.4

TABEL III.4
JUMLAH RESPONDEN MENURUT JENIS PEKERJAAN

Desa	Jenis Pekerjaan								Total
	Belum dapat kerja tetap	Buruh	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wira swasta	PNS/ TNI	
Jangkang	1	5		2		3	3		14
Bantan Tua	4	2	4		1	5	1		17
Selat Baru		1	5	7	4		3		20
Bantan Tengah			11				9		20
Bantan Air	1		9	8					18
Muntai			4	15			1		20
Teluk Pambang	4	8	2			1		2	17
Kembung Luar	4		5				4	1	14
Teluk Lancar	1	6	5	2			4	1	19
Total Jumlah	15	22	45	34	5	9	25	4	159
%	9.4	13.8	28.3	21.4	3.1	5.7	15.7	2.5	100.0

Sumber : Data Primer, 2004

Dari data responden tersebut diatas terlihat bahwa, mayoritas responden dimana lokasi prasarana P2D berada itu berjenis pekerjaan sebagai petani sebesar 28.3 %, dan hampir terdapat disemua desa kecuali di Desa Jangkang serta nelayan menempati pada urutan kedua sebesar 21.4 %. Diantara desa-desa yang ada, Desa Bantan Tengah adalah desa yang terbanyak respondennya sebagai petani sebesar 11 atau 6.9 %, hal ini karena lokasi pemeliharaan prasarana P2D berada pada dusun yang mempunyai lahan persawahan yang terbesar di Kecamatan Bantan, disamping lahan perkebunan karet dan kelapa.

Desa Bantan Tua satu-satunya desa yang letaknya tidak dipesisir Selat Malaka, maka berdasarkan data responden, mayoritas respondennya sebagai petani. Di desa ini prasarana P2D yang telah dikerjakan berupa normalisasi sungai yang sangat dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga tidak lagi terjadi banjir bila hujan atau air laut pasang. Biasanya bila terjadi hujan di dusun setempat akan tergenang selama 2 atau 3 hari, kebun karet menjadi tergenang. Kini tidak lagi terjadi banjir atau genangan air sehari-hari bila

hujan atau pasang air laut, paling lama sekitar 30 menit air sudah tidak banjir atau surut bila hujan atau air pasang.

Sedangkan Desa Muntai adalah desa yang mempunyai responden sebagai nelayan yang terbesar dibandingkan dengan desa lainnya yaitu sebesar 15 atau 9.4 % hal ini disebabkan lokasi dimana pemeliharaan prasarana P2D berada pada daerah dekat pantai.

Nelayan di Desa Muntai, mereka menambatkan kapal motornya di Teluk Pambang karena disini ada teluk sehingga lautnya lebih tenang untuk bersandarnya kapal motor nelayan maupun kapal motor barang yang mengangkut hasil produksi pertanian dari desa Teluk Pambang dan sekitarnya. Begitu halnya juga di desa Teluk Lancar lokasi dimana prasarana P2D berada juga terdapat beberapa responden yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Nelayan di desa Teluk Lancar ini, mereka menambatkan kapal motor nelayannya di teluk yang terdapat di Desa mereka, dan juga karena desa ini letaknya agak ke selatan dan tidak berhadapan langsung dengan Selat Malaka, sehingga perairan di sepanjang Desa Teluk Lancar lebih teduh bila dibandingkan desa-desa yang pantainya langsung berhadapan dengan Selat Malaka.

Desa Bantan Air dan Desa Selat Baru adalah juga desa yang respondennya mempunyai jenis pekerjaan sebagai nelayan, karena lokasi pemeliharaan prasarana P2D di kedua desa tersebut, berada pada dusun yang daerahnya dekat dengan pantai. Desa Selat Baru yang respondennya bekerja sebagai nelayan disamping juga sebagai petani dan pedagang, hal ini karena dusun di desa Selat Baru merupakan daerah wisata pantai di Kecamatan Bantan, sehingga mereka juga membuka kedai-kedai makan atau minuman sepanjang pantai terutama pada hari sabtu dan minggu yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dari Kota Bengkalis.

Sementara di Desa Teluk Pambang mayoritas responden adalah buruh atau pekerjaan harian, buruh disini kebanyakan adalah sebagai buruh perkebunan kelapa dan karet yang banyak terdapat di desa ini. Mereka bukan pemilik lahan perkebunan tetapi hanya pekerja harian yang menerima upah harian setelah bekerja di kebun-kebun.

TABEL III.5
JUMLAH RESPONDEN MENURUT TINGKAT PENDAPATAN

Desa	Tingkat Pendapatan					Total
	< Rp. 150.000	Rp. 150.00 - Rp 450.000	Rp. 450.00 - Rp 750.000	Rp. 750.00 - Rp 1.000.000	> Rp. 1.000.000	
Jangkang	3	4	4	2	1	14
Bantan Tua	2	11	3		1	17
Selat Baru		10	5	5		20
Bantan Tengah		16	4			20
Bantan Air		18				18
Muntai		17	3			20
Teluk Pambang	5	10	1		1	17
Kembung Luar		10	1	1	2	14
Teluk Lancar	3	15	1			19
Total Jumlah	13	111	22	8	5	159
%	8.2 %	69.8 %	13.8 %	5.0 %	3.1 %	100.0 %

Sumber : Data Primer, 2004

Dari Tabel III.5 dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendapatan rata-rata responden berkisar antara Rp. 150.000 – Rp. 450.000 per bulannya berjumlah 111 responden atau 39.8 %, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir seluruh responden berpendapatan rendah.

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA P2D

4.1 Analisis Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bantan

4.1.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasional pembangunan tersebut (Slamet, 1994: 23). Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi. Karena dalam proses perencanaan masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan adalah seberapa besar masyarakat memetik manfaat dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

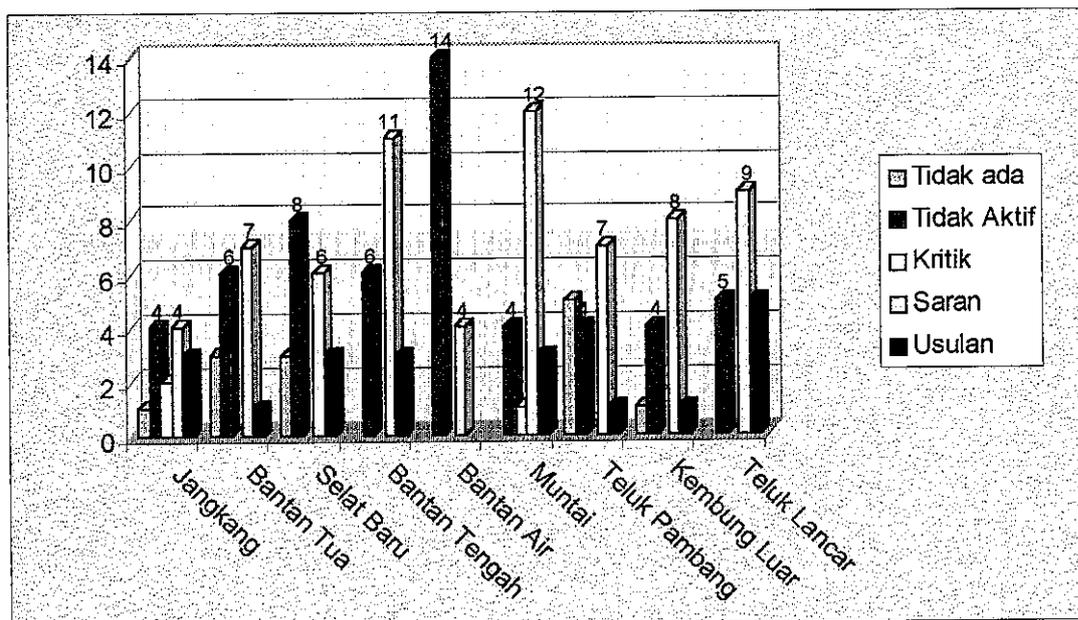
Dalam menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D ini dibagi dalam beberapa Indikator, yaitu Partisipasi dalam pertemuan, Sikap responden terhadap hasil keputusan, Intensitas kegiatan pemeliharaan, Bentuk sumbangan, dan Derajat kesukarelaan.

Berdasarkan hasil penelitian responden di Kecamatan Bantan di dapat bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program P2D.

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat dilihat dari Partisipasi dalam Pertemuan

Di Kecamatan Bantan, masyarakat dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, mereka selalu mengadakan pertemuan yang sifatnya tidak rutin. Mereka baru mengadakan pertemuan apabila akan diadakan kegiatan gotong royong atau ada kegiatan lainnya di dusun mereka, seperti kerja bakti memperbaiki jembatan, jalan dan sungai.

Dari data survei responden yang diperoleh, partisipasi masyarakat dalam pertemuan, sebagian besar memberikan saran yaitu 68 atau 42,8 % responden, sedangkan yang tidak aktif menempati urutan kedua sebanyak 55 atau 34,6 % responden, serta yang tidak aktif sama sekali karena tidak hadir dalam pertemuan sebanyak 13 atau 8,2 % responden.



GAMBAR 4.1
BENTUK PARTISIPASI DILIHAT DARI PARTISIPASI DALAM
PERTEMUAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dilihat dari Gambar 4.1, diketahui bahwa Desa Bantai Air sebagian besar respondennya tidak aktif dalam pertemuan, tidak aktif disini bukan berarti mereka tidak hadir dalam pertemuan, mereka hadir di dalam pertemuan tapi pasif tidak memberikan pendapat mereka baik itu berupa kritikan, saran atau berupa usulan ide.

Ketidaktifan responden dalam pertemuan membicarakan pemeliharaan prasarana P2D di Desa Bantai Air, ini terkait dengan kepentingan sebagian responden terutama mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka tidak mempunyai

kepentingan terhadap prasarana yang sudah dibangun, karena sebagian nelayan di Dusun Sidomulyo Desa Bantan Air, tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai nelayan. Sehingga prasarana yang ada ini, belum atau tidak membawa efek peningkatan pendapatan mereka sebagai nelayan. Partisipasi mereka dalam pertemuan walaupun sebagian besar tidak aktif, tapi untuk kepentingan bersama, mereka hadir dalam pertemuan.

Beda dengan Desa Bantan Tengah dan Desa Muntai, yang sebagian respondenya dimana lokasi prasarana P2D yang ada di dusun mereka, sebagian besar adalah petani, mereka sebagian besar mempunyai kepentingan terhadap akan prasarana yang sudah dikerjakan, terutama di Desa Bantan Tengah, dengan normalisasi sungai mereka tidak lagi takut akan banjir bila datang hujan. Begitu halnya dengan Desa Bantan Tua, yang jenis pekerjaan yang dikerjakan sama dengan Desa Bantan Tengah berupa normalisasi sungai.

Sedangkan desa Teluk Lancar dan Desa Kembang Luar adalah dua desa yang letaknya paling ujung di Kecamatan Bantan, sehingga di desa mereka sangat jarang tersentuh pembangunan, terutama di Desa Teluk Lancar yang paling jauh dan paling minim prasarana yang ada di desa mereka. Antusias masyarakat akan pembangunan yang ada di desa mereka sangat besar, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya mereka aktif memberikan saran dalam pertemuan.

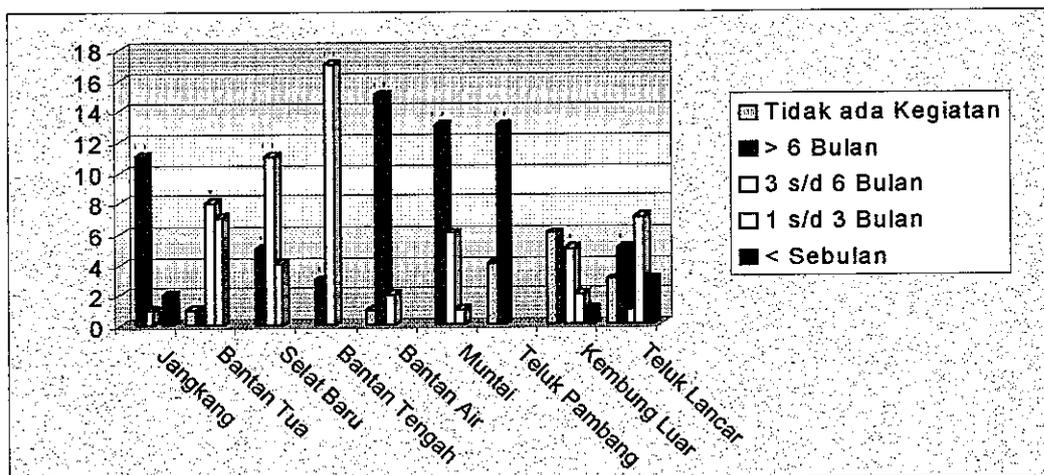
Desa Selat Baru, kondisi dusun Pantai Indah dimana prasarana P2D berada, mempunyai hampir kesamaan dengan dusun Sidomulyo di Desa Bantan Air, yaitu lokasinya dekat dengan pantai, cuma bedanya di dusun Pantai Indah ini, sebagian nelayannya juga sebagai petani dan di dusun ini juga merupakan daerah pariwisata di Kecamatan Bantan. Sehingga pemeliharaan prasarana P2D di dusun mereka juga

merupakan bagian untuk meningkatkan wisata yang mengunjungi desa mereka dengan meningkatkan kualitas lingkungan di dusun mereka.

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat dilihat dari Intensitas Kegiatan Pemeliharaan

Lamanya selang waktu yang digunakan warga untuk bergotong royong atau kerja bakti memperbaiki serta membersihkan jalan dan jembatan serta sungai, terutama prasarana yang telah dikerjakan oleh proyek P2D, pada masing-masing desa beragam waktunya. Dari hasil data responden, diperoleh jawaban bahwa intensitas kegiatan pemeliharaan prasarana yang telah dikerjakan oleh proyek P2D khususnya dan prasarana lainnya yang ada di dusun mereka adalah sebagian besar responden menjawab lebih 6 bulan sekali sebanyak 66 responden atau 41,5 %, sedangkan menjawab 3 s/d 6 bulan sebanyak 51 responden atau 32,1 %.

Intensitas kegiatan pemeliharaan di Kecamatan Bantan pada umumnya belum terjadwal dengan baik, pada umumnya selang waktu pemeliharaan, bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali atau lebih 3 bulan, tergantung dari kesepakatan bersama. Waktu yang dipakai dalam penelitian ini adalah waktu rata-rata dalam pemeliharaan prasarana P2D.



GAMBAR 4.2
BENTUK PARTISIPASI DILIHAT DARI INTENSITAS KEGIATAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari Gambar 4.2, di ketahui bahwa Intensitas kegiatan pemeliharaan prasarana P2D di Desa Bantan Tengah dan Desa Bantan Tua berkisar antara 3 s/d 6 bulan. Hal ini karena jenis prasarana di kedua desa tersebut sama yaitu normalisasi sungai, yang membutuhkan perawatan lebih, agar rumput-rumput yang tumbuh dikiri-kanan sungai tidak menghalangi jalannya air. Sedangkan desa Selat Baru, walaupun jenis prasarananya merupakan badan jalan, tapi tetap membutuhkan perawatan lebih karena jalan tanah ini yang dibentuk sangat mudah ditumbuhi rumput atau lalang, dan juga karena dusun Pantai Indah adalah lokasi pariwisata pantai di Kecamatan Bantan.

Desa Jangkang dan Desa Bantan Air, sama-sama mempunyai jenis prasarana berupa semenisasi jalan, sehingga perawatannya relatif mudah karena prasarana yang ada relatif masih baru dan belum ada kerusakan yang berarti. Juga pada kedua jalan tersebut tidak dilalui kendaraan roda 4, sehingga waktu yang digunakan untuk perawatan prasarana yang ada rata-rata diatas 6 bulan.

Sementara itu, desa Muntai dan Desa Teluk Pambang intensitas waktunya juga berkisar diatas 6 bulan dengan jenis prasarananya berupa badan jalan, dan sama-sama pada tahun 2001 pengerjaannya. Dilihat dari kondisi pada kedua jalan tersebut relatif cukup terawat, karena ini letaknya dari jalan besar (jalan kabupaten) menuju ke permukiman masyarakat dan kiri kanan jalan sudah banyak rumah penduduk. Sehingga jalan ini walaupun intensitas gotong royong masyarakat dalam kerja bakti membersihkan dan merawat jalan di lingkungan mereka diatas 6 bulan, tetapi masing-masing masyarakat disekitar jalan tersebut juga melakukan kegiatan sendiri-sendiri dalam membersihkan jalan dan saluran yang sudah dibuat oleh progam P2D.

Desa Kembang Luar, satu-satunya desa yang intensitas kegiatannya yang paling dominan boleh dikatakan hampir tidak ada perawatan atau pemeliharaan prasarana P2D,

hal ini disebabkan karena badan jalan yang dibangun pada Tahun 2003 kemaren letaknya menembus perkebunan rakyat, maksudnya pada kiri-kanan jalan belum ada permukiman penduduk, yang ada hanyalah kebun karet milik masyarakat disekitar lokasi tersebut. Maka biasanya yang merawat jalan ini adalah penduduk yang mempunyai kepentingan atas jalan tersebut seperti yang biasa pergi ke kebun atau mencari kayu melalui jalan ini.

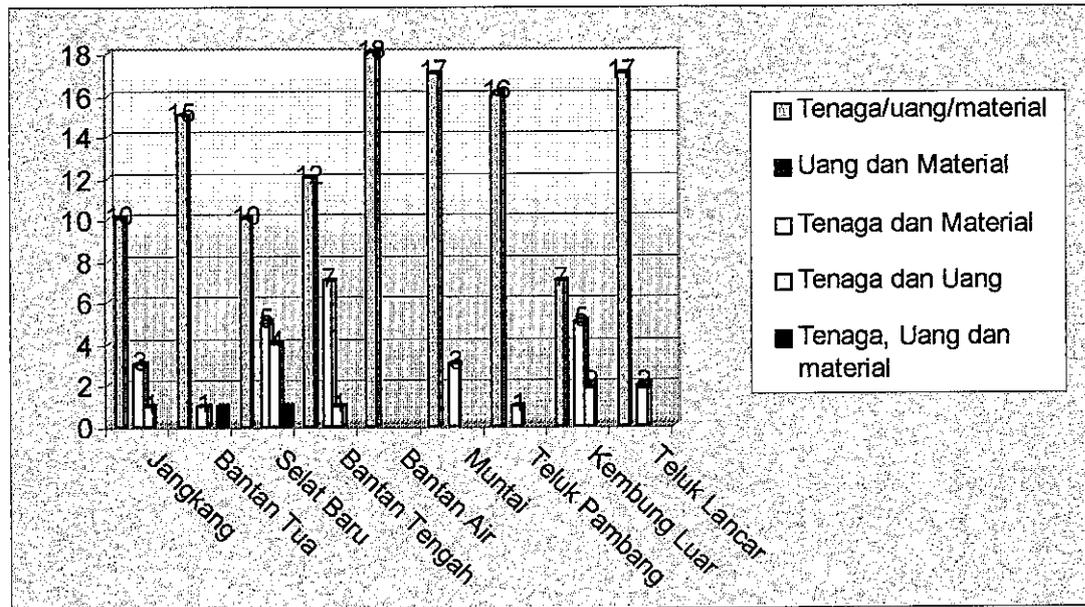
Sedangkan Desa Teluk Lancar, juga merupakan satu-satunya desa yang intensitas waktu yang digunakan untuk pemeliharaan prasarana cukup tinggi yaitu berkisar antara 1 s/d 3 bulan, hal ini karena jalan tersebut dari lingkungan mereka menuju perkebunan masyarakat setempat, juga pada kiri-kanan jalan tersebut ramai perumahan penduduk.

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat dilihat dari Bentuk Sumbangan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan sumbangannya dalam bentuk Tenaga, yaitu sebesar 122 responden atau 76,7 %, tenaga dan material 27 atau 17% responden, menyumbang tenaga dan uang 8 responden atau 5 % dan yang menyumbang ketiganya 2 responden atau 1,3 %. Dan pada masing-masing desa, desa Bantan Air seluruh respondennya memberikan sumbangan tenaga terbesar yaitu 18 responden 11,3 % dan desa Muntai dan desa Teluk Lancar, masing-masing sebesar 17 responden atau 10,7 %.

Dari Gambar 4.3 diketahui, semua desa di Kecamatan Bantan memberikan bentuk sumbangannya dalam pemeliharaan prasarana P2D berupa tenaga karena sebagian besar penduduk di Kecamatan Bantan mempunyai tingkat pendapatan rendah, walaupun begitu masih ada beberapa orang yang memberikan bantuan lainnya selain berupa tenaga saja, seperti di Desa Bantan Tua terdapat 1 orang yang memberikan bantuan ketiganya, karena dia bekerja sebagai kontraktor dengan pendapatan diatas 1 juta. Sedangkan di desa Jangkang juga terdapat 1 orang yang memberikan bantuan berupa tenaga dan uang karena

dia seorang wiraswasta menjual minyak solar kepada para pengusaha kapal nelayan atau nelayan yang mempunyai kapal motor sendiri. Seperti menurut Slamet (1994) bahwa: tidak tertutup kemungkinan masyarakat dapat menyumbang ketiganya dan hal ini akan berbeda-beda pada tiap daerah tergantung pada karakteristik masyarakatnya.



GAMBAR 4.3
BENTUK PARTISIPASI DILIHAT DARI BENTUK SUMBANGAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Sedangkan pada beberapa desa seperti di Bantan Tengah, Selat Baru, Kumbang Luar, ada beberapa masyarakatnya menyumbang berupa Tenaga dan uang, hal ini karena mereka pada umumnya bekerja sebagai wiraswasta.

Material yang disumbangkan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D ini, pada umumnya berupa alat semprot hama, cangkul dan parang. Kesemua alat tersebut selalu dipergunakan untuk membersihkan rumput atau lalang-lalang yang tumbuh disekitar jalan yang telah dibangun oleh masyarakat melalui program P2D. sedangkan bahan atau material lain yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan, membersihkan jalan dan

sungai serta pekarangan sekitarnya, seperti papan, racun, dan oli bekas untuk menyiram papan buat jembatan, kesemua itu mereka beli.

Maka semua desa yang ada di Kecamatan Bantan, menyumbangkan tenaga dan materialnya dalam pemeliharaan prasarana P2D, kecuali di desa Bantan Air tapi bukan berarti di desa Bantan Air tidak ada yang menyumbang material atau uang.

d. Bentuk Partisipasi dilihat dari Keterlibatan dalam tahap Pelaksanaan P2D

Keterlibatan masyarakat di Kecamatan Bantan pada tahap pelaksanaan program P2D yang dikerjakan oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah cukup aktif.

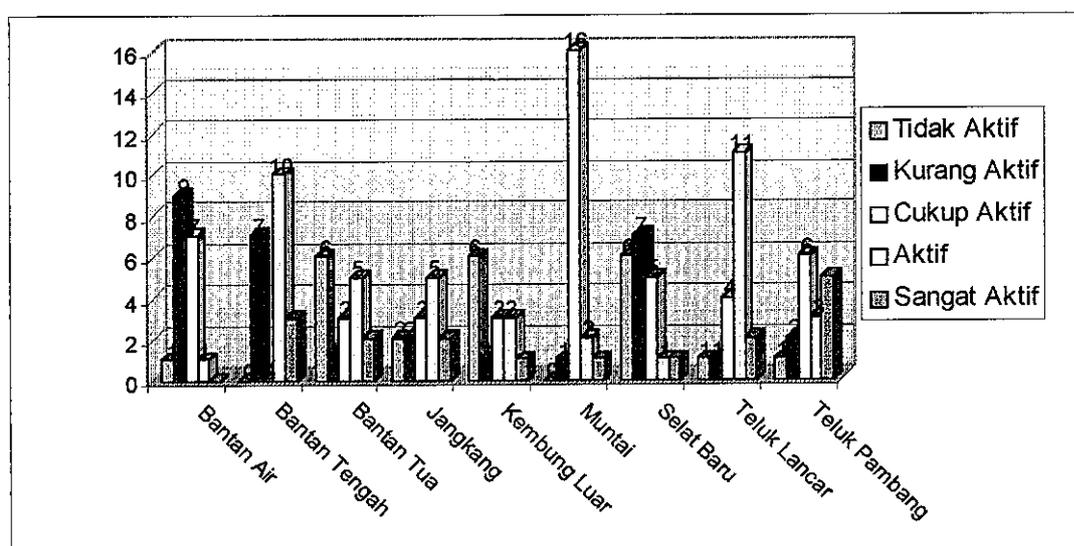
Diantara desa-desa yang keterlibatannya cukup aktif adalah desa Muntai dan Teluk Pambang, karena lokasi prasarana P2D di dua desa ini, merupakan jalan satu-satunya menuju jalan besar. Sedangkan desa Bantan Air, desa Selat Baru, yang lokasi kedua prasarana P2D itu berada pada daerah pesisir, yang sebagian penduduknya disamping petani juga ada nelayan, keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program P2D di dusun mereka adalah kurang aktif, hal ini karena pada saat mereka melaut mereka tidak bisa ikut serta dalam pelaksanaan P2D di dusun mereka.

Desa Bantan Tua jumlah respondennya sebagian besar tidak aktif dalam pelaksanaan program P2D, karena kurangnya sosialisasi oleh kepala desa dan pihak Fasilitator Desa tentang pelaksanaan P2D di desa mereka, sehingga banyak ketidaktahuan mereka tentang pola pelaksanaan program P2D ini.

Desa Bantan Tengah, Desa Jangkang dan desa Teluk Lancar adalah desa yang keterlibatan masyarakatnya Aktif pada tahap pelaksanaan program P2D. Desa Teluk Lancar yang selama ini sangat jarang sekali disentuh oleh pembangunan, baik itu dari Kabupaten, Propinsi maupun dari Pusat. Sehingga ketika ada program P2D yang pola

pelaksanaannya diserahkan langsung kepada masyarakat melalui lembaga/organisasi masyarakat setempat yang ada seperti LKMD, mereka sangat antusias untuk ikut serta di dalam pelaksanaannya, apalagi mereka juga akan mendapatkan upah yang cukup memadai dan lingkungan tempat mereka tinggal pun menjadi lebih baik.

Sedangkan desa Bantan Tengah dan desa Jangkang, mereka terlibat sangat aktif karena tidak lepas dari peran dari Kepala desa, yang peduli setiap pembangunan apapun di desa mereka.

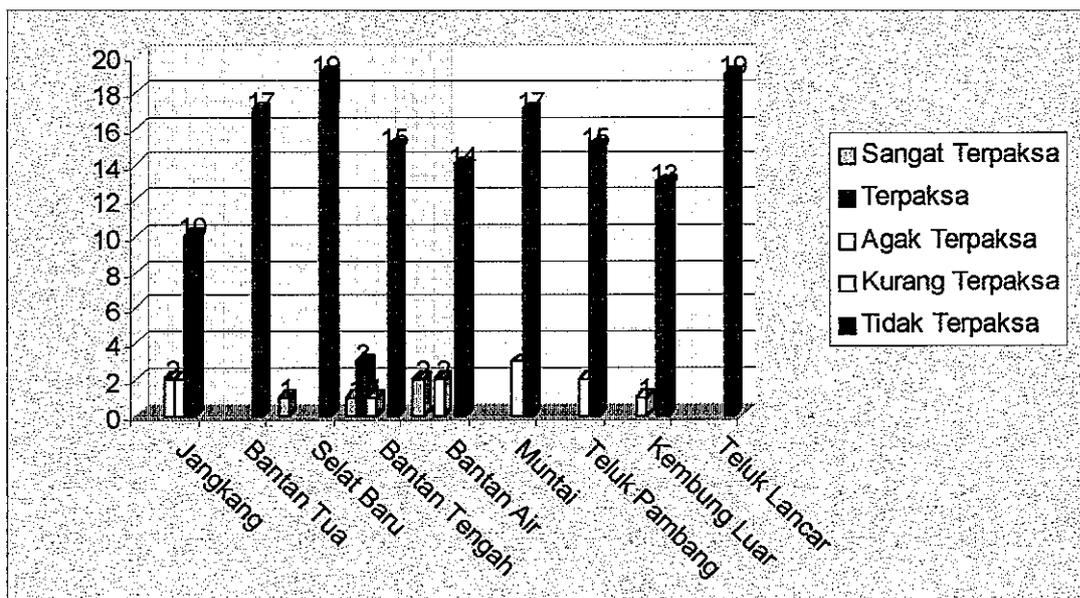


GAMBAR 4.4
BENTUK PARTISIPASI DILIHAT DARI KETERLIBATAN
DALAM PELAKSANAAN P2D

Sumber : Hasil Analisis, 2004

e. Bentuk Partisipasi Masyarakat dilihat dari Derajat Kesukarelaan

Dari Gambar 4.5 dibawah, bahwa sebagian besar responden tidak merasa keterpaksaan dalam keikutsertaan mereka mulai dari pertemaun sampai kegiatan fisik pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan.



GAMBAR 4.5
BENTUK PARTISIPASI DILIHAT DARI DERAJAT
KESUKARELAAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Ketidakterpaksaan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan program P2D di Kecamatan Bantan , karena mereka merasa keikutsertaan mereka dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D ini karena untuk kepentingan bersama, karena kita hidup ditengah masyarakat, maka kita harus bermasyarakat.

Sementara keterpaksaan masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam pemeliharaan prasarana P2D, karena keikutsertaan mereka bukan atas kesadaran sendiri, tapi karena diajak oleh ketua RT/RW atau teman dan orang lainnya.



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG - 2004

TESIS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PELAKSANAAN KAWASAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
KABUPATEN BENGKALIS

PEETA
Bentuk Partisipasi Masyarakat

LEGENDA :

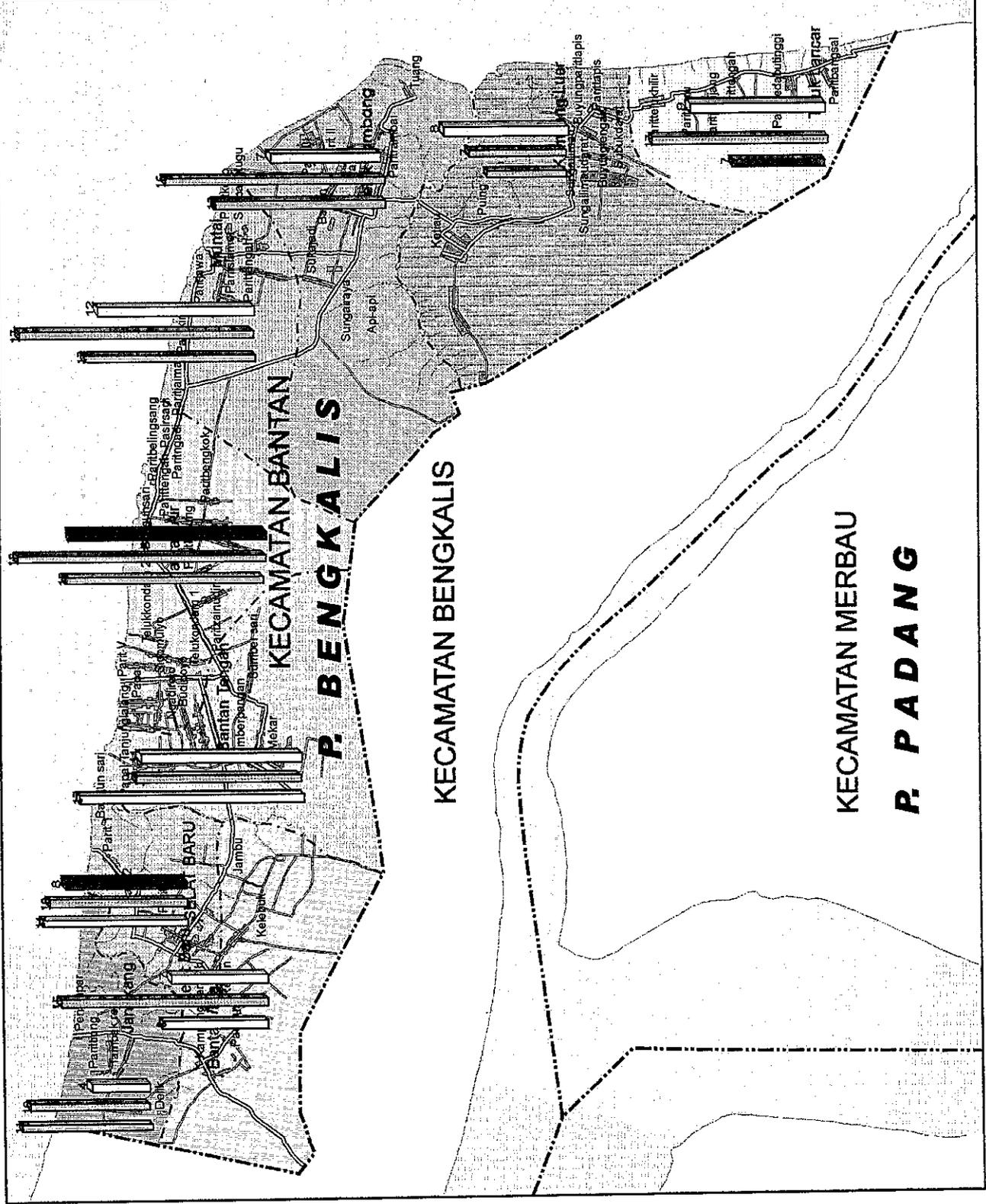
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Garis Pantai
- Jalan Lokal
- Jalan Lain
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Kantor Lurah
- Saran
- Tidak Aktif
- Tenaga/luang/material
- > 6 Bulan
- 3 s/d 6 Bulan
- 1 s/d 3 Bulan

INSET



UTARA	SKALA
	1 : 350.000
NOMOR	
Halaman	GAMBAR
93	4,6

SUMBER : BENGKALIS
DAN BANGSUANTANAL



4.1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Di dalam menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan, dilihat dari 4 indikator tingkat partisipasi masyarakat, yaitu Kehadiran dalam pertemuan, Keaktifan dalam diskusi, Keaktifan dalam Kegiatan Fisik dan Sumber Dana.

Metode yang digunakan dalam menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat pada masing-masing indikator, akan digunakan *Deskriptif Statistik* dengan analisis *Crosstab* untuk mengetahui jumlah responden yang menjawab pada masing-masing indikator dan desa.

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat dilihat dari Kehadiran dalam Pertemuan.

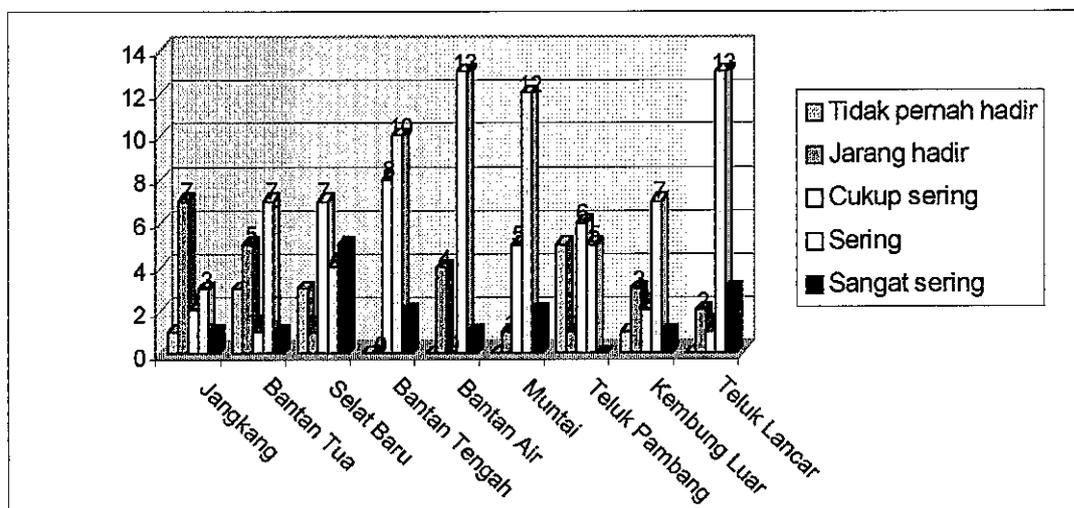
Partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada pertemuan secara keseluruhan adalah sering, yaitu sekitar 75 % kehadiran dari pertemuan dengan jumlah responden sebesar 77 atau 48,4 %, walaupun ada beberapa desa kehadiran responden dalam pertemuan yang paling besar adalah jarang hadir seperti pada desa Jangkang, yaitu 7 reponden atau 4,4 %. Sedangkan Desa Selat Baru dan desa Teluk Pambang, kehadiran responden dalam pertemuan yang paling besar adalah cukup sering yaitu masing-masing sebanyak 8 responden atau 5 % dan 6 responden atau 3,8 %.

Kegiatan pertemuan yang diadakan oleh masyarakat di Kecamatan Bantan pada umumnya dilakukan pada saat mereka mengadakan kegiatan wirid pengajian pada malam Jum'at, yang dilakukan bergilir dari rumah kerumah dan juga ada yang diadakan di masjid atau musholah. Kegiatan wirid pengajian ini dilakukan pada tingkat RW setempat. Jadi pertemuan mereka pada mulanya hanya untuk menghadiri kegiatan wirid pengajian, tapi biasanya juga dibicarakan kegiatan yang akan dilakukan pada keesokan harinya, apabila

disetujui untuk diadakan kegiatan gotong royong, atau ketika akan ada acara perayaan Hari Besar Nasional dan Islam.

Kehadiran masyarakat dalam pertemuan di Desa Teluk Lancar, desa Kembang Luar, desa Bantan Air, Muntai dan Bantan Tua, adalah sering, menunjukkan hubungan antar warga masih erat, rasa kepedulian cukup tinggi, sehingga apabila mereka tidak menghadiri kegiatan yang diadakan di dusun mereka, rasa tidak enak dengan warga lainnya masih kuat.

Sedangkan Desa Selat Baru dan Desa Teluk Pambang, kehadiran mereka cukup sering, karena pada kedua dusun pada desa tersebut, jumlah KK cukup ramai, sehingga merasa apabila tidak hadir satu dua orang mereka menganggap masih ada warga yang lainnya.



GAMBAR 4.7
TINGKAT PARTISIPASI DILIHAT DARI KEHADIRAN PERTEMUAN

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Jarangnya kehadiran masyarakat di Desa Jangkang ini, karena jaranganya kegiatan wirid yasin ini diadakan oleh warga, sehingga waktu yang digunakan untuk berkumpul

biasanya ketika ada undangan rapat dari Ketua RW setempat, dan juga jumlah KK di dusun tersebut tidak terlalu banyak.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dilihat dari Keaktifan dalam diskusi.

Secara Keseluruhan, Tingkat Partisipasi Responden dilihat dari keaktifan dalam diskusi adalah Aktif sebesar 63 responden atau 39,6 %, Cukup Aktif sebesar 53 responden atau 33,3 %, Kurang Aktif sebesar 28 responden atau 17,6 % dan Tidak Aktif sebesar 13 responden atau 8,2 %, serta yang Sangat Aktif 2 responden atau 1,3 %.

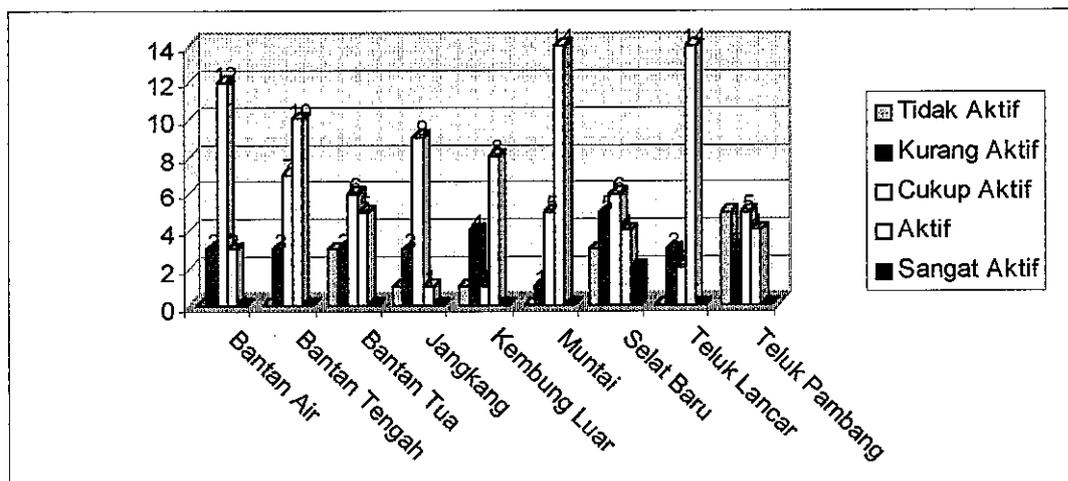
Keaktifan responden dalam pertemuan ini dinilai dari kehadiran dan partisipasi dalam pertemuan, maka dapat diketahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D dilihat dari keaktifan dalam diskusi.

Dari Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa Desa Bantan Tengah, tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari keaktifan dalam diskusi adalah aktif, karena sebagian besar kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pertemuan cukup besar. Mereka aktif dalam pertemuan dengan memberikan saran dan kritik, serta sering hadir dalam pertemuan atau kegiatan yang diadakan di dusun mereka. Begitu halnya juga dengan Desa Teluk Lancar dan Desa Muntai yang Keaktifan masyarakatnya dalam pertemuan adalah Aktif. Desa Muntai yang jumlah Kknya tidak terlalu banyak sehingga keaktifan warganya dapat dilihat oleh warga yang lain. Semakin kecil daerah dan penduduk yang mendiaminya, maka akan semakin mungkin bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana-sarana yang efektif kearah partisipasi (Conyer, 1994: 173).

Sedangkan desa yang tingkat keaktifan dalam diskusinya Cukup Aktif adalah Desa Bantan Air, Desa Jangkang dan Desa Selat Baru. Desa Bantan Air keaktifan masyarakatnya dalam pertemuan cukup aktif karena masyarakatnya dalam kehadiran dan partisipasinya dalam pertemuan juga cukup tinggi, karena bagi masyarakat yang bermata

pencapaian sebagai nelayan mereka tidak akan bisa ikut serta dalam pertemuan, karena para nelayan biasanya jadwal mereka pergi memancing ikan tergantung pada angin, sehingga ada yang pergi memancing pada malam hari dan ada juga yang pergi memancing pada siang hari. Kalau Desa Jangkang dan Desa Selat Baru, karena kehadiran masyarakatnya dalam pertemuan adalah jarang dan cukup sering, tapi partisipasi mereka dalam pertemuan cukup aktif dengan memberikan saran.

Desa Teluk Pambang sebagian masyarakatnya tidak aktif dalam pertemuan, karena ada beberapa warganya tidak hadir dalam pertemuan, walaupun dalam pertemuan sebagian masyarakatnya aktif memberikan saran atau kritik. Hal ini karena ada beberapa warganya tidak bisa hadir dalam pertemuan karena mereka harus berangkat dengan menggunakan kapal motor untuk membawa hasil perkebunan dan kerajinan masyarakat di Desa Teluk Pambang dan sekitarnya ke Tembilahan atau ke Malaysia. Desa Teluk Pambang yang dibatasi oleh sungai kambung luar dengan desa Kambung Luar, menjadikan sungai kambung luar sebagai pintu keluar masuknya produk komoditas hasil pertanian untuk desa Teluk Pambang dan desa disekitarnya.



GAMBAR 4.8
TINGKAT PARTISIPASI DILIHAT DARI KEAKTIFAN
DALAM DISKUSI

Sumber : Hasil Analisis, 2004

c. Tingkat Partisipasi Masyarakat dilihat dari Keaktifan dalam Pemeliharaan Prasarana P2D.

Dari hasil Survei diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dilihat dari keaktifan dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan adalah Cukup Aktif sebesar 102 responden atau 64,2 %, Aktif sebesar 25 responden atau 15,7 %, Sangat Aktif sebesar 6 responden atau 3,8 %, Kurang Aktif sebesar 25 responden atau 15,7 % dan Tidak Aktif sebesar 1 responden sebesar 0,6 %.

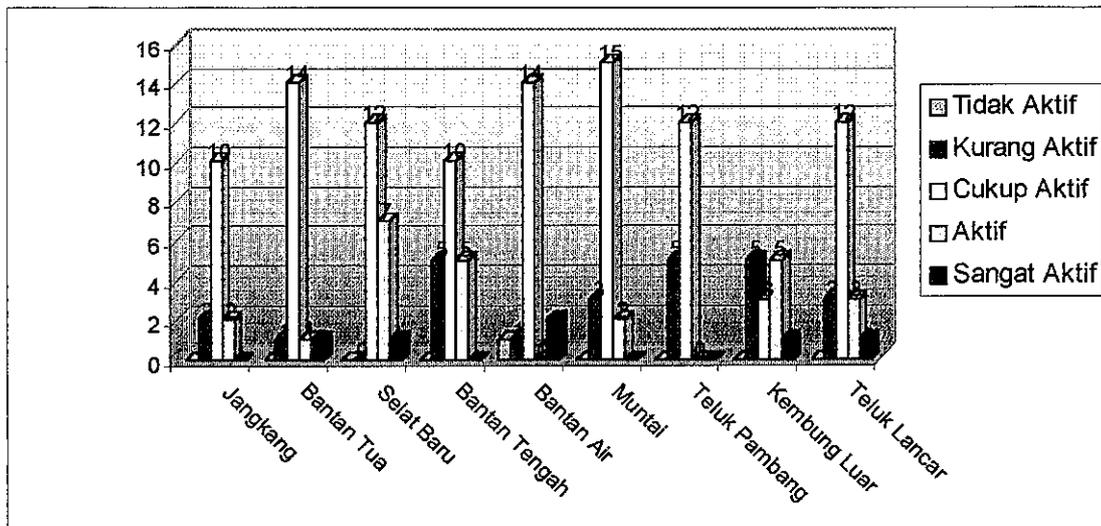
Keaktifan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan adalah Cukup Aktif, karena pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bantan selang waktu yang digunakan untuk perawatan cukup lama di atas 6 bulan, kecuali pada beberapa desa seperti di Desa Bantan Tengah dan Desa Selat Baru yang intensitas waktunya antara 3 s/d 6 bulan.

Sedangkan di desa Keimbung Luar yang masyarakat yang aktif sama besarnya dengan masyarakat yang kurang aktif, hal ini karena prasarana P2D di lokasi P2D lain sendiri letaknya dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Bantan, yaitu karena letaknya tidak ditengah-tengah perkampungan masyarakat, sehingga masyarakat yang memanfaatkan jalan tersebut tidak semuanya aktif dalam memeliharanya.

Desa Selat Baru, yang lokasi P2D letaknya di Dusun Pantai Indah suatu kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Bantan, masyarakat yang aktif cukup besar dibandingkan dengan desa lainnya, karena masyarakat sangat berkepentingan dengan prasarana jalan tersebut sebagai sebuah dusun tempat berkunjungnya wisatawan domestik dari Kota Bengkalis. Begitu halnya juga dengan Masyarakat Desa Bantan Tengah yang keaktifan dalam pemeliharaan prasarana P2D yang aktif cukup besar juga, tetapi yang kurang aktif juga sama, hal ini karena jenis prasarannya berupa sungai, yang baru dirasakan

manfaatnya kalau hari hujan sehingga tidak terjadi banjir, sedangkan kalau hari tidak hujan ada sebagian masyarakatnya merasa kurang penting dengan perawatan sungai.

Desa Bantan Tua, memang intensitas kegiatannya perawatannya tinggi antara 3 s/d 6 bulan tetapi bentuk sumbangan yang diberikan oleh masyarakatnya mayoritas berupa tenaga, yang menyumbang tenaga dan uang atau material lebih sedikit dibandingkan dengan Desa Bantan Tengah yang sama-sama mempunyai jenis prasarana normalisasi sungai. Walaupun di ketahui bahwa di Desa Bantan Tua ada satu orang yang menyumbangkan ketiga-tiganya.



GAMBAR 4.9
TINGKAT PARTISIPASI DILIHAT DARI KEAKTIFAN DALAM
PEMELIHARAAN PRASARANA P2D

Sumber : Hasil Analisis, 2004

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat dilihat dari Sumber Dana.

Dilihat dari Sumber Dana yang digunakan untuk pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan, sebagian besar masih menggunakan dari sisa hasil pelaksanaan program P2D yang memang dialokasikan untuk pemeliharaan prasarana, terutama pemeliharaan pertama kali setelah program P2D ini selesai pada bulan Desember 2003,

untuk selanjutnya masyarakat bergotong royong menyumbang yang besarnya tergantung dari besarnya dana yang dibutuhkan ketika akan dilaksanakannya kegiatan gotong royong membersihkan jalan, sungai dan memperbaiki jembatan.

Pada pertama kali dilakukan pemeliharaan yang menggunakan sisa dana program P2D, OMS masih mengkoordinir kegiatan ini yang dibantu oleh kepala Dusun dan Kepala Desa, karena sisa dana masih dipegang oleh OMS. Tapi kalau dana itu habis dibagikan kepada masyarakat setempat, OMS tidak lagi mengkoordinir dalam kegiatan pemeliharaan.

Desa Bantan Tengah, sumber dana yang digunakan untuk pemeliharaan prasarana masih menggunakan sebagian besar dari sisa program P2D, karena waktu diadakan perawatan pertama kali setelah selesai sekitar bulan Januari, 3 bulan setelah normalisasi sungai selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2003, pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah memotong rumput yang sudah panjang pada kiri kanan sungai dan membersihkan jalan yang ditimbun dari tanah hasil pengerukan sungai.

Begitu juga dengan Desa Bantan Tua, apa yang dikerjakan oleh masyarakatnya dalam perawatan prasarana P2D tidak terlalu beda dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Bantan Tengah, dan sumber dana yang dipergunakan juga sebagian masih dari sisa program P2D dan sumbangan dari masyarakat setempat.

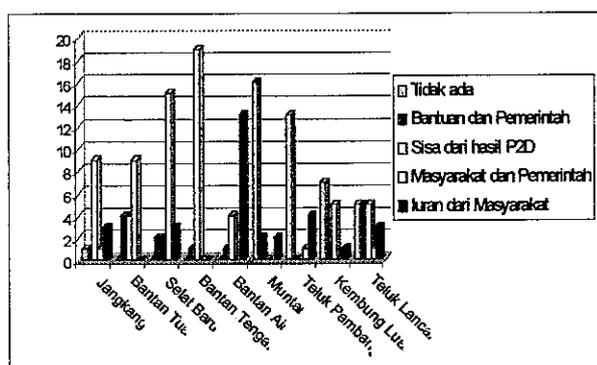
Desa Muntai hampir dikatakan tidak menggunakan dana, karena jenis prasarana yang dikerjakan adalah jalan tanah yang sudah dibuatkan parit pada kiri kanan jalan, dan lokasinya pun ditengah permukiman masyarakat, sehingga cukup dengan bergotong royong dengan membawa peralatan masing-masing, seperti cangkul, sapu lidi dan lainnya, mereka sudah bisa melakukan kegiatan pemeliharaan badan jalan yang telah dibangun melalui program P2D.

Desa Bantan Air, dalam melakukan pemeliharaan prasarana sebagian besar mereka mengumpulkan dana dari iuran yang sudah ditetapkan bersama, dan dana ini sebetulnya dipergunakan untuk sumbangan ke masjid, tapi dipergunakan juga untuk kegiatan gotong royong di dusun mereka, yaitu berupa 12 kg padi setiap kali panen dalam setahun. Sebetulnya padi yang disumbangkan ke Masjid adalah sebagai Zakat Mal masyarakat setiap kali panen. Disamping itu prasarana yang dibangun di Desa Bantan Air yang berupa Semenisasi jalan tidak memerlukan perawatan dengan dana besar, disamping belum ada kerusakan juga karena masih baru.

Desa Teluk Pambang, yang prasarananya berupa badan jalan, dan letaknya di permukiman penduduk, sama seperti di Desa Muntai. Dana yang dibutuhkan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D tidak terlalu besar, sehingga mereka tidak menarik dana sumbangan, disamping juga sebagian besar masyarakatnya adalah buruh tani dan ada juga yang belum memperoleh pekerjaan tetap.

Desa Teluk Lancar, karena kegiatan pemeliharaan prasarana P2D belum membutuhkan dana sumbangan dari masyarakat, karena masih menggunakan dari sisa P2D

Desa Kembang Luar, sebagian masyarakat tidak ada dana untuk pemeliharaan



GAMBAR 4.10
TINGKAT PARTISIPASI DILIHAT DARI
SUMBER DANA

prasarana P2D, karena yang menggunakan prasarana ini tidak dari masyarakat setempat. Tapi pada umumnya masyarakat setempatlah yang melakukan perawatan prasarana tersebut, dengan sisa dana P2D dan bantuan dari masyarakat sendiri, berupa uang atau barang.



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG - 2004

TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PRASARANA PEREKONOMIAN DAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

PELITA

Tingkat Partisipasi Masyarakat

LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Cerdas Pantai
- Jalan Lokal
- Jalan Lain
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Kantor Lurah
- Sangat Rendah
- Rendah
- Agak
- Tinggi
- Sangat Tinggi

INSET



UTARA

SKALA

1 : 350.000

NOMOR

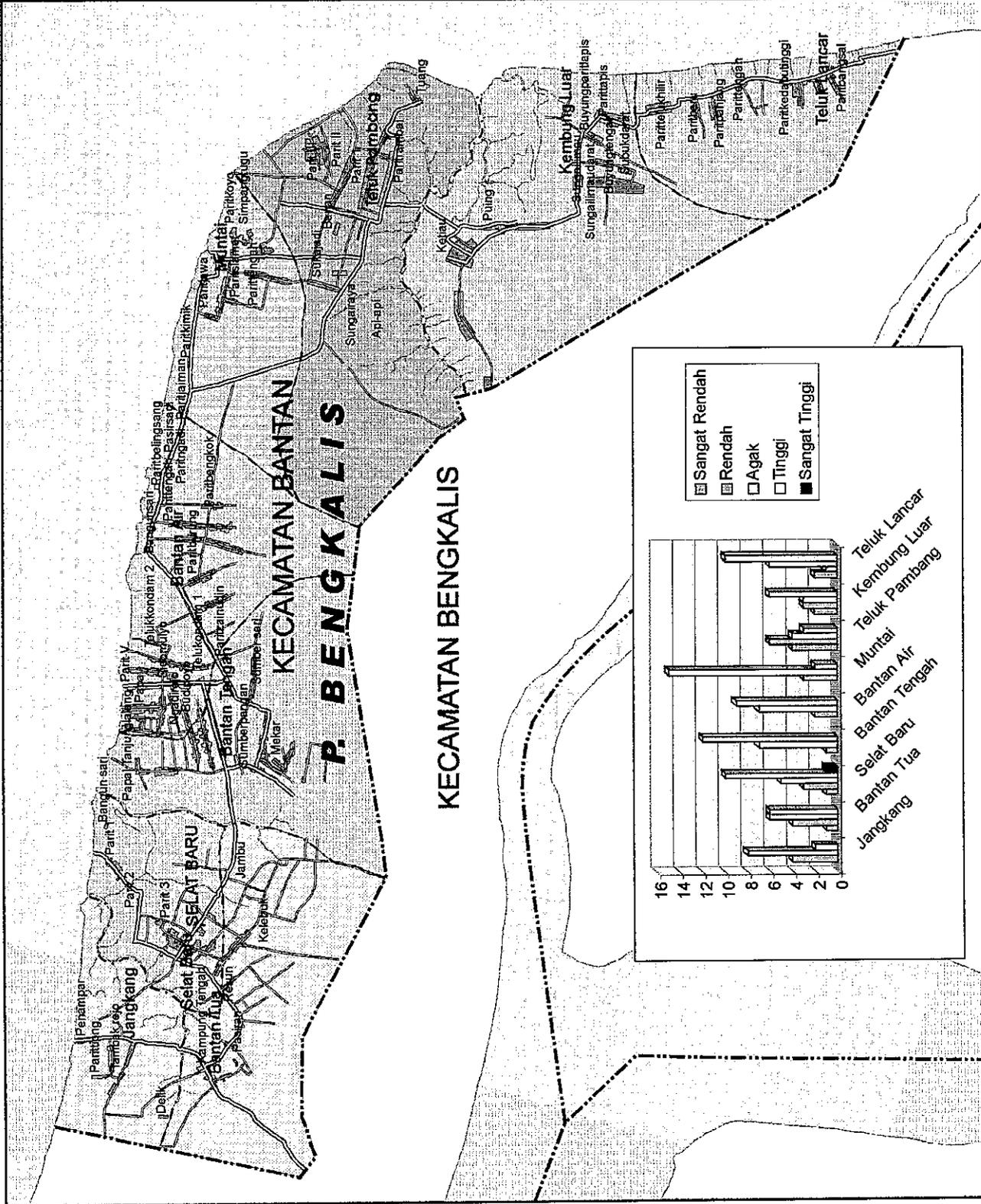
Halaman

GAMBAR

102

4, 11

SUMBER :
TATA PERENCANAAN BENGKALIS
DAN BANGKALIANAL



4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

4.2.1 Faktor Internal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Dari hasil Perhitungan *Chi Square* antara Faktor Internal terhadap Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, diketahui bahwa ada beberapa faktor internal yang mempunyai hubungan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan, yaitu Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan.

a. Hubungan antara Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Maksud dari penelitian ini, untuk melihat perbedaan antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan.

Hasil penelitian, diketahui bahwa jenis pekerjaan responden dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar yaitu Belum memperoleh pekerjaan tetap, buruh, Petani, Nelayan, dan Wiraswasta.

Berdasarkan atas hasil penelitian ternyata ada perbedaan dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D dari berbagai jenis pekerjaan sebagian besar yang belum memperoleh pekerjaan tetap, petani dan wiraswasta mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi, sedangkan buruh, nelayan dan wiraswasta mayoritas mempunyai tingkat partisipasi yang agak tinggi.

Masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan tetap tingkat partisipasinya tinggi karena mereka mempunyai waktu yang cukup untuk menghadiri pertemuan maupun ikut dalam kegiatan gotong royong.

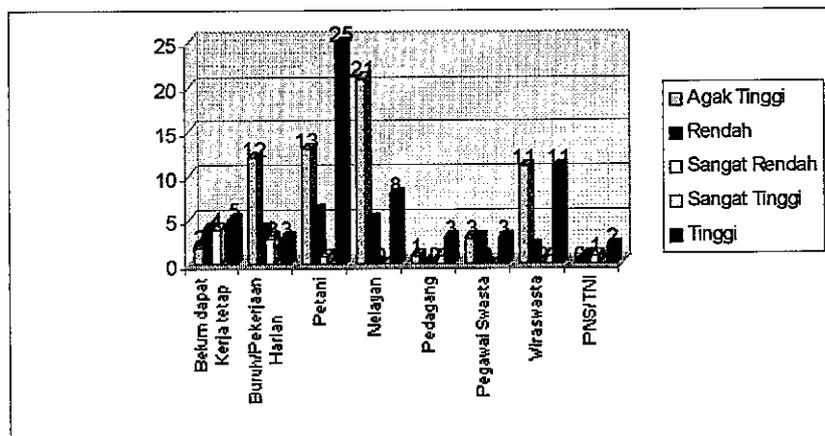
Petani, mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi karena mayoritas jenis prasarana yang ada di Kecamatan Bantan, sangat membantu para petani dalam meningkatkan ekonomi mereka, seperti normalisasi sungai dan jalan. Dulu sebelum

dilakukan normalisasi sungai akan terjadi banjir bila hujan, sekarang tidak lagi, sehingga masyarakat tetap bisa bekerja tanpa dikuatirkan akan terjadi banjir lagi. Begitu juga jalan yang di buat oleh program P2D, dari jalan tanah di tingkatkan menjadi jalan beton, sehingga akan memperlancar arus pergerakan barang dan orang dari dan ke desa mereka.

Wiraswasta juga mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi karena mereka mempunyai kemampuan dari segi keuangan, sehingga mereka bisa membantu baik berupa tenaga, peralatan maupun uang. Tapi karena kesibukan mereka pula kadang mereka tidak mempunyai kesempatan untuk aktif dalam pertemuan dan kegiatan fisik, maka ada sebagian dari wiraswasta tingkat partisipasi yang agak tinggi.

Buruh mempunyai tingkat partisipasi yang agak tinggi, hal ini disebabkan karena karena mereka tidak begitu merasa prasarana yang ada bisa meningkat tingkat pendapatan mereka, baik itu mereka sebagai buruh perkebunan atau sebagai buruh bangunan yang berkerja di Kota Bengkalis, sehingga dari segi waktu juga mereka kurang dapat berpartisipasi.

Sama halnya dengan buruh, nelayan juga mempunyai tingkat partisipasi yang agak tinggi, hal ini disebabkan karena jenis prasarana yang ada belum dapat meningkatkan perekonomian mereka.



GAMBAR 4.12
HUBUNGAN ANTARA JENIS PEKERJAAN DENGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA P2D

Sumber : Hasil Analisis, 2004

b. Hubungan Antara Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat.

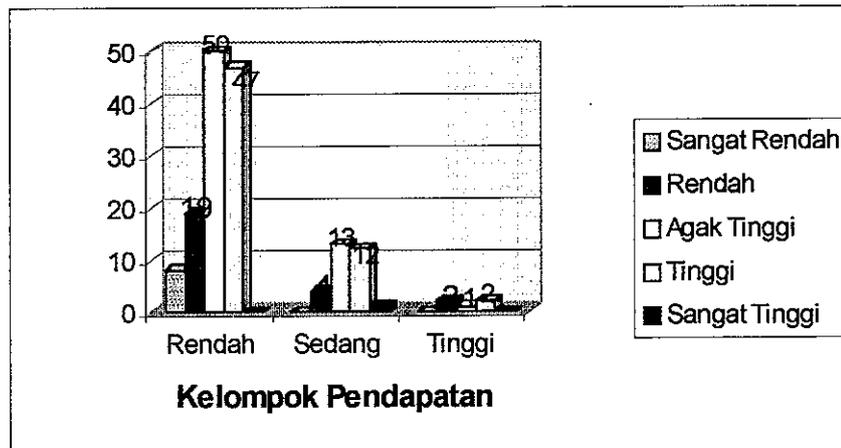
Dari tingkat pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pendapatan rendah yaitu pendapatan dibawah 450.000 sebesar 124 orang (77,99 %), kelompok pendapatan sedang yaitu pendapatan diatas 450.000 sampai 1.000.000 sebesar 30 orang (18,87%), dan kelompok pendapatan tinggi yaitu pendapatan diatas 1.000.000 sebesar 5 orang (3,14 %).

Dari hasil perhitungan *Chi Square* antara kelompok pendapatan dan tingkat partisipasi masyarakat diketahui bahwa Kelompok pendapatan rendah sebagian besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah Agak Tinggi sebesar 50 orang atau 40,3 %, kemudian Tinggi sebesar 47 orang atau 37,9 %. Kelompok pendapatan Sedang, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah Agak Tinggi sebesar 13 orang atau 43,3 %, kemudian Tinggi sebesar 12 orang atau 40 %. Kelompok pendapatan Tinggi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah Tinggi sebesar 2 orang atau 40 %, kemudian Rendah sebesar 2 orang atau 40 %.

Dilihat dari hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok pendapatan rendah dan kelompok pendapatan sedang, hal ini karena pendapatan antara 450.000 s/d 1.000.000 untuk hidup di Kabupaten Bengkalis masih belum mencukupi, hal ini disebabkan besarnya biaya hidup di Kecamatan Bantan pada khususnya di Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Kemudian dilihat hubungan antara kelompok pendapatan sedang dan kelompok pendapatan tinggi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, terdapat perbedaan.

Maka dapat dikatakan bahwa besarnya tingkat pendapatan akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, tapi juga disatu sisi, hubungan ini ada negatifnya, karena ada juga sebagian kelompok pendapatan tinggi yang tingkat partisipasi masyarakatnya adalah Rendah. Hal ini disebabkan karena kesibukan mereka sehingga tidak punya waktu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan.



GAMBAR 4.13
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDAPADAT DAN
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Sumber : Hasil Analisis, 2004

4.2.2 Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Menurut Sunarti (dalam Jurnal Tata Loka, 2003: 79), Faktor-faktor Eksternal yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini.

Menurut buku petunjuk pelaksanaan P2D yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi P2D Pusat, pada tingkat Desa, petaruh yang terlibat dalam kegiatan P2D mulai pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan pemeliharaan adalah Kepala Desa, Konsultan dan Tokoh Masyarakat.

a. Hubungan Antara Kepala Desa dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

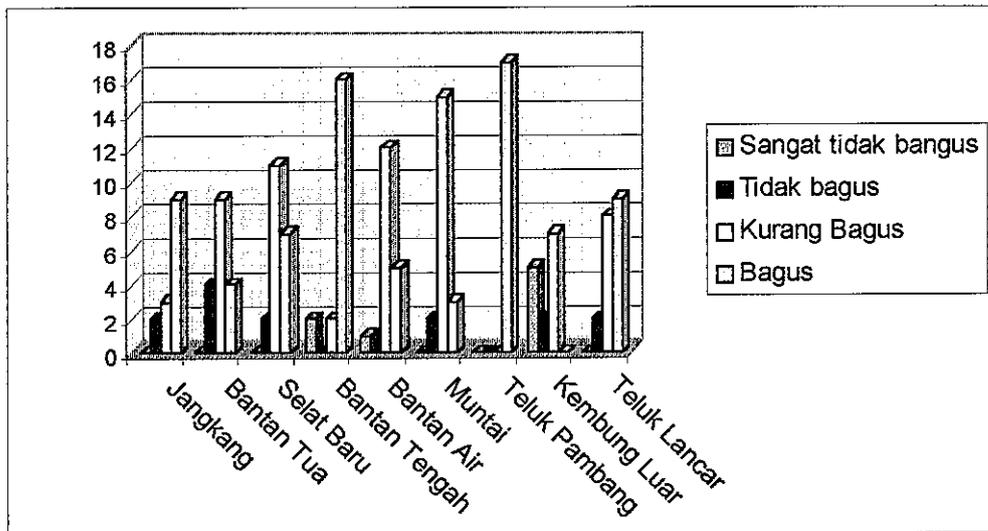
Dari hasil penelitian diketahui peran Kepala Desa pada masing-masing desa. Desa Jangkang, Desa Bantan Tengah, DesaTeluk Pambang dan DesaTeluk Lancar diketahui peran Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan adalah Bagus, hal ini karena besarnya perhatian yang diberikan Kepala Desa akan keberhasilan dan kelangsungan program P2D di desa mereka. Mereka Kepala Desa, disamping mempunyai peran untuk mensosialisasikan program P2D kepada masyarakat, tapi juga mereka ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan P2D, mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan.

Sedangkan Peran Kepala Desa di Desa Bantan Tua dan Desa Bantan Air, kurang bagus, karena dianggap kurang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan maupun pada tahap pemeliharaan. Hal ini disebabkan ketika dalam pelaksanaan program P2D, Kepala Desa mencoba mengambil wewenang OMS dalam melaksanakan pekerjaan fisik program P2D, sehingga untuk mengajak masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di dusun tersebut jarang atau tidak pernah.

Sedangkan Kepala Desa Selat Baru, perannya dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D kurang bagus, karena Kepala Desa Selat Baru baru menjabat beberapa bulan menjadi Kepala Desa Selat Baru. Sehingga Kepala Desa Selat Baru belum mengerti betul tentang pelaksanaan program P2D di desa Selat Baru, karena tidak mengikuti dari awal.

Kemudian Kepala Desa Muntai dan Kembang Luar, perannya dalam mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program P2D kurang bagus, karena dilihat dari segi usia keduanya dan sering sakit-sakit, akibatnya mereka tidak bisa terlalu aktif untuk mengajak masyarakat berperanserta dalam program P2D.

Beda dengan Kepala Desa Teluk Lancar, walaupun sudah berumur, tapi dari segi fisik masih sehat dan aktif mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam program P2D di desa mereka.



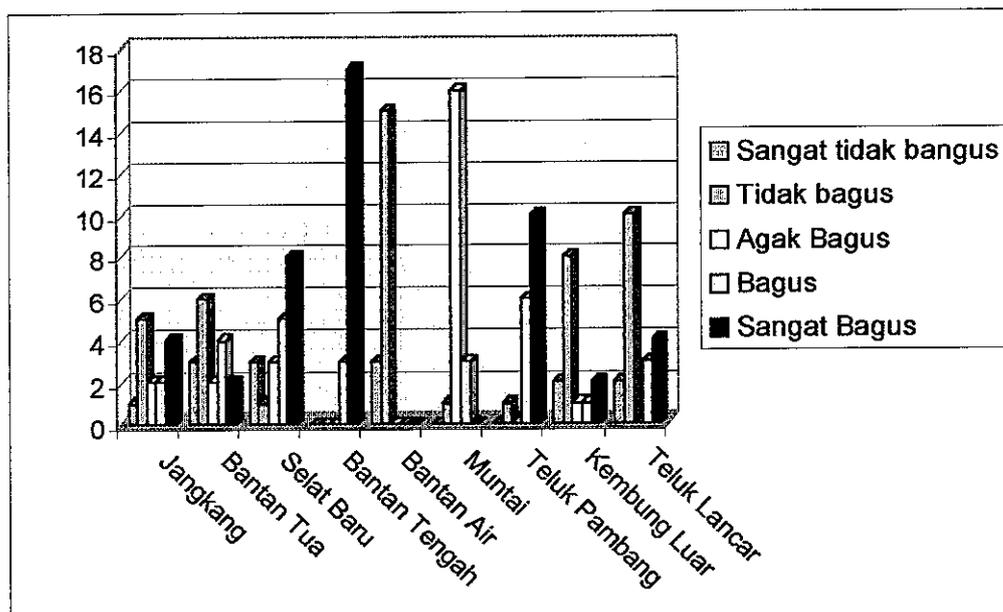
GAMBAR 4.14
HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DENGAN TINGKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT

Sumber : Hasil Analisis, 2004

b. Hubungan Antara Konsultan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hubungan antara Konsultan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah mengajak masyarakat bersama-sama Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat untuk memelihara prasarana P2D. Sehingga keberhasilan dari pada program P2D ini juga terkait dengan peran Konsultan di dalam mensosialisasi program P2D sehingga masyarakat tahu tata cara pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana P2D yang diharapkan.

Dari beberapa desa, desa Banten Tengah, Selat Baru dan Teluk Pambang yang peran Konsultan Sangat bagus dalam partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan yang ada benar-benar dapat berfungsi.



GAMBAR 4.15
HUBUNGAN ANTARA KONSULTAN DENGAN
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Sedangkan beberapa desa lainnya seperti Jangkang, Bantan Tua, Bantan Air, Kembang Luar dan Teluk Lancar, keberadaan konsultan tidak bagus, karena tidak pernah atau jarang memberikan pengarahan. Apalagi dengan kondisi jalan dan jarak yang jauh dari pusat kota, membuat beberapa desa seperti Teluk Lancar dan Kembang Luar jarang didatangi konsultan.

c. Hubungan Antara Tokoh Masyarakat dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat.

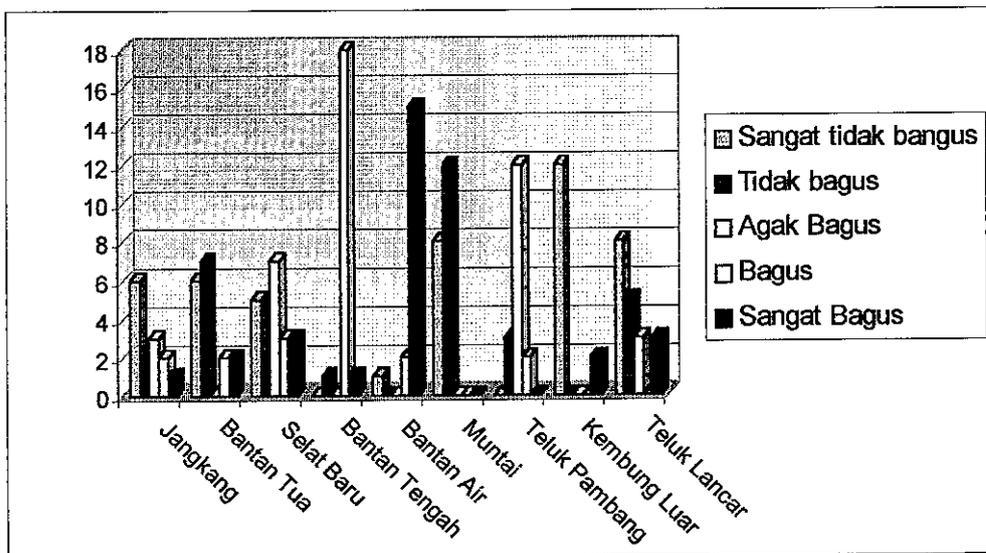
Tokoh masyarakat disini adalah tokoh agama, pemuda dan orang yang dipercayai menjadi wakil dusun untuk duduk di kepengurusan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Hubungan antara Tokoh masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan, sebagian besar kurang bagus, kecuali Desa Bantan Air dan Bantan Tengah. Karena keberadaan tokoh masyarakat kebetulan masih dalam satu dusun beda RW. Sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dalam

pemeliharaan prasarana P2D di dusun mereka, serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi juga.

Tokoh masyarakat di desa Jangkang adalah ketua BPD Jangkang, dalam pemeliharaan prasarana P2D, perannya tidak bagus, karena jarang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D, karena kegiatan pemeliharaan prasarana ini bukan proyek dan tidak ada anggaran dananya dari pemerintah pusat atau daerah.

Sedangkan tokoh masyarakat di desa Teluk Lancar adalah seorang yang di tuakan karena beliau seorang mantan kepala desa Teluk Lancar sebelumnya. Tapi karena tinggalnya tidak di dusun dimana lokasi prasarana P2D berada. Sehingga beliau tidak bisa aktif dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D. Beliau lebih aktif membantu masyarakat dalam membangun masjid di dusun mereka, yang lokasi masjidnya di tanah wakaf beliau, dengan sumber dana dari Pemda Kabupaten Bengkalis dan masyarakat berswadaya membangunnya.



GAMBAR 4.16
HUBUNGAN TOKOH MASYARAKAT DENGAN
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Sumber : Hasil Analisis, 2004

4.3 Analisis Komprehensif

Analisis komprehensif dimaksudkan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan dilihat dari karakteristik masing-masing desa dan jenis prasarana yang ada.

1. Desa Jangkang

Jenis Prasarana yang ada di desa Jangkang berupa semenisasi jalan di dusun Tambak Rejo pada Tahun 2003, yang sebagian besar masyarakatnya adalah buruh Tani, atau bangunan di Kota Bengkalis, kemudian pegawai swasta, wiraswasta dan nelayan. Dengan tingkat pendidikan sebagian besar adalah tamat SD, SLTA dan SLTP, dan tingkat pendapatan masyarakat sekitar 150.000 s/d 750.000 rupiah.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan sebagian memberikan saran dan sebagian lagi tidak aktif, dengan intensitas kegiatan diatas 6 bulan dan bentuk sumbangan yang diberikan berupa tenaga, serta dilihat dari derajat kesukarelaan masyarakat merasa tidak terpaksa dalam keikutsertaan mereka dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari kehadirannya dalam pertemuan adalah rendah atau jarang hadir, sedangkan keaktifan dalam diskusi adalah cukup aktif, begitu juga keaktifan dalam kegiatan pemeliharaan masyarakat cukup aktif. Pada tahap awal pemeliharaan prasarana masyarakat masih menggunakan sisa dana dari program P2D, sedangkan sumbangan atau iuran warga belum begitu diperlukan karena pemeliharaan prasarana P2D belum ada kerusakan yang berarti dan membutuhkan dana untuk perbaikan.

Dilihat dari Karakteristik masyarakat dan jenis prasarana yang ada dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Desa Jangkang serta berdasarkan perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa faktor internal yang mempunyai hubungan dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat adalah jenis

pekerjaan dan tingkat pendapatan. Maka di dalam pemeliharaan prasarana P2D di Desa Jangkang ini sebaiknya, dapat ditentukan waktu pertemuan yang dapat dihadiri dan disepakati oleh seluruh warga yang mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga dapat ditentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan seberapa besar sumbangan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan berapa pula yang harus ditangani oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Dan juga karena jenis prasarana yang dibangun berupa semenisasi jalan sehingga waktu yang digunakan untuk pemeliharaannya tidak memerlukan intensitas yang sering, kecuali apabila nanti ada kerusakan yang berat sehingga memerlukan penanganan segera, supaya tidak bertambah parah kerusakannya dan mengakibatkan kerusakan pada bagian lain dari prasarana tersebut.

2. Desa Bantan Tua

Jenis prasarana yang dibangun di desa Bantan Tua adalah berupa normalisasi sungai di dusun Imam Baiquni pada Tahun 2003. sebagian besar masyarakatnya adalah bekerja sebagai pegawai swasta di Kota Bengkalis, petani dan juga ada yang belum mempunyai pekerjaan tetap, dan tingkat pendapatan mayoritas antara 150.000 s/d 450.000 rupiah, serta mayoritas tingkat pendidikan adalah tamat SLTA.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D di Desa Bantan Tua, dengan memberikan saran dan sebagian lagi tidak aktif dalam pertemuan. Memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga dan intensitas kegiatan dalam pemeliharaan prasarana P2D antara 3 s/d 6 bulan, serta mayoritas masyarakat tidak terpaksa dalam keikutsertaan mereka.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari kehadiran mereka dalam pertemuan adalah sering hadir dan sebagian lagi jarang hadir, dan keaktifan dalam diskusi adalah cukup aktif dan sebagian lagi aktif dalam diskusi. Sedangkan dalam kegiatan pemeliharaan

sebagian besar masyarakat adalah cukup aktif. Sumber dana yang digunakan dalam pemeliharaan dari sumbangan masyarakat dan bantuan dari pemerintah yaitu berupa pinjaman alat potong rumput di Kecamatan Bantan.

Dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat dan berdasarkan hasil perhitungan *Chi Square* bahwa yang berjenis pekerjaan sebagai petani tingkat partisipasinya tinggi, yang berjenis pekerjaan sebagai pegawai swasta adalah sama tingkat partisipasinya yang rendah, agak tinggi dan tinggi. Sedangkan masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap tingkat partisipasinya tinggi dan sebagian lagi rendah dan sangat rendah. Dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat, bahwa yang berpendapatan rendah yaitu dibawah 450.000 rupiah adalah tingkat partisipasinya agak tinggi dan tinggi.

Dari hasil penelitian tersebut, maka yang dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Bantan Tua yang mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemeliharaan prasarana P2D berupa normalisasi sungai adalah masyarakat yang berjenis pekerjaan sebagai petani dengan tingkat pendapatan rendah. Karena mereka mempunyai kepentingan yang sangat besar akan prasarana tersebut, sehingga mereka tetap bisa bekerja walaupun telah terjadi hujan ditempat mereka dan tidak terjadi genangan air lagi di perkebunan karet masyarakat.

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, maka perlu diperhatikan kepentingan masing-masing masyarakat terhadap prasarana yang sudah dibangun oleh program P2D, untuk itu perlu diketahui sejauh mana manfaat didapat oleh masyarakat setempat dengan adanya prasarana P2D yang sudah dibangun.

3. Desa Selat Baru

Jenis Prasarana yang dibangun di Desa Selat Baru berupa Badan Jalan di Dusun Pantai Indah pada tahun 2003. Dusun Pantai Indah juga adalah lokasi pariwisata di

Kecamatan Bantan, yang tersedia warung-warung makanan dan minuman menghadap Selat Malaka dan juga tersedia panggung hiburan. Masyarakat dusun Pantai Indah mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan pedagang, dengan tingkat pendapatan sebagian besar antara 150.000 s/d 450.000 rupiah, dan sebagian lagi diatas 450.000 s/d 1.000.000 rupiah. Tingkat pendidikan masyarakat mayoritas adalah tamat SD.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan sebagian tidak aktif dan sebagian lagi memberikan saran, dalam kegiatan pemeliharaan mayoritas memberikan bantuan tenaga, dan ada juga yang memberikan bantuan berupa tenaga dan material, tenaga dan uang, dengan intensitas kegiatan yang dalam pemeliharaan prasarana antara 3 s/d 6 bulan, dan mayoritas masyarakat merasa tidak terpaksa dalam kekikutsertaan mereka.

Sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam kehadiran pertemuan adalah sebagian besar cukup sering hadir, kemudain sangat sering hadir dan sering hadir. Dan keaktifan dalam diskusi adalah sebagian besar cukup aktif, kemudian kurang aktif dan aktif. Begitu juga dengan keaktifan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D, mereka sebagian besar cukup aktif, dan aktif. Sedangkan sumber dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sebagian besar berasal dari masyarakat dan bantuan pemerintah berupa alat potong rumput yang dipinjam dari kantor Kecamatan Bantan.

Dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, diketahui bahwa yang jenis pekerjaan sebagai petani tingkat partisipasinya sebagian besar adalah tinggi, nelayan tingkat partisipasinya sebagian besar adalah agak tinggi, pedagang tingkat partisipasinya sebagian besar adalah tinggi. Dan dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang yaitu dibawah 450.000 dan diatas 450.000 s/d 1.000.000, sebagian besar adalah agak tinggi, kemudian tinggi.

Dari hasil penelitian diatas, maka walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang dengan tingkat partisipasi masyarakatnya adalah tinggi, tapi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan mereka juga sebagian ada juga yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pedagang, terutama pada hari-hari sabtu dan minggu yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik. Jadi karena fungsi dusun mereka sebagai daerah pariwisata yang menjadikan pemicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Sehingga untuk akan datang dusun Pantai Indah di Desa Selat Baru, tidak perlu mendapatkan bantuan program P2D, karena perhatian Pemda Kabupaten terhadap dusun ini cukup besar karena merupakan daerah wisata.

4. Desa Bantan Tengah

Jenis prasarana yang dibangun di Desa Bantan Tengah adalah berupa normalisasi sungai pada tahun 2003. masyarakat di Bantan Tengah dimana lokasi P2D berada mayoritas adalah petani dan sebagian lainnya sebagai wiraswasta. Dengan tingkat pendapatan mayoritas adalah rendah berkisar antara 150.000 s/d 450.000 rupiah, dan tingkat pendidikan masyarakatnya adalah sebagian besar tamat SLTA.

Bentuk partisipasi dalam pertemuan sebagian besar memberikan saran dan yang lainnya tidak aktif, dan bentuk sumbangan yang diberikan dalam kegiatan pemeliharaan berupa tenaga dan ada juga yang berupa tenaga dan material. Dengan intensitas kegiatan berkisar antara 3 s/d 6 bulan. Derajat kesukarelaan masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam kegiatan pemeliharaan adalah tidak terpaksa, tapi ada juga yang terpaksa karena merasa kurang memberikan manfaat bagi dirinya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehadiran pertemuan sebagian besar adalah sering hadir dan sebagian lainnya cukup sering hadir. Sementara itu keaktifan mereka dalam diskusi dan kegiatan pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah cukup aktif

dan sebagian lagi aktif dalam diskusi dan kegiatan pemeliharaan. Sedangkan sumber dana yang digunakan dalam pemeliharaan berasal dari sisa pelaksanaan program P2D.

Dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat di desa Bantan Tengah yang sebagian besar sebagai petani dan lainnya wiraswasta, maka dari hasil perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa petani tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah tinggi dan kemudian agak tinggi, sedangkan yang berjenis pekerjaan sebagai wiraswasta mayoritas adalah agak tinggi.

Maka dari hasil penelitian dilihat dari karakteristik masyarakat dan jenis prasarana yang dipelihara oleh masyarakat terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bantan Tengah, karena sebagian besar adalah petani dan hanya sebagian kecil saja yang berwiraswasta, maka bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang berjenis pekerjaan sebagai wiraswasta dapat juga atau sadar juga akan manfaat secara tidak langsung akan prasarana yang sudah dibangun oleh program P2D, sehingga mereka akan berpartisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D dan mau menyumbangkan uangnya.

5. Desa Bantan Air

Desa Bantan Air yang sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan terutama pada dusun Sidomulyo yang letaknya berbatasan dengan Selat Malaka, dimana lokasi P2D juga berada yang dibangun pada tahun 2003 berupa semenisasi jalan. Dengan tingkat pendapatan masyarakatnya mayoritas adalah rendah antara 150.000 s/d 450.000 rupiah, dan tingkat pendidikan tamat SD.

Sebagian besar bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan tidak aktif, hanya beberapa orang yang memberikan saran, sedangkan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar masyarakat menyumbang dalam bentuk tenaga, dan

intensitas kegiatan berkisar diatas 6 bulan. Derajat keikutsertaan sebagian besar masyarakat dalam setiap kegiatan merasa tidak terpaksa, dan ada juga yang merasa terpaksa.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehadiran pertemuan adalah sering, dan ada sebagian yang jarang hadir, sementara itu keaktifan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan pemeliharaan prasarana adalah cukup aktif, kemudian kurang aktif. Sedangkan sumber dana yang digunakan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana mayoritas adalah berasal dari sumbangan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa jenis pekerjaan sebagai petani tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah tinggi, sedangkan nelayan sebagian besar adalah agak tinggi. Begitu halnya juga dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, tingkat partisipasinya dalam pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah agak tinggi.

Nelayan yang ada di Desa Bantan Air, sebagian besar mereka tidak mempunyai pekerjaan sampingan baik itu sebagai petani atau yang lainnya, kecuali beberapa orang yang juga berjualan dengan membuka kedai dirumahnya. Sehingga tidak semua nelayan mendapatkan manfaat langsung untuk meningkatkan perekonomian mereka. Keikutsertaan mereka dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D ini hanya untuk kebersamaan sebagai anggota masyarakat setempat. Untuk itu hendaknya prasarana yang akan dibangun di desa Bantan Air juga dapat memperhatikan kebutuhan nelayan dalam meningkatkan perekonomian mereka.

6. Desa Muntai

Desa Muntai menerima bantuan program P2D pada tahun 2001 berupa pembuatan badan jalan di RW 04 dusun Simpang Tugu, yaitu daerah pemukiman masyarakat yang

tadinya adalah jalan tanah setapak, lalu dibuatkan badan jalan dengan membuat parit pada kiri kanan jalan. Masyarakat setempat pada sebagian besar adalah nelayan, kemudian petani, dengan tingkat pendapatan berkisar antara 150.000 s/d 450.000 rupiah dan tingkat pendidikan adalah tamat SD.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan sebagian besar memberikan saran, dan ada juga yang tidak aktif. Sementara itu bentuk sumbangan yang diberikan dalam kegiatan pemeliharaan sebagian besar dalam bentuk tenaga, dengan intensitas kegiatan dilakukan diatas 6 bulan sekali. Begitu halnya juga dengan derajat kesukarelaan mereka pada umumnya tidak terpaksa.

Tingkat partisipasi dalam kehadiran pertemuan sebagian besar adalah sering hadir, begitu juga keaktifan dalam diskusi sebagian besar adalah aktif, sedangkan keaktifan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar cukup aktif. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan sebagian besar masyarakat tidak menarik sumbangan, hal ini karena tidak ada perbaikan yang signifikan membutuhkan dana.

Dilihat dari hasil penelitian di Desa Muntai, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat aktif dalam kegiatan pertemuan, sedangkan dalam kegiatan pemeliharaannya mereka cukup aktif. Sedangkan berdasarkan perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa nelayan tingkat partisipasinya dalam pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah agak tinggi. Dilihat dari jenis prasarana dengan kebutuhan masyarakat setempat yang pada umumnya nelayan, memang tidak terlalu berbeda dengan pembuatan badan jalan dengan jalan sebelumnya, makanya dalam kegiatan pemeliharaan mereka agak aktif, sedangkan keaktifan mereka dalam pertemuan karena kegiatan pertemuan dilakukan pada saat kegiatan wirit yang dilakukan rutin di dusun mereka. Untuk itu sebaiknya di desa Muntai, jenis prasarana yang dibangun dapat ditingkatkan dengan semenisasi jalan, sehingga jalan

di permukiman masyarakat yang pada umumnya nelayan, menjadi lebih baik tidak lagi becek apabila hujan.

7. Desa Teluk Pambang

Masyarakat di Dusun Parit Rambai desa Teluk Pambang, pada umumnya bekerja sebagai buruh tani dan ada juga yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Tingkat pendapatan masyarakat adalah rendah berkisar antara 150.000 s/d 450.000 rupiah dan tingkat pendidikan adalah tamat SD. Sedangkan jenis prasarana yang dibangun sama dengan desa Muntai berupa badan jalan pada tahun 2001.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan sebagian besar memberikan saran, dan sebagian lagi tidak aktif sama sekali. Sedangkan bentuk sumbangan yang diberikan dalam kegiatan pemeliharaan pada umumnya berupa tenaga, dan intensitas kegiatan diatas 6 bulan, serta keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan, masyarakat merasa tidak terpaksa.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari kehadiran dalam pertemuan sebagian besar cukup sering hadir, dan sebagian lagi tidak hadir. Keaktifan dalam diskusi sebagian masyarakat cukup aktif dan sebagian lagi tidak aktif, begitu juga keaktifan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah cukup aktif. Sedangkan sumber dana yang digunakan untuk pemeliharaan sebagian besar tidak ada.

Dari hasil perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa, masyarakat yang berjenis pekerjaan buruh tingkat partisipasinya dalam pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah agak tinggi.

Dilihat karekteristik masyarakat di dusun Parit Rambai desa Teluk Pambang yang sebagian besar adalah buruh tani dan ada juga yang belum memperoleh pekerjaan tetap, dengan pendapatan rendah, maka dalam pemeliharaan prasarana P2D di Desa Teluk

Pembang, bantuan Pemerintah Daerah untuk ikut memelihara prasarana P2D sangat diperlukan.

8. Desa Kembang Luar

Jenis Prasarana yang dibangun di Desa Kembang Luar berupa badan jalan pada tahun 2003, lokasi prasarana ini letaknya dari jalan kabupaten menuju ke perkebunan karet masyarakat, sedangkan permukiman masyarakat sepanjang jalan kabupaten. Masyarakat Desa Kembang Luar sebagian besar sebagai petani, kemudian wiraswasta dan juga ada yang belum memperoleh pekerjaan tetap, dengan tingkat pendapatan rendah yaitu berkisar antara 150.000 s/d 450.000 rupiah. Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar adalah tamat SLTA.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan sebagian besar memberikan saran, kemudian ada juga yang tidak aktif. Sementara itu bentuk sumbangan yang diberikan dalam kegiatan pemeliharaan berupa tenaga, dan ada beberapa orang yang menyumbang tenaga dan material. Dan intensitas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan sebagian besar mereka tidak melakukan kegiatan, tetapi sebagian lagi mereka melakukan kegiatan berkisar antara 3 s/d 6 bulan sekali. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan prasarana pada umumnya merasa tidak terpaksa.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari kehadiran dalam pertemuan sebagian besar adalah sering hadir, dan ada juga beberapa yang jarang hadir. Keaktifan dalam diskusi sebagian besar adalah aktif dan begitu juga ada beberapa yang kurang aktif, sedangkan keaktifan dalam kegiatan pemeliharaan adalah sama antara yang aktif dan kurang aktif. Sumber dana yang digunakan dalam pemeliharaan sebagian besar mereka tidak menarik sumbangan atau iuran dalam bentuk uang, cuma dengan mengharapkan

bantuan masyarakat dalam bentuk material seperti racun tanaman, alat seprot dan lainnya, yang diperlukan untuk membersihkan badan jalan.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang berjenis pekerjaan sebagai petani tingkat partisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D sebagian besar adalah tinggi, sedangkan yang berwiraswasta agak tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D.

Maka dilihat dari hasil penelitian diatas, untuk di desa Kembang Luar perlu diidentifikasi masyarakat mana saja yang memanfaatkan prasarana badan jalan tersebut, apakah dari masyarakat setempat dimana prasarana itu berada sedangkan masyarakat setempat tidak semuanya petani atau buruh tani, ataukah ada juga dari masyarakat yang jauh dari prasarana tersebut, sehingga jelas siapa penanggungjawab pemeliharaan prasarana tersebut.

9. Desa Teluk Lancar

Desa Teluk Lancar adalah desa yang paling ujung letaknya di Kecamatan Bantan, pertama kali menerima bantuan program P2D pada tahun 2003, berupa pembuatan badan jalan di dusun Parit Tengah, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dengan tingkat pendapatan rendah yaitu berkisar antara 150.000 s/d 450.000, dan tingkat pendidikan tamat SD.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pertemuan sebagian besar masyarakat memberikan saran, kemudian tidak aktif dan memberikan usulan. Bentuk sumbangan yang diberikan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D, mayoritas adalah berupa tenaga, dan intensitas kegiatan yang dilakukan berkisar antara 1 s/d 3 bulan, dan ada juga berkisar diatas 6 bulan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan prasarana P2D pada umumnya merasa tidak terpaksa.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari kehadiran dalam pertemuan sebagian besar adalah sering hadir, dan keaktifan dalam diskusi berimbang antara yang cukup aktif dan tidak aktif, kemudian aktif. Sedangkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan sebagian besar adalah cukup aktif. Sumber dana yang digunakan dalam pemeliharaan prasarana P2D, berimbang yang berasal dari sisa dana program P2D, bantuan pemerintah dan tidak ada sumber dana yang digunakan dalam pemeliharaan prasarana P2D, serta hanya sebagian kecil yang berasal dari masyarakat setempat. Bantuan pemerintah disini sebetulnya adalah sisi dari program P2D itu sendiri, mereka menganggapnya masih bantuan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari sisa program P2D dan sebagian kecil dari sumbangan masyarakat, sedangkan sebagian lagi menyatakan tidak ada dana yang digunakan dalam pemeliharaan prasarana P2D.

Dari hasil penelitian diatas di desa Teluk Lancar diketahui bahwa, letak desa yang jauh dari pusat ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten, dan minimnya pembangunan yang ada, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam pemeliharaan prasarana P2D adalah tinggi, maka dalam pemeliharaan prasarana P2D, masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik berupa dana maupun bentuk ransangan lainnya dengan meningkatkan badan jalan menjadi semenisasi jalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan program P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dapat diketahui karakteristik masyarakat, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Karakteristik masyarakat di Kecamatan Bantan sebagian besar adalah berjenis pekerjaan sebagai petani, kemudian sebagai nelayan, dan buruh tani, dengan tingkat pendapatan yang rendah berkisar antara dibawah 450.000 rupiah dan berpendapatan sedang berkisar diatas 450.000 s/d 1.000.000. serta tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar adalah tamat SD, kemudian tamat SLTA dan tamat SLTP. Dan jenis prasarana yang dibangun oleh program P2D di Kecamatan Bantan pada umumnya berupa semenisasi jalan, badan jalan dan normalisasi sungai.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat pada lokasi studi dalam pemeliharaan prasarana P2D di Kecamatan Bantan adalah sebagian besar berupa saran dan kritik, tidak ada yang memberikan usulan, serta sebagian lagi masyarakat tidak aktif dalam pertemuan.

Keaktifan masyarakat dalam pertemuan, dan kegiatan fisik pemeliharaan prasarana P2D, tergantung dari karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat dan jenis prasarana yang ada.

Intensitas kegiatan pemeliharaan prasarana P2D khususnya dan prasarana lain yang ada di dusun mereka adalah diatas 6 bulan sekali, hal ini terkait dengan jenis prasarana, kondisi dan lokasi dimana prasarana tersebut berada.

Dalam kegiatan fisik pemeliharaan prasarana P2D, sebagian besar masyarakat memberikan sumbangannya dalam bentuk Tenaga, hal ini karena sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah. Dan Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan fisik program P2D, sebagian besar masyarakat cukup aktif.

Dalam Keikutsertaan mereka dalam pemeliharaan prasarana P2D, masyarakat merasa tidak terpaksa, karena mereka menganggap kegiatan pemeliharaan prasarana ini adalah untuk kepentingan bersama. Tapi ada juga yang merasa terpaksa karena keikutsertaan mereka bukan atas kesadaran sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D dilihat dari kehadiran mereka dalam pertemuan adalah Sering hadir dalam kegiatan pertemuan yang diadakan bersamaan dengan kegiatan rutin masyarakat berupa pengajian/wirid.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari keaktifan dalam pertemuan adalah sebagian besar Aktif dan kemudian sebagian tidak aktif. Karena terkait dengan kehadiran dan partisipasi dalam pertemuan.

Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari keaktifan dalam kegiatan fisik pemeliharaan prasarana P2D adalah sebagian besar masyarakat aktif, dengan menyumbangkan tenaga, uang dan intensitas kegiatan yang dilakukan

Sumber dana yang dipergunakan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D, sebagian masih menggunakan sisa dana program P2D dan sebagian lagi dari sumbangan masyarakat, dan ada beberapa desa yang tidak menarik dari masyarakat atau dana lainnya untuk pemeliharaan prasarana P2D.

Faktor Internal yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan.

Dari hasil perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa ada perbedaan jenis pekerjaan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana. Masyarakat yang belum dapat pekerjaan tetap, petani dan wiraswasta mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi, sedangkan buruh, nelayan dan wiraswasta mayoritas mempunyai tingkat partisipasi yang agak tinggi.

Hasil dari perhitungan *Chi Square*, diketahui bahwa ada perbedaan antara jenis pendapatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasaana P2D. Tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, kelompok pendapatan rendah dan sedang tidak mempunyai perbedaan tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan kelompok pendapatan tinggi terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana P2D.

Dari hasil perhitungan *Chi Square* diketahui bahwa Konsultan dan Tokoh masyarakat mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin bagus peran faktor eksternal semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan dan hasil analisis komprehensif, maka dapat disampaikan rekomendasi yang berupa usulan bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana program P2D, maupun untuk pelaksanaan program P2D selanjutnya atau program-program yang sejenis dimasa yang akan datang.

Adapun usulan yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat atau Daerah, didalam menentukan lokasi mana yang patut menerima bantuan prasarana P2D, sebaiknya perhatikan karakteristik dusun dan desa yang akan menerima bantuan tersebut, apakah layak atau tidak untuk diberikan bantuan program P2D, seperti di Desa Selat Baru, yang dusun Parit Indah adalah daerah pariwisata di Kecamatan Bantan, karena sudah banyak kegiatan pembangunan di Dusun Parit Indah, baik itu dari Pemda Kabupaten Bengkalis maupun dari Propinsi Riau untuk mengembangkan daerah ini, maka sebaiknya untuk dusun Parit Indah desa Selat Baru tidak lagi mendapatkan bantuan program P2D dari Pemerintah Pusat, karena masih banyak dusun-dusun lain yang membutuhkan bantuan dari program P2D ini.
2. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam menentukan jenis prasarana apa yang akan dibangun disuatu tempat, harus diperhatikan semua kepentingan semua masyarakat, tidak hanya sebagian atau beberapa masyarakat saja yang ada di sekitar lokasi prasarana P2D yang akan dibangun, seperti di desa Bantan Tengah dan Desa Bantan Tua yang tidak semua masyarakatnya petani tapi ada juga sebagai wiraswasta dan pegawai swasta, sedangkan prasarana yang dibangun berupa normalisasi sungai sehingga tidak terjadi genangan air di perkebunan masyarakat bila hujan, untuk itu pemerintah melalui aparatnya di daerah dapat memberikan motivasi kepada semua masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan prasarana P2D, sedangkan Desa Bantan Air sebagian masyarakatnya sebagai nelayan merasa prasarana yang ada belum dapat untuk meningkatkan perekonomian mereka, sedangkan mereka ada yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani atau buruh tani, untuk itu pemerintah juga dapat memberikan bantuan untuk peningkatan perekonomian mereka.
3. Bagi Pemerintah Daerah, ada beberapa desa yang perlu mendapatkan perhatian dalam kegiatan Pembangunan, baik itu berupa bantuan pemeliharaan prasarana maupun

pembangunan dan peningkatan prasarana yang ada, seperti di desa Muntai yang sebagian besar masyarakatnya nelayan dan jenis prasarana berupa badan jalan di permukiman, sehingga supaya sebagian besar masyarakat setempat dapat memanfaatkan prasarana sesuai dengan kepentingannya, maka sebaiknya badan jalan dapat ditingkatkan menjadi semenisasi jalan, desa Teluk Pambang yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani dan ada juga yang belum memperoleh pekerjaan tetap sehingga bantuan pemerintah daerah baik berupa dana pemeliharaan maupun peningkatan prasarana P2D dari badan jalan menjadi semenisasi jalan sangat diperlukan, dan Teluk Lancar adalah desa yang paling jauh letaknya dan sangat minim pembangunan, yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan buruh tani, perhatian Pemerintah Daerah sangat diharapkan baik berupa bantuan dana perawatan maupun peningkatan dan pembangunan prasarana lainnya.

4. Bagi masyarakat di Desa Jangkang, dengan bermacam-macamnya jenis pekerjaan masyarakat setempat, hendaknya dapat menentukan waktu yang tepat untuk pertemuan sehingga dapat ditentukan kapan waktu pemeliharaan prasarana P2D. Sedangkan bagi masyarakat di Desa Kembang Luar, karena badan jalan yang dibangun letaknya tidak didaerah permukiman masyarakat setempat, tapi didaerah perkebunan karet masyarakat, hendaknya dapat diketahui siapa saja yang memanfaatkan prasarana badan jalan yang sudah dibangun oleh program P2D, sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan prasarana P2D tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bintarto, R, 1983, *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Budiharjo, Eko, 1991, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Chamber, Robert, 1996, *PRA : Memahami Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Cochan, William G, 1991, *Teknik Penerikan Sampel*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Conyers, Diana alih bahasa Susetiawan, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Daldjoeni, N, 1998, *Geografi Kota dan Desa*, Bandung, Penerbit Alumni.
- _____, *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni.
- Dwipayana, AAGN Ari dkk, 2003, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Methodology Research*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Ibrahim, Jabal Tarik, 2003, *Sosiologi Pedesaan*, Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kartasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- Litwin, Howard, 1986, *Correlates of Community Callaburation. In Yair Levi and Howard Letwin (Eds) Community and Cooperative in Participatory Development*, England, Gower Publishing Company.
- Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Moleong, Lexy J, Dr, M.A, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, dkk, 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yogyakarta, Penertit Aditya Media.
- _____, 1993, *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan, Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*, Yogyakarta, P3PK UGM.
- Nasir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nasution, 2002, *Methodology Research*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Panudju, Bambang, DR, Ir, M.Phil, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Salusu, J, 1998, *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta, Penerbitan Gramedia.
- Sevilla, Consuelo, et alih bahasa Tuwu, Alimuddin, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Sigit, Soehardi, 1999, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, 1995, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Sugiarto, et al, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono, 1976, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tannenbaum R, dkk, *Partisipasi dan Dinamika Kelompok*, Jakarta Dahara Prize.
- Thio, Alex, 1989, *Sociology : An Introduction, Second Edition*, New York, Harper and Row Publishers.

TERBITAN TERBATAS

Tata Loka, 2003, *Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 5*, Semarang, Biro Penerbitan Planologi UNDIP.

Tampubolon, D, P, 2001. *Pendidikan Pola Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*, Jurnal, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

Bappenas, 2001, *Konsep Strategi dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)*, Jakarta, Sekretariat Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).

Mendagri dan Otonomi Daerah, 2001, *Panduan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)*, Jakarta, Tim Koordinasi P2D Pusat.

TESIS

Sihono, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo Surakarta*, Semarang, Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota UNDIP.

Widyonindito, Sigit, 2003, *Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang*, Semarang, Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.

Yulianti, Rina, 2000, *Efektifitas Metode Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumahan Mojosongo Surakarta*, Semarang, Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.